Kementerian PPN/
Bappenas

# Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia

Triwulan III Tahun 2020

**Edisi Vol. 4, No. 3 November 2020**
ISSN 2580-2518

# KATA PENGANTAR

Perkembangan Perekonomian Indonesia dan Dunia merupakan publikasi triwulanan yang diterbitkan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas. Publikasi ini didasarkan pada data dan informasi yang sudah dipublikasikan oleh Kementerian/Lembaga, instansi internasional, asosiasi, maupun hasil dari diskusi terbatas perkembangan ekonomi yang dilakukan bersama dengan beberapa Kementerian/Lembaga, pengamat, dan praktisi ekonomi.

Publikasi triwulan III tahun 2020 ini memberikan gambaran dan analisis mengenai perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia hingga triwulan III tahun 2020. Dari sisi perekonomian dunia, publikasi ini memuat perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara kawasan Eropa, serta kondisi ekonomi regional Asia. Dari sisi perekonomian nasional, publikasi ini membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2020 dari sisi moneter, fiskal, neraca perdagangan, investasi, industri dalam negeri, perekonomian daerah, serta proyeksi ekonomi.

Sangat disadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan dan penyempurnaan. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang membangun dari Pembaca tetap sangat diharapkan, agar tujuan dari penyusunan dan penerbitan publikasi ini dapat tercapai.

Jakarta, November 2020

Deputi Bidang Ekonomi

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Kondisi perekonomian global pada triwulan III tahun 2020 membaik, namun belum merata sejalan dengan perkembangan kasus Covid-19 di masing-masing negara. Perekonomian Amerika Serikat terkontraksi 2,9 persen (YoY), Korea Selatan terkontraksi 1,3 persen (YoY), sementara Jepang terkontraksi 5,8 persen (YoY). Di sisi lain, perekonomian Tiongkok telah kembali tumbuh sebesar 4,9 persen (YoY), meskipun masih lebih rendah dari tingkat sebelum pandemi. Harga komoditas internasional juga membaik dibandingkan triwulan sebelumnya walaupun masuh rendah. Harga komoditas pertanian pada triwulan III tahun 2020 bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang smaa tahun 2019.

Perekonomian Indoensia pada triwulan III tahun 2020 terkontraksi 3,5 persen (YoY). Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi hingga 5,3 persen (YoY). Perbaikan tersebut didorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah khususnya realisasi bantuan sosial untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu, juga terjadi perbaikan kinerja pada seluruh kelompok pengeluaran. Dari sisi sektoral, terdapat tujuh sektor yang tumbuh positif pada triwulan III tahun 2020, salah satunya sektor pertanian. Sementara aktivitas pariwisata yang masih tertekan menyebabkan kontraksi cukup dalam pada sektor transportasi dan sektor akomodasi. Kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan III sebanyak 475 ribu kunjungan, yang didominasi oleh wisatawan dari Timor Leste dan Malaysia. Pada triwulan berjalan, aktivitas papriwisata bergantung pada wisatawan domestik.

Realisasi Belanja K/L hingga September 2020 tumbuh 13,7 persen (YoY) yang didorong oleh peningkatan realisasi pada belanja barang dan bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi Bantuan Sosial mencatat pertumbuhan sebesar 79,8 persen (YoY). Di sisi lain, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai 68,2 persen dari target APBN Perpres 72/2020. Secara keseluruhan, hingga akhir September 2020, defisit anggaran sekitar 4,2 persen terhadap PDB. Rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 36,4 persen, yang digunakan untuk pembiayaan pemulihan ekonomi. Realisasi pembiayaan anggaran mencapai 75,5 persen dari pagu Perpres 72/2020.

Sepanjang Juli-September, Bank Indonesia menahan suku bunga kebijakan pada level 4,00 persen dalam rangka menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendorong pemulihan ekonomi. Sepanjang triwulan III Rupiah relatif stabil dengan penguatan 1,8 persen dari triwulan sebelumnya. Perkembangan inflasi pada triwulan III rendah dan berada di bawah batas minimal sasaran inflasi 2020. Sepanjang Juli-September terjadi deflasi sebesar 0,1 persen setiap bulannya.

Surplus Neraca Pembayaran Indonesia turun menjadi USD 2,1 miliar yang disebabkan oleh turunnya transaksi modal dan finansial seiring tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global yang memicu aliran modal keluar pada investasi portofolio dari pasar keuangan domestik. Sementara itu, neraca transaksi berjalan mengalami surplus USD1,0 miliar. Pencapaian tersebut didorong oleh turunnya impopr barang yang lebih tinggi di tengah peningkatan ekspor.

Perekonomian global pada tahun 2020 diproyeksi terkontraksi 4,4 persen. Harga komoditas energi dan komoditas logam industri pada tahun 2020 secara keseluruhan turun. Di sisi lain, harga komoditas pertanian tetap kuat pada tahun 2020 yang didorong oleh turunnya produksi. Sementara itu, perekonomian Indonesia diproyeksi terus membaik meskipun masih terkontraksi pada triwulan IV 2020. Dorongan dari konsumsi pemerintah diperkirakan melambat dibandingkan triwulan III. Penambahan hari libur pada bulan Desember diharapkan menjadi pendorong untuk perbaikan konsumsi rumah tangga. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 secara keseluruhan diprediksi terkontraksi 2,0 persen.

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI** ..... **III**
**DAFTAR TABEL** ..... **IV**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **6**
**PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA** ..... **8**
**PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA** ..... **15**
**2.1 Produk Domestik Bruto** ..... **15**
Investasi ..... 22
Industri ..... 25
Pariwisata ..... 31
**2.2 Produk Domestik Regional Bruto** ..... **35**
**2.3 Fiskal** ..... **43**
**2.4 Moneter dan Jasa Keuangan** ..... **54**
Moneter ..... 54
Jasa Keuangan ..... 59
**2.5 Neraca Pembayaran** ..... **70**
Neraca Perdagangan ..... 76
Kerjasama Ekonomi Internasional ..... 80
**PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI** ..... **89**
**3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global** ..... **89**
**3.2 Proyeksi Perekonomian Indonesia** ..... **93**
**POLICY BRIEF** ..... **96**

# DAFTAR TABEL


Tabel 1. Suku Bunga Kebijakan Beberapa Negara ..... 11
Tabel 2. Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ..... 17
Tabel 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto ..... 19
Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi ..... 21
Tabel 5. Realisasi Investasi ..... 22
Tabel 6. Realisasi Investasi Sektor Sekunder ..... 23
Tabel 7. Sektor PMA Terbesar ..... 23
Tabel 8. Realisasi PMA Terbesar Berdasarkan Negara Asal ..... 23
Tabel 9. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi ..... 24
Tabel 10. Lokasi PMA Terbesar ..... 24
Tabel 11. Sektor dan Lokasi PMDN Terbesar ..... 25
Tabel 12. Penyerapan Tenaga Kerja ..... 25
Tabel 13. Kunjungan Wisman berdasarkan Pintu Masuk dan Negara Asal ..... 32
Tabel 14. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah ..... 42
Tabel 15. Realisasi Komponen Pendapatan Negara dan Hibah ..... 43
Tabel 16. Realisasi Komponen Penerimaan Perpajakan ..... 44
Tabel 17. Realisasi Komponen PNBP ..... 45
Tabel 18. Realisasi Komponen Belanja Pemerintah Pusat ..... 47
Tabel 19. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ..... 49
Tabel 20. Perkembangan Komponen Pembiayaan ..... 51
Tabel 21. Rincian Realisasi Anggaran Program PEN ..... 52
Tabel 22. Realisasi APBN s.d 30 September 2019 dan 2020 ..... 53
Tabel 23. Perkembangan Reverse Repo Surat Berharga Negara ..... 54
Tabel 24. Tingkat Inflasi Domestik ..... 57
Tabel 25. Tingkat Inflasi Domestik Berdasarkan Komponen (YoY) ..... 58
Tabel 26. Inflasi Kelompok Pengeluaran (MtM) ..... 58
Tabel 27. Perkembangan Kredit Bank Umum Konvensional ..... 62
Tabel 28. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah ..... 67
Tabel 29. Penyaluran Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha ..... 68
Tabel 30. Aset IKNB Syariah 2019 – 2020 ..... 70
Tabel 31. Neraca Pembayaran ..... 74
Tabel 32. Neraca Perdagangan ..... 76
Tabel 33. Nilai Ekspor dan Impor Migas ..... 76
Tabel 34. Nilai Ekspor Nonmigas berdasarkan Sektor ..... 77
Tabel 35. Nilai Ekspor Nonmigas 10 Golongan Barang HS 2 Digit Terbesar ..... 77
Tabel 36. Nilai Ekspor Nonmigas di Beberapa Negara Mitra Dagang Utama ..... 78
Tabel 37. Nilai Impor berdasarkan Golongan Penggunaan Barang ..... 79
Tabel 38. Nilai Impor Nonmigas 10 Golongan Barang HS 2 Digit Terbesar ..... 79
Tabel 39. Nilai Impor Nonmigas di Beberapa Negara Mitra Dagang Utama ..... 80

Tabel 40. Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota RCEP ..... 82
Tabel 41. Lokasi Perkembangan Perjanjian Internasional Indonesia ..... 82
Tabel 42. Perkembangan Perjanjian Internasional Indonesia ..... 85
Tabel 43. Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA ..... 87
Tabel 44. Kontribusi Nilai Perdagangan Indonesia berdasarkan FTA terhadap Total Perdagangan Indonesia dengan Dunia ..... 88
Tabel 45. Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara ..... 90
Tabel 46. Proyeksi Harga Komoditas Global ..... 91
Tabel 47. Konsensus Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ..... 93
Tabel 48. PDB Berdasarkan Pengeluaran ..... 94
Tabel 49. PDB Berdasarkan Lapangan Usaha ..... 95

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ..... 8
Gambar 2. Perkembangan Harga Minyak Mentah ..... 12
Gambar 3. Perkembangan Harga Gas Alam dan Batu Bara ..... 12
Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ..... 15
Gambar 5. Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Triwulan III Tahun 2020 ..... 16
Gambar 6. Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran ..... 18
Gambar 7. Perkembangan Konsumsi RT dan Investasi terhadap PDB ..... 19
Gambar 8. Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas ..... 25
Gambar 9. Pertumbuhan Subsektor Industri Pengolahan Nonmigas ..... 26
Gambar 10. Ekspor Produk Industri ..... 27
Gambar 11. PMDN Sektor Industri ..... 27
Gambar 12. PMA Sektor Industri ..... 28
Gambar 13. Produksi Mobil ..... 28
Gambar 14. Penjualan Mobil ..... 29
Gambar 15. Penjualan Motor ..... 29
Gambar 16. Penjualan Domestik Semen ..... 30
Gambar 17. Purchasing Manufacturing Index ..... 31
Gambar 18. Kunjungan Wisman dan Nilai Ekspor Jasa Perjalanan ..... 31
Gambar 19. Jumlah Penumpang Transportasi Nasional ..... 33
Gambar 20. Tingkat Penghunian Kamar di Beberapa Provinsi ..... 34
Gambar 21. PDB Sektor Akomodasi dan Makan Minum ..... 34
Gambar 24. Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Pada Triwulan II Secara Spasial ..... 35
Gambar 23. Perkembangan Komponen Belanja Negara ..... 45
Gambar 24. Perkembangan Realisasi Defisit APBN ..... 50
Gambar 25. Perkembangan Utang Pemerintah Pusat ..... 51
Gambar 26. Perkembangan Realisasi Anggaran PEN ..... 52
Gambar 27. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD, 2019-2020 ..... 55
Gambar 28. Real Effective Exchange Rate ASEAN-5, (2010=100) ..... 56
Gambar 29. Perkembangan Uang Beredar ..... 57
Gambar 30. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IKK) dan Inflasi Inti, 2019-2020 .58
Gambar 31. Perkembangan Indeks Harga Pangan Strategis Nasional, (2018=100) ..... 58
Gambar 32. Kinerja Perbankan Konvensional ..... 59
Gambar 33. Perkembangan DPK Perbankan Konvensional ..... 60
Gambar 34. Perkembangan Kredit Perbankan Konvensional ..... 60
Gambar 35. Perkembangan IHSG dan Nilai Kapitalisasi Pasar Saham ..... 63
Gambar 36. Perkembangan Outstanding Obligasi Korporasi ..... 64
Gambar 37. Perkembangan Aset Industri Asuransi ..... 64
Gambar 38. Perkembangan Jumlah Aset Bersih dan Jumlah Investasi Dana Pensiun .... 65
Gambar 39. Perkembangan Industri Teknologi Keuangan (*peer-to-peer lending*) ..... 65

Gambar 40. Tingkat Wanprestasi Industri Teknologi Keuangan (*peer-to-peer lending*) 65
Gambar 41. Kinerja Perbankan Syariah ..... 66
Gambar 42. Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, dan Total Aset Perbankan Syariah ..... 67
Gambar 43. Kapitalisasi Pasar Saham ISSI, JII dan JII70 ..... 69
Gambar 44. *Outstanding* Sukuk Korporasi ..... 69
Gambar 45. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia ..... 70
Gambar 46. Neraca Jasa Perjalanan dan Transportasi ..... 71
Gambar 47. Neraca Pendapatan Primer dan Sekunder ..... 72
Gambar 48. Neraca Transaksi Finansial ..... 72

BAB I

# PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA

***Perekonomian global masih terkontraksi, meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya.***

Kasus Covid-19 sepanjang triwulan ketiga 2020 semakin tinggi, hingga akhir September mencapai 34,0 juta kasus terkonfirmasi. Efektivitas pengendalian Covid-19 di setiap negara mempengaruhi kecepatan pemulihan ekonominya. Tiongkok yang telah berhasil menekan pertumbuhan kasus hingga stabil menunjukkan pemulihan yang jauh lebih baik dibandingkan negara lain.

Sebagian negara menghadapi gelombang kedua dan kembali melakukan restriksi di daerah tertentu. Kondisi yang masih belum stabil menjadi penghambat pemulihan ekonomi global.

**Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara**

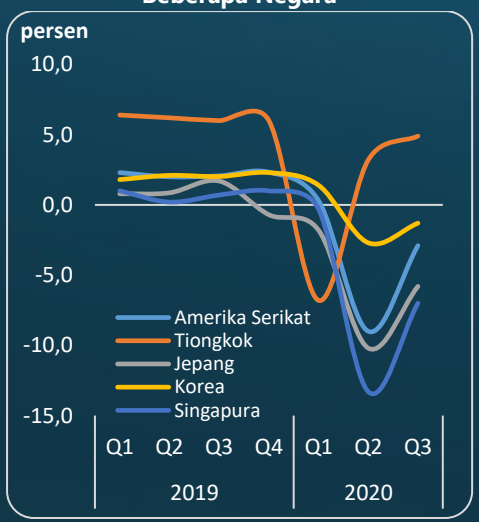


Sumber: CEIC

***Meskipun terkontraksi, perekonomian Amerika Serikat tunjukkan perbaikan.***

Perekonomian Amerika Serikat terkontraksi 2,9 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi hingga 9,0 persen (YoY). Seluruh komponen pengeluaran masih terkontraksi, kecuali pengeluaran pemerintah yang tumbuh melambat sebesar 0,3 persen (YoY).

Tunjangan pengangguran yang diberikan pemerintah berhasil mendorong konsumsi barang sebesar 7,2 persen (YoY), terutama untuk *durable goods*. Namun, permintaan jasa masih lemah menyebabkan kinerjanya terkontraksi sebesar 7,4 persen (YoY). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat terkontraksi 2,9 persen (YoY), namun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (-10,2 persen, YoY).

Kontraksi pada investasi domestik pada triwulan III tahun 2020 (-3,6 persen, YoY) lebih kecil dibandingkan triwulan II tahun 2020 (-16,9 persen, YoY), didorong oleh tumbuhnya investasi residen sebesar 7,1 persen (YoY). Namun, kontraksi pada investasi *structures* semakin dalam menjadi 15,5 persen (YoY),

Kinerja ekspor terkontraksi sebesar 14,5 persen (YoY), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi hingga 23,9 persen (YoY). Kontaksi yang terjadi pada ekspor jasa masih tinggi, mencapai 23,7 persen (YoY). Hal serupa terjadi pada kinerja impor jasa yang turun 27,7 persen (YoY). Secara keseluruhan, impor Amerika Serikat terkontraksi sebesar 8,6 persen (YoY).

Tingkat pengangguran di Amerika Serikat pada triwulan III tahun 2020 cenderung masih tinggi. Namun, sepanjang periode Juli-September, tingkat pengangguran berangsur turun. Hingga bulan September, tingkat pengangguran sebesar 7,9 persen.

***Perekonomian Korea Selatan, Jepang, dan Singapura terkontraksi.***

**Korea Selatan** kembali mengalami kontraksi ekonomi pada triwulan III tahun 2020 sebesar 1,3 persen (YoY), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (-2,7 persen, YoY). Konsumsi masyarakat terkontraksi semakin dalam sebesar 4,5 persen (YoY). Baik eekspor maupun impor terkontraksi masing-masing sebesar 3,7 dan 5,3 persen (YoY), yang disebabkan oleh turunnya kinerja perdagangan jasa.

Konsumsi pemerintah tumbuh melambat, yakni sebesar 4,5 persen (YoY). Investasi juga tumbuh positif sebesar 2,6 persen (YoY), didorong oleh peningkatan investasi fasilitas (9,2 persen, YoY). Namun, investasi pada konstruksi turun 1,6 persen (YoY). Kinerja investasi Korea Selatan sejauh ini lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang mengalami kontraksi pada tiga triwulan pertama. Pemulihan ekonomi yang berlangsung lambat juga berpengaruh pada tingkat

pengangguran di Korea Selatan yang meningkat hingga 3,6 persen per September 2020.

**Jepang** mengalami kontraksi dalam empat triwulan berturut-turut sejak triwulan IV tahun 2019. Pada triwulan III tahun 2020, perekonomian Jepang terkontraksi 5,8 persen (YoY), lebih dalam dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Namun, lebih baik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 10,2 persen (YoY). Permintaan domestik masih lemah, yang terkontraksi 5,5 persen (YoY).

Konsumsi pemerintah Jepang meningkat 2,1 persen (YoY), didorong oleh pemberian subsidi untuk rumah tangga yang terdampak pandemi. Namun, subsidi tersebut belum mampu mendorong konsumsi ke tingkat normal. Meskipun lebih baik dibandingkan triwulan II tahun 2020 (-11,5 persen, YoY), konsumsi rumah tangga masih terkontraksi sebesar 7,2 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020. Konsumsi jasa terkontraksi 9,8 persen (YoY) sementara *durable goods* terkontraksi 13,5 persen (YoY). Investasi swasta juga terkontraksi, baik investasi residen maupun nonresiden, masing-masing sebesar 14,0 dan 10,5 persen (YoY).

Kinerja ekspor Jepang pada triwulan III tahun 2020 masih terkontraksi sebesar 15,7 persen, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (-22,1 persen, YoY). Kontraksi yang terjadi terutama disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor jasa hingga 30,8 persen (YoY), seiring lemahnya aktivitas pariwisata. Sementara, kontraksi impor semakin dalam, terkontraksi dari 3,5 persen (YoY) pada triwulan II menjadi 13,8 persen (YoY), yang disebabkan oleh terkontraksinya impor jasa hingga 16,4 persen (YoY).

Pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada tenaga kerja. Seperti negara lainnya, tingkat pengangguran Jepang per September 2020 meningkat menjadi 3,0 persen, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Terjadi peningkatan sebanyak 420 ribu menjadi 2,1 juta dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Penurunan pekerja terbesar berasal dari sektor jasa akomodasi dan restoran.

**Singapura** kembali menghadapi pertumbuhan negatif untuk ketiga kalinya sepanjang tahun 2020. Namun, kontraksi yang terjadi pada triwulan III tahun 2020 semakin mengecil, yakni sebesar 7,0 persen (YoY). Perbaikan tersebut didorong oleh pembukan kembali aktivitas ekonomi secara bertahap setelah penerapan *Circuit Breaker*[1] pada April hingga Juni 2020.

Sektor manufaktur Singapura tumbuh 2,0 persen (YoY) yang didorong oleh peningkatan output *electronics and precision engineering*. Di sisi lain, sektor konstruksi terkontraksi 44,7 persen

[1] Kebijakan pembatasan aktivitas di Singapura untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

(YoY) sejalan dengan lambatnya pemulihan di sektor konstruksi. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan perusahaan untuk menyusun ulang manajemen kerja yang aman di tengah pandemi sebelum beroperasi kembali.

Sektor jasa terkontraksi 8,0 persen (YoY) seiring dengan lemahnya permintaan wisata dan restriksi perjalanan global. Perdagangan grosir juga masih terkontraksi yang disebabkan lemahnya permintaan eksternal. Sementara itu, sektor retail dan makanan juga masih terkontraksi yang disebabkan oleh pemberlakuan pembatasan kapasitas dan rendahnya kepercayaan konsumen.

***Perekonomian Tiongkok tumbuh 4,9 persen (YoY).***

Di tengah resesi yang melanda berbagai negara, perekonomian Tiongkok kembali tumbuh positif sebesar 4,9 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III tahun 2019 yang sebesar 6,0 persen (YoY).

Kinerja industri di Tiongkok kembali tumbuh. Industri primer meningkat 3,9 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (3,3 persen, YoY). Industri sekunder tumbuh 6,0 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan triwulan II tahun 2020 (4,7 persen, YoY). Industri tersier tumbuh 4,3 persen (YoY), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,9 persen (YoY).

Sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan tumbuh 4,0 persen (YoY). Manufaktur Tiongkok tumbuh 6,1 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor informasi yang naik 18,8 persen (YoY), sementara sektor akomodasi dan restoran masih terkontraksi 5,1 persen (YoY). Aktivitas penyewaan dan jasa bisnis juga terkontraksi 6,9 persen (YoY).

***Berbagai negara menahan tingkat suku bunga.***

Bank sentral Amerika Serikat, The Fed, memutuskan untuk menahan suku bunga sepanjang triwulan III tahun 2020, mengingat suku bunga telah berada pada ambang batas bawah. Suku bunga akan dipertahankan hingga pasar tenaga kerja mencapai level *full employment* dan inflasi telah mencapai 2,00 persen dan stabil dalam beberapa waktu.

Sepanjang triwulan III tahun 2020, bank sentral Korea Selatan menahan suku bunga sebesar 4,00 persen. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan perlunya pengamatan akan dampak dari kebijakan moneter dan fiskal yang telah diambil sejauh ini. Selain itu, inflasi yang stagnan pada nol persen (YoY) juga menjadi pertimbangan.

Bank Negara Malaysia menurunkan suku bunganya sebesar 25 bps pada bulan Juli menjadi sebesar 1,75 persen

untuk mendorong pemulihan ekonomi. Ekonomi Malaysia mulai pulih sejak dibukanya kembali aktivitas perekonomian pada bulan Mei. Namun, kecepatan pemulihannya masih tertekan risiko dari dalam dan luar negeri. Pada bulan Agustus dan September, suku bunga ditahan sejalan dengan pemulihan ekonomi global.

**Tabel 1. Suku Bunga Kebijakan Beberapa Negara**

| | Jul | Agu | Sep |
|---|---|---|---|
| **BRIC** | | | |
| Brazil | 2,25 | 2,00 | 2,00 |
| Rusia | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| India | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tiongkok | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| **ASEAN-5** | | | |
| Indonesia | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Thailand | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Filipina | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Malaysia | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Vietnam | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| **Negara Maju** | | | |
| Amerika Serikat | 0,00-0,25 | 0,00-0,25 | 0,00-0,25 |
| Jepang | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Korea Selatan | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Sumber: Bloomberg, PBoC

Bank sentral Filipina juga menahan tingkat suku bunganya sebesar 2,25 persen, sejalan dengan inflasi yang tetap rendah. Aktivitas ekonomi global dinilai mulai meningkat meskipun masih dibayangi oleh peningkatan kasus Covid-19. Selain itu, perekonomian domestik juga perlahan pulih diduking oleh likuiditas yang cukup dalam sistem keuangan.

Hal serupa dijalankan bank sentral Thailand yang menahan suku bunga di level terendah sebesar 0,5 persen. Bank sentral setempat menyatakan suku bunga tidak akan ditetapkan lebih rendah karena dapat berdampak pada perekonomian dan tabungan. Selain itu, ruang kebijakan yang tersisa dipertahankan sebagai antisipasi jika terjadi kondisi terburuk.

***Harga komoditas internasional masih rendah.***

Harga rata-rata minyak mentah pada triwulan III tahun 2020 turun 29,6 persen (YoY) menjadi USD42,0 per barel. Namun, tingkat harga tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Harga minyak menunjukkan perbaikan pada bulan Juli dan Agustus namun kembali melemah pada bulan September seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan gelombang kedua Covid-19.

**Gambar 2. Perkembangan Harga Minyak Mentah**

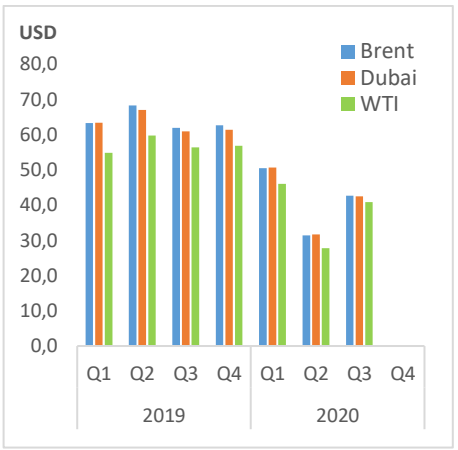


Sumber: World Bank

Harga minyak mentah Brent turun 31,0 persen (YoY) menjadi USD42,7 per barel. Harga minyak mentah WTI juga

turun 27,5 persen (YoY) menjadi USD40,9 per barel. Sementara harga minyak mentah Dubai turun 30,2 persen dibandingkan triwulan III tahun 2019 menjadi sebesar USD42,5 per barel.

**Gambar 3. Perkembangan Harga Gas Alam dan Batu Bara**

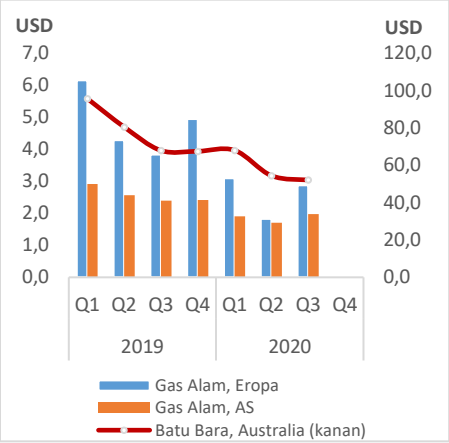


Sumber: World Bank

Aktivitas produksi industri yang belum sepenuhnya pulih berdampak pada turunnya harga batu bara sebesar 23,3 persen (YoY). Harga batu bara acuan pada triwulan III tahun 2020 sebesar USD52,1 per metrik ton, juga lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Harga batu bara turun ke level terendah pada bulan Agustus 2020 yang sebesar USD50,3 per metrik ton sejalan dengan lemahnya permintaan dari Tiongkok dan India. Harga batu bara kembali menguat pada bulan September, didorong oleh fenomena La Nina yang berpotensi mengganggu produksi di daerah tertentu.

Komoditas gas alam Eropa dan Amerika Serikat juga mengalami kontraksi masing-masing 25,0 dan 17,2 persen (YoY) disebabkan oleh permintaan yang belum kembali ke level pra-pandemi. Lemahnya permintaan pada triwulan II tahun 2020 menyebabkan produsen gas memotong produksinya. Hal tersebut kemudian mendorong harga pada triwulan III lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.

***Harga komoditas pertanian meningkat.***

Harga komoditas pertanian secara umum meningkat pada triwulan III tahun 2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Harga minyak kelapa sawit meningkat 31,7 persen (YoY) menjadi USD750,9 per metrik ton, didorong oleh menguatnya permintaan global. Di sisi lain, produksi minyak kelapa sawit dari Malaysia mengalami penurunan seiring dengan pembatasan aktivitas dan pekerja di lapangan yang menyebabkan turunnya produktivitas. Harga komoditas pertanian lainnya seperti gula, kedelai, gandum, dan beras juga mengalami peningkatan.

Pada triwulan III tahun 2020, harga karet meningkat 7,8 persen (YoY) menjadi USD1,7 per kilogram. Naiknya harga karet didorong oleh peningkatan permintaan dunia seiring beroperasinya kembali industri di berbagai negara. Selain itu, produksi karet juga dibayangi La Nina yang diprediksi terjadi pada triwulan terakhir tahun ini.

***Harga komoditas logam masih tertekan.***

Harga nikel turun 8,9 persen (YoY) menjadi USD14.265,8 per metrik ton. Harga komoditas timbal dan alumunium juga turun masing-masing 7,7 dan 3,2 persen (YoY).

Turunnya pasokan timah mendorong timah naik 3,2 persen (YoY) menjadi USD17.690,4 per metrik ton. Pemasok timah terbesar, PT Timah, menurunkan produksinya pada tahun ini. Di sisi lain, permintaan dari Tiongkok kembali meningkat. Pasokan timah global diproyeksi akan mengalami berbagai tekanan sehingga akan semakin menopang harga.

Pergerakan harga emas rata-rata pada triwulan III tahun 2020 meningkat 29,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Harga emas masih meningkat pada bulan Juli dan Agustus, namun pada bulan September harga emas mulai turun. Pertumbuhan kasus Covid-19 yang mulai terkendali secara global memberi tekanan pada nilai emas. Selain itu, optimisme pemilihan presiden Amerika Serikat memberi kekuatan pada dolar AS.

BAB II

# PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

## 2.1 Produk Domestik Bruto

***Perekonomian Indonesia kembali terkontraksi 3,5 persen (YoY).***

**Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

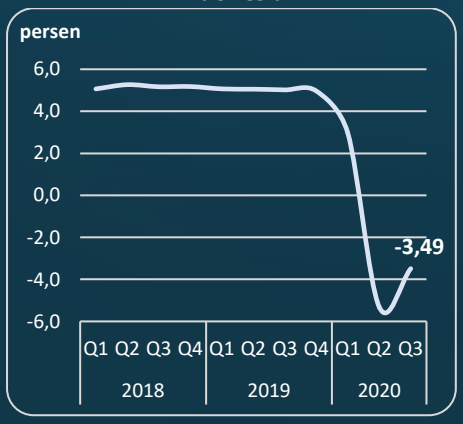


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2020 masih terkontraksi sebesar 3,49 persen (YoY), lebih baik dari triwulan sebelumnya (-5,3 persen, YoY). Lemahnya konsumsi masyarakat masih menjadi penyebab utama terkontraksinya perekonomian. Kinerja impor juga terkontraksi cukup dalam seiring aktivitas domestik yang masih terbatas. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah menjadi bantalan bagi kontraksi ekonomi pada triwulan ini.

Dari 17 sektor, tujuh sektor tumbuh melambat, sementara sektor yang lainnya terkontraksi. Sektor infokom, jasa kesehatan, dan pengadaan air tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2019. Meskipun masih terkontraksi secara umum, namun seluruh sektor mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya.

Seluruh wilayah di Indonesia masih mengalami kontraksi ekonomi dengan kontraksi terdalam terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya aktivitas pariwisata, khususnya kunjungan wisatawan mancanegara. Dua provinsi, yakni Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, tumbuh cukup tinggi pada triwulan III tahun 2020.

**Gambar 5. Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Triwulan III Tahun 2020**

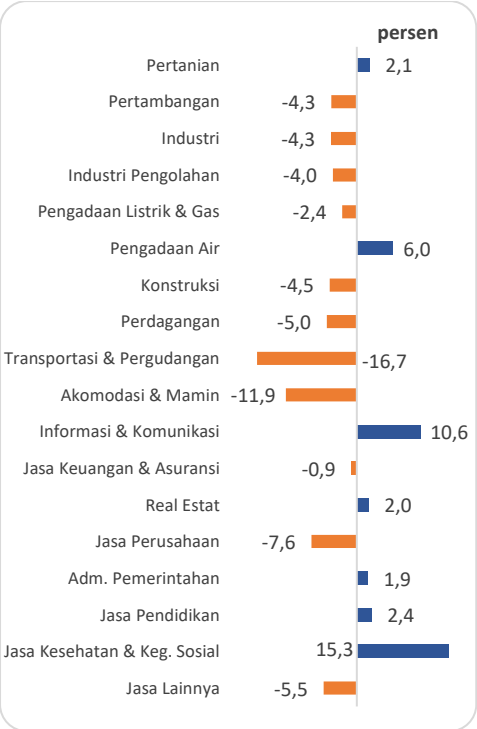


Sumber: Badan Pusat Statistik

***Sektor pertanian tumbuh melambat.***

Sektor pertanian tumbuh 2,15 persen (YoY), melambat baik dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan III tahun 2019. Pertumbuhan pada triwulan III tahun 2020 didorong oleh pertumbuhan subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian. Pertumbuhan tanaman pangan mencapai 7,1 persen (YoY), yang didorong oleh panen raya kedua pada tanaman padi. Tanaman hortikultura juga meningkat 5,6 persen (YoY) sejalan dengan meningkatnya permintaan buah dan sayuran. Sementara itu, peternakan kembali mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen (YoY) yang disebabkan oleh rendahnya permintaan hewan ternak untuk restoran.

Subsektor kehutanan dan penebangan kayu pada triwulan ini terkontraksi 1,6 persen (YoY). Perikanan juga terkontraksi 1,0 persen (YoY), disebabkan oleh terhambatnya produksi ikan budidaya yang terdampak penurunan permintaan dan penyerapan di pasar.

***Industri pengolahan kembali terkontraksi.***

Industri pengolahan terkontraksi 4,3 persen (YoY) yang terjadi pada hampir seluruh subsektor. Industri alat angkutan mengalami penurunan paling dalam sebesar 30,0 persen (YoY). Lemahnya permintaan domestik dan luar negeri menyebabkan pemangkasan produksi mobil dan motor. Sejalan dengan hal tersebut, industri mesin dan perlengkapan juga terkontraksi 10,8 persen (YoY).

Di sisi lain, beberapa industri masih tumbuh positif. Industri kimia, farmasi,

dan obat tradisional tumbuh 15,0 persen (YoY) yang didorong oleh peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin, dan suplemen seiring dengan meningkatnya permintaan produk kesehatan. Industri logam dasar tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2019, yakni sebesar 5,2 persen (YoY). Sementara industri makanan dan minuman tumbuh melambat sebesar 0,7 persen (YoY).

***Pertumbuhan PDB perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor terkontraksi 5,0 persen (YoY).***

**Tabel 2. Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

| Uraian | *Growth* (%) | | *Share* thd Total PDB (%) |
|---|---|---|---|
| | QtQ | YoY | |
| PDB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,7 | -5,0 | 12,8 |
| Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya | 21,8 | -18,1 | 2,2 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Motor | 3,0 | -2,0 | 10,6 |
| Produk Domestik Bruto | -5,1 | -3,5 | 100,0 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Akibat pandemi Covid-19, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan ekonomi memberi tekanan terhadap perekonomian termasuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memiliki peran sebesar 12,9 persen dalam perekonomian. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami kenaikan sebesar 5,7 persen (QtQ) dan penurunan sebesar 5,0 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (YoY). Secara triwulanan, kenaikan pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor didorong oleh pertumbuhan drastis pada subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya sebesar 21,8 persen (QtQ), dan kenaikan pada subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan bukan motor sebesar 3,0 persen (QtQ). Sedangkan dilihat secara tahunan, penurunan pada sektor ini didorong oleh penurunan yang dalam pada subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya dengan penurunan sebesar 18,1 persen (YoY) serta penurunan pada subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan motor sebesar 3,5 persen (YoY).

***Sektor transportasi dan sektor akomodasi terkontraksi paling dalam.***

Restriksi perjalanan internasional yang masih berlangsung menekan aktivitas pariwisata di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari kontraksi yang terjadi pada sektor transportasi dan akomodasi. Meskipun masih terkontraksi, kondisi pada triwulan III lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh wisatawan domestik yang mulai meningkat.

Sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi 16,7 persen (YoY). Angkutan udara masih mengalami penurunan yang paling dalam selama triwulan III tahun 2020, yakni sebesar -63,9 persen (YoY). Angkutan rel terkontraksi 51,1 persen (YoY) disebabkan berjalannya *work from home* dan perubahan preferensi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum sehari-hari selama pandemi. Kinerja yang lebih baik terjadi pada angkutan darat dan angkutan laut yang memperkecil kontraksi masing-masing menjadi 5,0 dan 5,3 persen (YoY) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 17,7 dan 17,3 persen (YoY).

Hal serupa terjadi pada sektor akomodasi dan makan minum yang terkontraksi 11,9 persen (YoY), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (-22,0 persen, YoY). Belum pulihnya kunjungan wisatawan menyebabkan tingkat penyediaan akomodasi terkontraksi 28,0 persen (YoY). Penyediaan makan dan minum juga turun 8,0 persen (YoY).

***Sektor jasa kesehatan, infokom, dan pengadaan air tumbuh lebih tinggi.***

Pada triwulan III tahun 2020, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang sebesar 15,3 persen (YoY) seiring dengan permintaan akan jasa kesehatan yang masih tinggi. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi juga cukup tinggi mencapai 10,6 persen (YoY). Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh 6,0 persen (YoY).

***Pertumbuhan konsumsi pemerintah menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam.***

**Gambar 6. Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran**

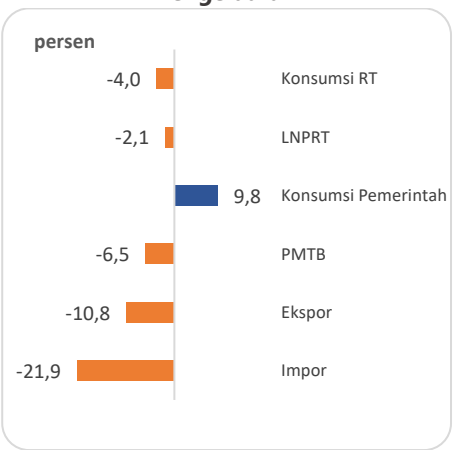


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali konsumsi pemerintah yang tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 4,0 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020, yang disebabkan oleh kontraksi di sebagian besar subkomponen.

Subkomponen transportasi dan komunikasi terkontraksi hingga 11,6 persen (YoY), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 15,3 persen (YoY). Subkomponen restoran dan hotel juga terkontraksi

sebesar 10,9 persen (YoY). Di sisi lain, subkomponen kesehatan dan pendidikan serta subkomponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga tumbuh melambat masing-masing sebesar 2,1 dan 1,8 persen (YoY).

**Gambar 7. Perkembangan Konsumsi RT dan Investasi terhadap PDB**

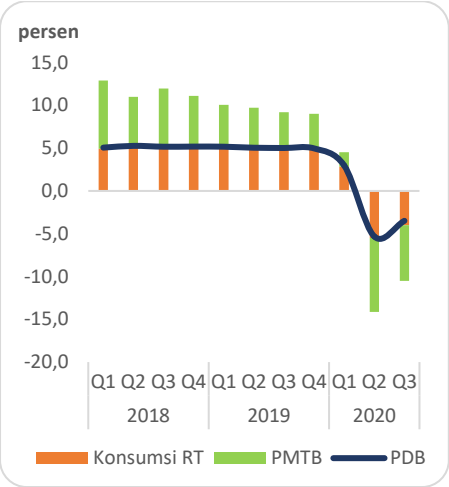


Sumber: Badan Pusat Statistik

***Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkontraksi 6,5 persen (YoY).***

Pada triwulan III tahun 2020, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkontraksi sebesar 6,5 persen (YoY), namun tumbuh positif secara QtQ sebesar 8,45 persen. Pada komponen PMTB, pertumbuhan triwulan III tahun 2020 (YoY) didorong oleh pertumbuhan CBR (*Cultivated Biological Resources*) sebesar 23,1 persen, sedangkan komponen lainnya terkontraksi (YoY) seperti Bangunan (5,6 persen), Kendaraan (14,63 persen), Mesin dan Perlengkapan (21,0 persen), Peralatan lainnya (15,2 persen) dan Produk Kekayaan Intelektual (3,6 persen).

**Tabel 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto**

| Uraian | Nilai* Q3 2020 | *Growth* (%) | | *Share* thd Total PDB (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 858,1 | 8,5 | -6,5 | 31,5 |
| Bangunan | 641,3 | 4,4 | -5,6 | 23,6 |
| Mesin dan Perlengkapan | 83,0 | 7,9 | -21,0 | 3,1 |
| Kendaraan | 41,6 | 33,7 | -14,6 | 1,5 |
| Peralatan lainnya | 12,9 | 26,7 | -15,2 | 0,5 |
| *Cultivated Biological Resources* | 58,2 | 45,6 | 23,1 | 2,1 |
| Produk Kekayaan Intelektual | 21,1 | 12,0 | -3,6 | 0,8 |
| Produk Domestik Bruto | 2720,6 | 5,1 | -3,5 | 100,0 |

Sumber: Badan Pusat Statistik
*dalam triliun Rp (ADHK)

Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 9,8 persen (YoY), didorong oleh peningkatan realisasi pemberian bantuan sosial untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi belanja barang dan jasa juga meningkat terutama pada barang non operasional, khususnya untuk penanganan dampak pandemi. Selain itu, pencairan insentif bagi tenaga kesehatan dan pergeseran pembayaran tunjangan profesi guru mendorong kenaikan belanja pegawai.

Ekspor barang dan jasa terkontraksi 10,8 persen (YoY), sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya (-

11,7 persen, YoY). Ekspor barang migas terkontraksi 12,5 persen (YoY), lebih dalam dari periode yang sama tahun 2019 (-9,0 persen, YoY). Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya permintaan dan turunnya harga. Sementara ekspor nonmigas terkontraksi 4,9 persen (YoY), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7,5 persen (YoY). Ekspor jasa terkontraksi dalam mencapai 51,8 persen (YoY), seiring dengan penurunan jumlah wisatawan mancanegara.

Kinerja impor terkontraksi semakin dalam sebesar 21,9 persen (YoY). Penurunan impor barang nonmigas sebesar 19,1 persen (YoY), diantaranya besi dan baja, kendaraan dan bagiannya, serta benda dari besi dan baja. Kontraksi impor barang migas mengecil menjadi 18,3 persen (YoY) seiring turunnya harga migas. Sementara impor jasa terkontraksi yang disebabkan oleh turunnya jasa angkutan untuk aktivitas perdagangan internasional.

**Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi**

Tahun 2015 – Triwulan III/2020 (persen, YoY)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019:1 | 2019:2 | 2019:3 | 2019:4 | 2020:1 | 2020:2 | 2020:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produk Domestik Bruto** | **4,9** | **5,0** | **5,1** | **5,2** | 5,07 | **5,05** | **5,02** | **4,97** | **2,97** | **-5,32** | **-3,49** |
| Konsumsi Rumah Tangga | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | -5,5 | -4,0 |
| Konsumsi LNPRT | -0,6 | 6,6 | 6,9 | 9,1 | 17,0 | 15,3 | 7,4 | 3,5 | -5,1 | -7,8 | -2,1 |
| Konsumsi Pemerintah | 5,3 | -0,1 | 2,1 | 4,8 | 5,2 | 8,2 | 1,0 | 0,5 | 3,7 | -6,9 | 9,8 |
| PMTB | 5,0 | 4,5 | 6,2 | 6,6 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 1,7 | -8,6 | -6,5 |
| Ekspor Barang dan Jasa | -2,1 | -1,6 | 8,9 | 6,6 | -1,6 | -1,7 | 0,1 | -0,4 | 0,2 | -11,7 | -10,8 |
| Impor Barang dan Jasa | -6,2 | -2,4 | 8,1 | 11,9 | -7,5 | -6,8 | -8,3 | -8,0 | -2,2 | -17,0 | -21,9 |
| Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan | 3,8 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 1,8 | 5,3 | 3,1 | 4,3 | 0,0 | 2,2 | 2,1 |
| Pertambangan dan Penggalian | -3,4 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 2,3 | -0,7 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | -2,7 | -4,3 |
| Industri Pengolahan | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | 2,1 | -6,2 | -4,3 |
| Industri Pengolahan Nonmigas | 5,1 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,0 | 4,7 | 3,9 | 2,0 | -5,7 | -4,0 |
| Listrik dan Gas | 0,9 | 5,4 | 1,5 | 5,5 | 4,1 | 2,2 | 3,7 | 6,0 | 3,9 | -5,5 | -2,4 |
| Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang | 7,1 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 8,9 | 8,3 | 4,9 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 6,0 |
| Konstruksi | 6,4 | 5,2 | 6,8 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 2,9 | -5,4 | -4,5 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 1,6 | -7,6 | -5,0 |
| Transportasi dan Pergudangan | 6,7 | 7,4 | 8,5 | 7,1 | 5,5 | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 1,3 | -30,8 | -16,7 |
| Akomodasi dan Makan Minum | 4,3 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 6,4 | 1,9 | -22,0 | -11,9 |
| Informasi dan Komunikasi | 9,7 | 8,9 | 9,6 | 7,0 | 9,1 | 9,6 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 10,8 | 10,6 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 8,6 | 8,9 | 5,5 | 4,2 | 7,2 | 4,5 | 6,1 | 8,5 | 10,6 | 1,1 | -0,9 |
| Real Estate | 4,1 | 4,7 | 3,6 | 3,5 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 5,9 | 3,8 | 2,3 | 2,0 |
| Jasa Perusahaan | 7,7 | 7,4 | 8,4 | 8,6 | 10,4 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 5,4 | -12,1 | -7,6 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,6 | 3,2 | 2,0 | 7,0 | 6,4 | 8,9 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | -3,2 | 1,9 |
| Jasa Pendidikan | 7,3 | 3,8 | 3,7 | 5,4 | 5,6 | 6,3 | 7,8 | 5,5 | 5,9 | 1,2 | 2,4 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,7 | 5,2 | 6,8 | 7,2 | 8,6 | 9,1 | 9,2 | 7,8 | 10,4 | 3,7 | 15,3 |
| Jasa lainnya | 8,1 | 8,0 | 8,7 | 9,0 | 10,0 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 7,1 | -12,6 | -5,5 |
| PDB Harga Berlaku (Rp Triliun) | 11.526 | 12.402 | 13.590 | 14.838 | 3.783 | 3.963 | 4.067 | 4.018 | 3.922 | 3.687 | 3.894 |
| PDB Harga Konstan (Rp Triliun) | 8.983 | 9.434 | 9.913 | 10.425 | 2.625 | 2.735 | 2.819 | 2.770 | 2.703 | 2.590 | 2721 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

## Investasi

***Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp106,1 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp102,8 triliun.***

Total nilai realisasi PMA dan PMDN triwulan III tahun 2020 mencapai Rp209 triliun, atau naik sebesar 8,9 persen dari triwulan II tahun 2020. Nilai realisasi PMA naik sebesar 1,1 persen (YoY) dan 8,7 persen (QtQ), sedangkan nilai realisasi PMDN juga mengalami kenaikan sebesar 2,1 persen (YoY) dan 9,1 persen (QtQ).

**Tabel 5. Realisasi Investasi**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (triliun Rp) | *Growth* (%) | | *Share* thd Realisasi Investasi (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Realisasi Investasi | 209,0 | 8,9 | 1,6 | 100,0 |
| Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | 102,8 | 9,1 | 2,1 | 49,2 |
| Penanaman Modal Asing (PMA)* | 106,1 | 8,7 | 1,1 | 50,8 |
| Berdasarkan Sektor | | | | |
| Primer | 18,8 | -11,8 | -40,9 | 9,0 |
| Sekunder | 72,3 | 10,3 | 69,3 | 34,6 |
| Tersier | 117,8 | 12,2 | -10,1 | 56,4 |

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

*kurs: Rp14.400/USD

Sektor yang berperan besar terhadap realisasi PMA dan PMDN pada triwulan III tahun 2020 adalah sektor tersier sebesar 117,8 persen. Namun sektor tersier mengalami penurunan secara YoY karena penurunan realisasi PMA. Sektor primer mengalami penurunan realiasi PMA dan PMDN secara QtQ maupun YoY karena penurunan realisasi PMDN.

***Realisasi investasi terbesar pada sektor sekunder triwulan III tahun 2020 adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.***

Berdasarkan sektor/bidang usaha, realisasi investasi terbesar triwulan III 2020 di sektor sekunder adalah: (1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; (2) Industri Kimia dan Farmasi; (3) Industri Makanan; (4) Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam; dan (5) Industri Kendaraan Bermotor dan Peralatan Transportasi Lainnya. Sektor sekunder yang mengalami pertumbuhan terbesar dibandingkan periode yang sama tahun lalu adalah Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam (296,2 persen, YoY), sedangkan pertumbuhan terbesar dibandingkan triwulan sebelumnya adalah Industri Kayu (295,5 persen, QtQ). Industri Kertas dan Printing mengalami pertumbuhan negatif secara YoY akibat penurunan realisasi baik PMA maupun PMDN, sedangkan Industri Makanan mengalami pertumbuhan negatif secara QtQ akibat penurunan realisasi PMA dan PMDN.

**Tabel 6. Realisasi Investasi Sektor Sekunder**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (triliun Rp) | *Growth* (%) | | *Share* thd Sektor Sekunder (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Industri Makanan | 10,9 | -39,5 | 13,9 | 15,1 |
| Industri Tekstil | 1,8 | -0,4 | 99,9 | 2,4 |
| Industri Barang Kulit dan Industri Alas Kaki | 1,3 | 83,4 | 91,8 | 1,8 |
| Industri Kayu | 1,2 | 295,5 | 140,4 | 1,6 |
| Industri Kertas dan Printing | 2,3 | -17,3 | -58,8 | 3,2 |
| Industri Kimia dan Farmasi | 16,1 | 66,2 | 134,8 | 22,3 |
| Industri Karet dan Plastik | 2,6 | 43,0 | 38,0 | 3,6 |
| Industri Mineral Non Metal | 2,5 | 34,0 | 39,3 | 3,4 |
| Industri Kendaraan Bermotor dan Peralatan Transportasi Lainnya | 2,9 | -26,3 | 87,7 | 4,0 |
| Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 24,6 | 18,8 | 127,4 | 34,0 |
| Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam | 4,4 | 173,6 | 296,2 | 6,1 |
| Industri Lainnya | 1,9 | -22,9 | 18,5 | 2,7 |

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

***Realisasi PMA terbesar adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.***

Berdasarkan sektor/bidang usaha, lima sektor dengan kontribusi terbesar pada realisasi PMA pada triwulan III tahun 2020 adalah: (1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; (2) Transportasi, Gudang dan Komunikasi; (3) Listrik, Gas dan Air; (4) Real Estate, Industri Estate dan Kegiatan Bisnis; dan (5) Industri Kimia dan Farmasi. Pertumbuhan YoY terbesar pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, sedangkan pertumbuhan terbesar QtQ adalah Industri Kimia dan Farmasi.

**Tabel 7. Sektor PMA Terbesar**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (triliun Rp) | *Growth* (%) | | *Share* thd Total PMA (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 23,5 | 23,0 | 166,7 | 22,1 |
| Transportasi, Gudang dan Komunikasi | 14,3 | 53,4 | -48,2 | 13,5 |
| Listrik, Gas dan Air | 13,2 | -37,4 | -43,4 | 12,4 |
| Real Estate, Industri Estate dan Kegiatan Bisnis | 8,7 | 14,9 | -14,9 | 8,2 |
| Industri Kimia dan Farmasi | 8,6 | 71,8 | 81,1 | 8,1 |

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

***Singapura menjadi negara asal PMA terbesar.***

**Tabel 8. Realisasi PMA Terbesar Berdasarkan Negara Asal**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (triliun Rp) | *Growth* (%) | | *Share* thd Total PMA (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Singapura | 35,9 | 27,7 | 22,7 | 33,8 |
| Tiongkok | 15,6 | -5,1 | 1,6 | 14,7 |
| Jepang | 13,3 | 51,3 | 0,3 | 12,5 |
| Hong Kong | 9,8 | -41,3 | 51,1 | 9,3 |
| Belanda | 7,5 | 69,4 | -63,4 | 7,0 |

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Lima negara asal PMA dengan realisasi terbesar pada triwulan III tahun 2020

adalah: Singapura sebesar Rp35,9 triliun; Tiongkok sebesar Rp15,6 triliun; Jepang sebesar Rp13,3 triliun; Hong Kong sebesar Rp9,8 triliun dan Belanda sebesar Rp7,5 triliun.

***Realisasi investasi terbesar berada di luar Jawa.***

Realisasi investasi di luar Jawa pada triwulan III tahun 2020 memberikan kontribusi lebih besar yaitu sebesar 52,8 persen dari total realisasi investasi, dengan nilai sebesar Rp110,4 triliun. Pertumbuhan realisasi investasi terbesar secara tahunan dan triwulanan adalah Maluku dengan nilai investasi sebesar Rp13,2 triliun. Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang terdiri dari wilayah Jawa dan Sumatera berkontribusi realisasi investasi sebesar 69,6 persen. Proporsi realisasi investasi di pulau Jawa pada triwulan III tahun 2020 adalah sebesar 47,2 persen.

**Tabel 9. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (triliun Rp) | *Growth* (%) | | *Share* thd Realisasi Investasi (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Jawa | 98,6 | -2,0 | -9,4 | 47,2 |
| Luar Jawa | 110,4 | 20,8 | 20,3 | 52,8 |
| Sumatera | 46,8 | 13,7 | 28,9 | 22,4 |
| Kalimantan | 18,3 | -5,7 | -12,5 | 8,8 |
| Bali dan Nusra | 9,9 | 105,8 | 53,2 | 4,8 |
| Sulawesi | 19,1 | -10,0 | 8,4 | 9,1 |
| Maluku | 13,2 | 276,1 | 193,2 | 6,3 |
| Papua | 3,1 | 149,4 | -48,2 | 1,5 |
| Kawasan Barat Indonesia | 145,4 | 2,6 | 0,2 | 69,6 |
| Kawasan Timur Indonesia | 63,6 | 26,7 | 14,7 | 30,4 |

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

***Realisasi PMA terbesar berada di Provinsi Jawa Barat.***

Berdasarkan lokasi, lima provinsi dengan realisasi PMA terbesar pada triwulan III tahun 2020 adalah Jawa Barat sebesar Rp18,3 triliun; DKI Jakarta sebesar Rp13,4 triliun; Maluku Utara sebesar Rp10,9 triliun; Banten sebesar Rp9,2 triliun; dan Kepulauan Riau sebesar Rp7,3 trliun.

**Tabel 10. Lokasi PMA Terbesar**

| Uraian | Nilai Q2 2020 (triliun Rp) | *Growth* (%) | | *Share* thd Total PMA (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Jawa Barat | 18,3 | -6,1 | 0,6 | 17,2 |
| DKI Jakarta | 13,4 | 10,2 | -48,6 | 12,7 |
| Maluku Utara | 10,9 | 235,6 | 206,5 | 10,3 |
| Banten | 9,2 | 55,7 | 65,9 | 8,7 |
| Kepulauan Riau | 7,3 | 37,8 | 688,4 | 6,9 |

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

***Realisasi PMDN terbesar berada di Provinsi Banten sementara sektor terbesar adalah konstruksi.***

Berdasarkan lokasi, lima provinsi dengan realisasi PMDN terbesar pada triwulan III tahun 2020 adalah Banten sebesar Rp12,3 triliun; Riau sebesar Rp12,0 triliun; Jawa Barat sebesar Rp10,1 triliun; Kalimantan Timur sebesar Rp9,1 triliun; dan Jawa Timur sebesar Rp9,0 triliun.

Berdasarkan sektor/bidang usaha, lima sektor dengan kontribusi terbesar pada realisasi PMDN triwulan II tahun 2020 adalah: (1) Konstruksi; (2) Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; (3) Real Estate, Industri Estate dan Kegiatan Bisnis; (4)

Listrik, Gas dan Air; dan (5) Industri Kimia dan Farmasi. Pertumbuhan tahunan terbesar adalah Industri Kimia dan Farmasi, sedangkan pertumbuhan triwulanan terbesar adalah Konstruksi.

**Tabel 11. Sektor dan Lokasi PMDN Terbesar**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (triliun Rp) | *Growth* (%) | | *Share* thd Total PMDN(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| **SEKTOR** | | | | |
| Konstruksi | 23,0 | 94,4 | 46,0 | 22,4 |
| Transportasi, Gudang dan Komunikasi | 17,7 | 0,1 | 52,4 | 17,2 |
| Real Estate, Industri Estate dan Kegiatan Bisnis | 12,6 | 66,2 | 104,3 | 12,3 |
| Listrik, Gas dan Air | 11,3 | 19,7 | -28,7 | 10,9 |
| Industri Kimia dan Farmasi | 7,5 | 60,2 | 254,4 | 7,3 |
| **LOKASI** | | | | |
| Banten | 12,3 | 59,2 | 238,6 | 12,0 |
| Riau | 12,0 | 67,7 | 215,7 | 11,7 |
| Jawa Barat | 10,1 | 18,9 | -33,2 | 9,9 |
| Kalimantan Timur | 9,1 | 54,4 | 100,6 | 8,8 |
| Jawa Timur | 9,0 | -24,6 | -27,4 | 8,7 |

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

***Penyerapan Tenaga Kerja PMDN mencapai 152,5 ribu orang sedangkan penyerapan tenaga kerja PMA mencapai 117,8 ribu orang.***

Penyerapan Tenaga Kerja proyek PMDN pada triwulan III tahun 2020 sebesar 51,6 persen dari total penyerapan tenaga kerja, sedangkan penyerapan tenaga kerja PMA sebesar 48,4 persen. Total penyerapan tenaga kerja sebesar 295,4 ribu orang.

**Tabel 12. Penyerapan Tenaga Kerja**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (orang) | *Growth* (%) | | *Share* thd Total Penyerapan TK (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Penyerapan Tenaga Kerja PMDN | 152.457 | 4,9 | 39,3 | 51,6 |
| Penyerapan Tenaga Kerja PMA | 142.930 | 21,3 | 38,6 | 48,4 |
| Total Penyerapan Tenaga Kerja | 295.387 | 12,3 | 39,0 | 100,0 |

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

## Industri

Kinerja sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan III tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,0 persen (YoY). Kinerja pada triwulan III tahun 2020 tersebut mengalami perbaikan dibanding dengan triwulan II tahun 2020 yang terkontraksi 5,7 persen (YoY).

**Gambar 8. Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas**

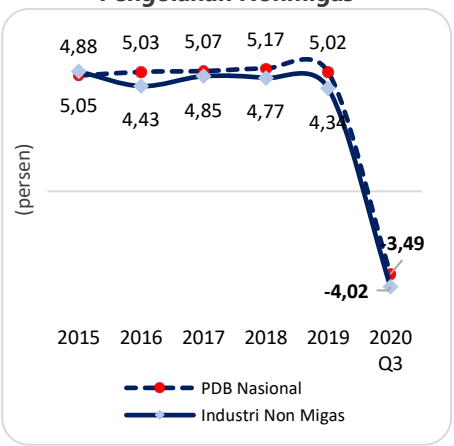


Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai tambah sektor industri pengolahan pada triwulan III tahun 2020 mencapai Rp773,6 triliun, atau berkontribusi sebesar 19,86 persen dari PDB nasional. Industri pengolahan nonmigas menyumbang sebesar 90,1 persen dari PDB industri pengolahan dan mencapai 17,9 persen dari PDB nasional.

**Gambar 9. Pertumbuhan Subsektor Industri Pengolahan Nonmigas**

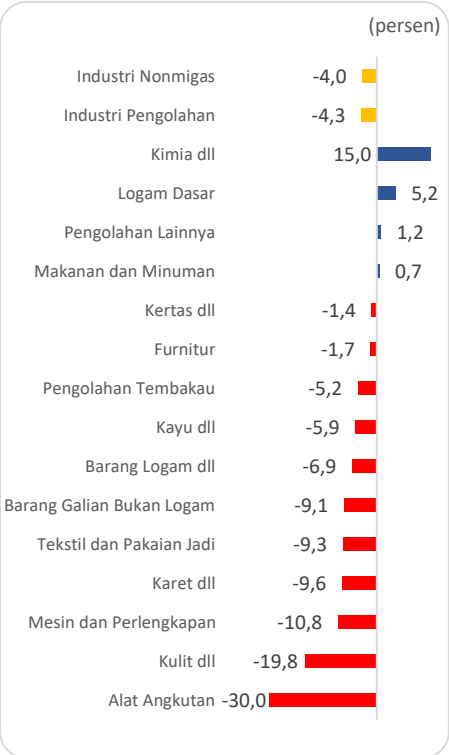


Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan subsektor industri, hanya empat subsektor industri pengolahan nonmigas yang memiliki pertumbuhan positif pada triwulan III tahun 2020, yaitu industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (15,0 persen, YoY), industri logam dasar (5,2 persen, YoY), industri pengolahan lainnya (1,2 persen, YoY) dan industri makanan dan minuman (0,7 persen, YoY).

Pertumbuhan subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional didukung oleh peningkatan produksi obat-obatan, multivitamin, dan suplemen untuk dapat memenuhi kebutuhan domestik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pertumbuhan subsektor industri logam dasar didukung oleh peningkatan pasar ekspor terutama ke Tiongkok, Jepang, dan India. Subsektor industri makanan dan minuman tumbuh terbatas akibat terkendala daya beli masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih, serta adanya kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB). Subsektor industri pengolahan nonmigas lainnya mengalami kontraksi.

Subsektor industri alat angkut, industri kulit dan barang dari kulit, industri mesin dan perlengkapan, serta industri karet dan barang dari karet merupakan industri yang mengalami penurunan terbesar, masing-masing sebesar -30,0; -19,8; -10,8; dan -9,6 persen (YoY).

Kontraksi pada subsektor industri alat angkutan disebabkan oleh penurunan produksi mobil dan sepeda motor sebagai akibat dari belum pulihnya permintaan domestik dan luar negeri. Penurunan kinerja di subsektor industri karet, barang dari karet disebabkan oleh penurunan

permintaan ban sebagai dampak dari penurunan kebutuhan pasokan pada industri alat angkut. Selanjutnya, industri tekstil dan produk tekstil masih mengalami tekanan dari permintaan domestik dan luar negeri, serta utilisasi produksi yang menurun.

**Gambar 10. Ekspor Produk Industri**

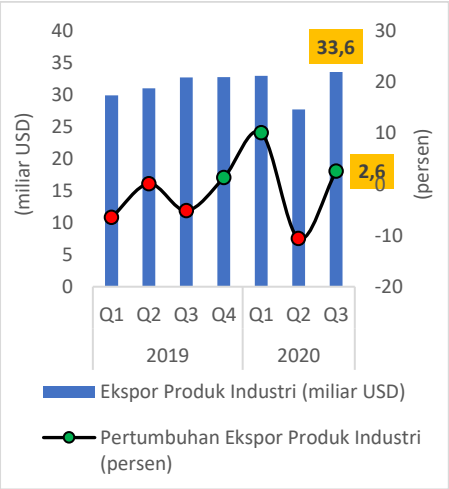


Sumber: Badan Pusat Statistik

Ekspor produk industri pengolahan pada triwulan III tahun 2020 mengalami perbaikan, yaitu mencapai nilai sebesar USD33,6 miliar, atau meningkat sebesar 2,6 persen (YoY). Perbaikan ekspor tersebut didorong oleh peningkatan ekspor besi dan baja pada triwulan III tahun 2020 yang mencapai 34,3 persen (YoY). Kontribusi ekspor produksi industri pada triwulan III sebesar 82,4 persen terhadap total ekspor.

Perbaikan ekspor ini dapat dikaitkan dengan penerapan kebijakan relaksasi persyaratan ekspor. Realisasi dari kemudahan prosedur tersebut perlu dipercepat untuk memanfaatkan peluang ekspor produk industri ke negara-negara yang diproyeksikan akan pulih lebih cepat, seperti Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah juga mengoptimalkan kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral yang sedang dan akan berlangsung (seperti EU-CEPA, IEU-CEPA, RCEP, dan lain-lain).

**Gambar 11. PMDN Sektor Industri**

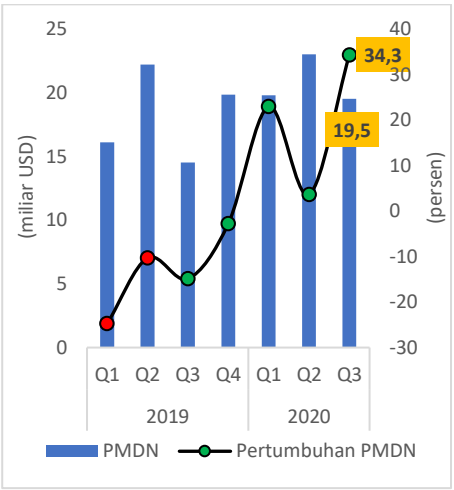


Sumber: BKPM

Pada triwulan III tahun 2020, realisasi PMDN sektor manufaktur mencapai Rp19.517,6 miliar, atau tumbuh sebesar 34,3 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2019. Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 yang hanya tumbuh sebesar 3,6 persen (YoY). Kontribusi PMDN sektor manufaktur terhadap total PMDN adalah sebesar 19,0 persen. Seiring dengan upaya penanganan pandemic Covid-19, PMDN sektor manufaktur terbesar adalah subsektor industri kimia dan farmasi sebesar Rp7.532,0 miliar.

PMDN dengan nilai cukup besar juga tercatat pada industri makanan sebesar Rp5.934,3 miliar, industri mineral nonlogam sebesar Rp1.547,2 miliar, dan industri logam dasar sebesar Rp1.078,4 miliar.

Pertumbuhan PMDN tertinggi (YoY) terdapat pada subsektor industri tekstil (571,5 persen), industri kimia dan farmasi (254,4 persen) persen, serta industri kulit dan barang dari kulit sebesar 147,6 persen.

**Gambar 12. PMA Sektor Industri**

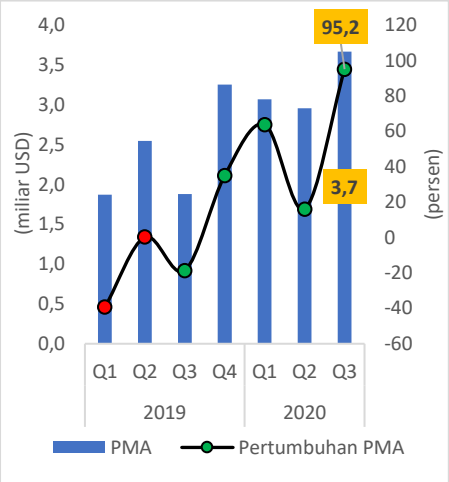


Sumber: BKPM

Perbaikan juga terjadi pada realisasi PMA di sektor industri pengolahan. Pada triwulan II tahun 2020, realisasi PMA di sektor industri pengolahan mencapai USD3,7 miliar, atau meningkat sebesar 95,2 persen *(YoY)*. Kontribusi PMA sektor industri terhadap total PMA sebesar 49,8 persen. Nilai PMA di sektor industri pengolahan terbesar terdapat pada subsektor industri logam dasar dan barang dari logam yaitu USD1,6 miliar, industri kimia dan farmasi sebesar USD595,4 juta, dan industri makanan sebesar USD344,9 juta.

Realisasi investasi PMDN dan PMA menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan optimisme atas proyeksi pemulihan kondisi ekonomi Indonesia, serta komitmen pemerintah dalam menjaga arus investasi pada masa Covid-19, antara lain melalui fasilitasi investasi, serta penyelesaian permasalahan operasional pada proyek-proyek investasi asing besar yang tertunda.

**Gambar 13. Produksi Mobil**

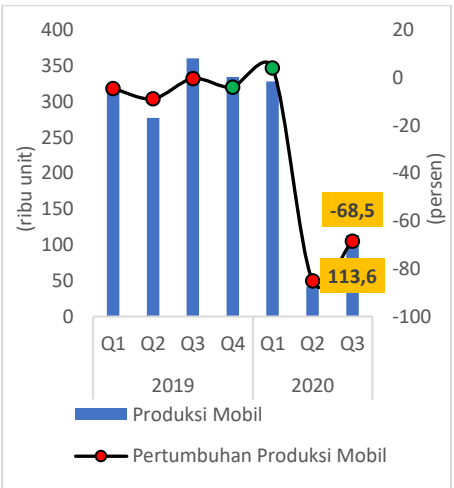


Sumber: CEIC

Kinerja industri alat angkutan selama masa Covid-19 mengalami tekanan yang cukup besar. Produksi industri otomotif berkurang drastis, bahkan Sebagian produsen tidak berproduksi dan hanya mengandalkan penjualan

stok yang ada. Hal ini merupakan respon dari kelesuan pasar domestik dalam konsumsi barang-barang kebutuhan tersier (*durable goods)*, termasuk otomotif.

Produksi mobil pada triwulan III tahun 2020 sebesar 113.563 unit, atau meningkat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 sebanyak 41.520 unit. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produk mobil masih menurun signifikan sebesar 68,5 persen (YoY). Penurunan ini terjadi pada seluruh segmen mobil, dengan penurunan terbesar terjadi pada segmen truk dengan kapasitas lebih dari 24 ton (-91,9 persen), *commercial* bus (-80,6 persen), segmen mobil Multi *Purpose Vehicles (MPV)* dengan kapasitas 1500-2000 cc (-77,4 persen), dan mobil sport dengan kapasitas 1500-3000 cc (-76,0 persen).

**Gambar 14. Penjualan Mobil**

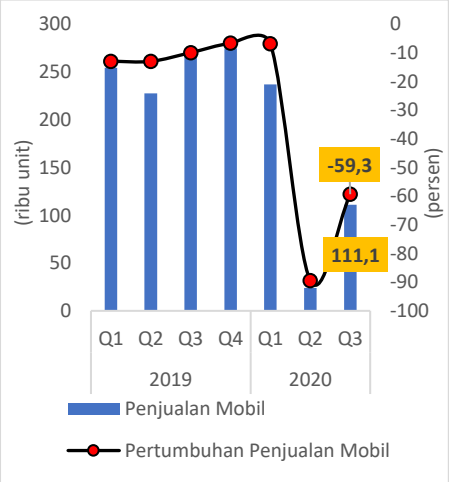


Sumber: CEIC

Data penjualan mobil merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi daya beli masyarakat kelas menengah. Pada triwulan III tahun 2020, penjualan mobil mencapai 111.114 unit, atau meningkat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 sebanyak 24.042 unit. Namun, penjualan mobil tersebut menurun sebesar -89,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan penjualan mobil terbesar terjadi pada segmen truk dengan kapasitas lebih dari 24 ton (-73,8 persen), dan truk dengan kapasitas 5-24 ton (-58,8 persen), segmen bus dengan kapasitas 5-24 ton (-62,2 persen), serta segmen mobil *MPV* dengan kapasitas kurang dari 1500 cc (-66,1 persen).

Penurunan penjualan pada segmen truk dan bus disebabkan oleh sektor-sektor produktif yang belum pulih. Penurunan pada segmen mobil penumpang disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat *(disposable income)* akibat pelemahan ekonomi nasional secara keseluruhan akibat pandemi Covid-19.

Data penjualan motor merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Pada triwulan III tahun 2020, penjualan motor mencapai 990.025 unit atau meningkat signifikan dibandingkan

dengan triwulan II tahun 2020 sebanyak 313.625 unit. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, penjualan motor tersebut menurun sebesar 41,5 persen.

Stimulus ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memulihkan daya beli masyarakat untuk belanja barang-barang kebutuhan tersier, termasuk mobil dan motor. Ekspektasi bisnis, penjualan mobil dan motor juga akan meningkat seiring dengan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi secara lebih masif.

**Gambar 15. Penjualan Motor**

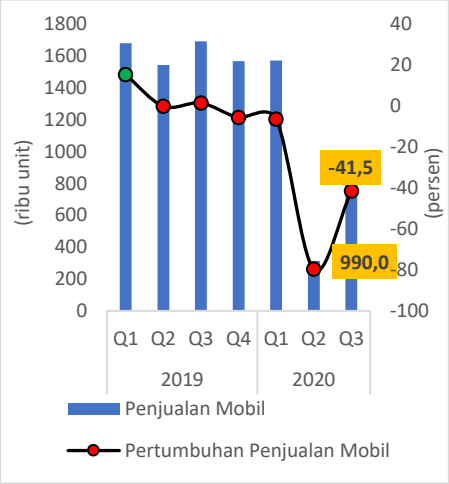


Sumber: CEIC

Penurunan aktivitas industri juga dikonfirmasi dari sektor konstruksi, khususnya pada konsumsi semen. Pada triwulan III tahun 2020, sektor konstruksi mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen (YoY). Hal ini seiring dengan, penjualan domestik semen pada triwulan III tahun 2020 hanya sebesar 17,3 juta ton, atau menurun sebesar 10,5 persen (YoY). Penurunan ini berkaitan dengan penundaan beberapa proyek konstruksi pemerintah dan swasta.

**Gambar 16. Penjualan Domestik Semen**

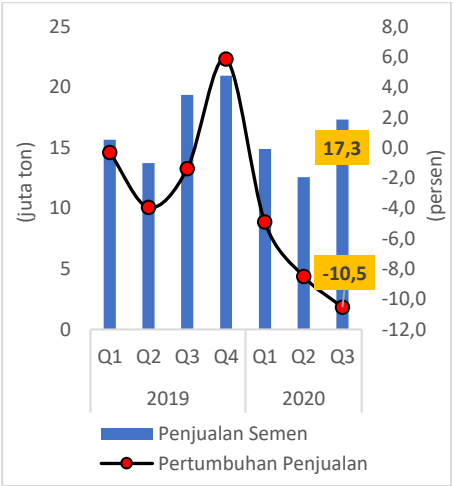


Sumber: CEIC

Prospek pemulihan industri pengolahan ke depan menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat pada perbaikan Nilai *Purchasing Manager Index* (PMI) Indonesia pada bulan Oktober pada level 47,8 dibandingkan dengan bulan September pada level 47,2. Volume produksi mengalami kontraksi, namun tingkat penurunan mulai berkurang pada bulan Oktober 2020. Perkembangan nilai PMI ini menunjukkan perbaikan ekspektasi pelaku usaha yang utamanya berharap bahwa kondisi ekonomi akan berangsur menuju perbaikan, yang diikuti dengan kemajuan penanganan pandemi di tingkat global dan keberhasilan penemuan vaksin. Namun, aspek-aspek PMI yang tetap

perlu diperhatikan adalah penyerapan tenaga kerja, rantai pasok yang diperkirakan belum dapat pulih dalam waktu singkat, serta adanya kenaikan terhadap harga input.

**Gambar 17. Purchasing Manufacturing Index**

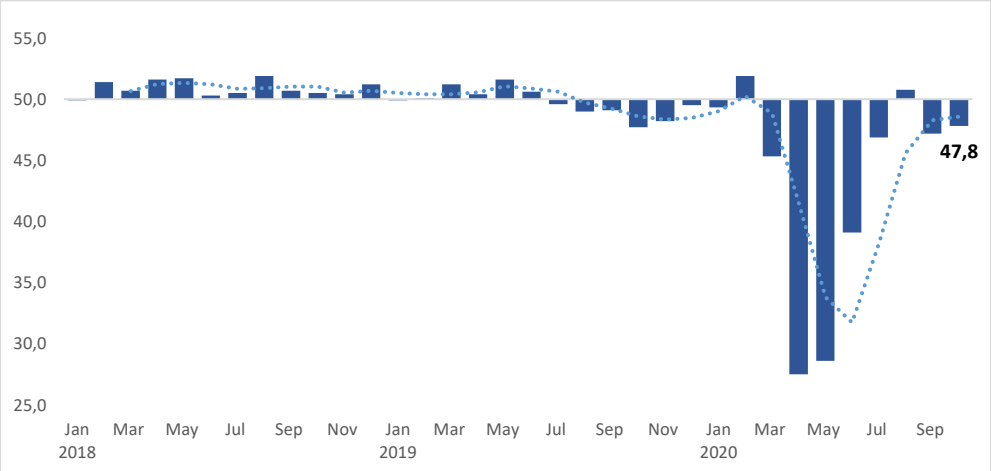


Sumber: CEIC

Terlepas dari tren kinerja sektor industri pengolahan, prospek pemulihan industri pengolahan tetap positif. Nilai *Purchasing Manager Index* (PMI) Indonesia yang jatuh pada level 27,5 pada bulan April 2020, secara bertahap telah meningkat menjadi 39,1 pada bulan Juni 2020 dan 46,9 pada bulan Juli 2020. Perkembangan nilai PMI ini menunjukkan perbaikan ekspektasi pelaku usaha terhadap peluang meningkatkan aktivitas industri pengolahan, seiring dengan pelonggaran PSBB di beberapa provinsi yang menjadi basis sektor industri pengolahan nasional. Namun, aspek PMI yang tetap perlu diperhatikan adalah prospek ekspor dan penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan belum pulih dalam waktu singkat.

## Pariwisata

**Gambar 18. Kunjungan Wisman dan Nilai Ekspor Jasa Perjalanan**

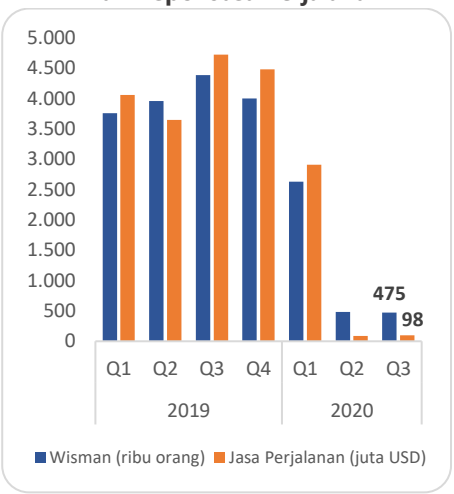


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada triwulan III 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hanya mencapai 475 ribu orang. Kunjungan wisman pada triwulan III tahun 2020

sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,2 persen (QtQ). Jumlah kunjungan wisman tersebut juga mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 86 persen (YoY). Stagnasi kunjungan wisman sepanjang dua triwulan terakhir dipengaruhi pandemi Covid-19 di Indonesia dan gelombang penularan baru di negara-negara sumber wisman utama Indonesia.

Penurunan jumlah kunjungan wisman juga menyebabkan penurunan nilai ekspor jasa perjalanan (devisa) pada triwulan III tahun 2020. Nilai devisa pariwisata pada triwulan III tahun 2020 turun 98 persen (YoY), namun membaik dari triwulan sebelumnya sebesar 10,6 persen (QtQ). Kondisi ini menyebabkan rata-rata pengeluaran wisman (orang) per kunjungan pada periode ini hanya sebesar USD206, atau jauh lebih rendah dari rata-rata periode sebelumnya yaitu USD1.076.

Beberapa negara sumber wisman utama sudah mulai melakukan pelonggaran pembatasan penerbangan baik dari dan menuju Indonesia. Kebijakan tersebut cukup mendorong kenaikan kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu udara. Pada triwulan III tahun 2020, jumlah kedatangan wisman melalui pintu udara mencapai 19.655 orang atau meningkat 6 kali lipat dibandingkan triwulan sebelumnya (QtQ) yang hanya sebesar 2.704 orang. Namun volume tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, atau turun sebesar 99,3 persen (YoY).

**Tabel 13. Kunjungan Wisman berdasarkan Pintu Masuk dan Negara Asal**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (orang) | *Growth* (%) | | *Share* thd Total Wisman (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| **Pintu Masuk** | | | | |
| **Pintu Udara** | **19.655** | **627** | **-99,3** | **4,14** |
| Ngurah Rai | 36 | -89 | -100 | 0,01 |
| Soekarno Hatta | 7.588 | 341 | -99 | 1,60 |
| **Pintu Laut** | **148.888** | **3,6** | **-85,2** | **31,37** |
| Batam | 5.102 | 74 | -99 | 1,07 |
| **Pintu Darat** | **306.079** | **-8,8** | **-41,9** | **64,49** |
| **Negara Asal** | | | | |
| Malaysia | 170.115 | -10 | -76 | 35,8 |
| Tiongkok | 13.293 | 141 | -98 | 2,8 |
| Singapore | 3.939 | -13 | -99 | 0,8 |
| Australia | 610 | 60 | -100 | 0,1 |
| Timor Leste | 249.318 | 1 | -19 | 52,5 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Malaysia dan Timor Leste sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia masih berkontribusi paling besar untuk kunjungan wisman pada triwulan III tahun2020 yaitu sebesar 89 persen dari seluruh kunjungan wisman pada triwulan ini.

Aktivitas bepergian di tingkat nasional juga terdampak pandemi Covid-19, serta PSBB di beberapa wilayah Indonesia. Pada triwulan III tahun 2020, pemerintah mulai melonggarkan kebijakan PSBB di sebagian wilayah. Hal ini berdampak positif bagi sektor pariwisata di Indonesia.

**Gambar 19. Jumlah Penumpang Transportasi Nasional**

**(a) Kereta Api**

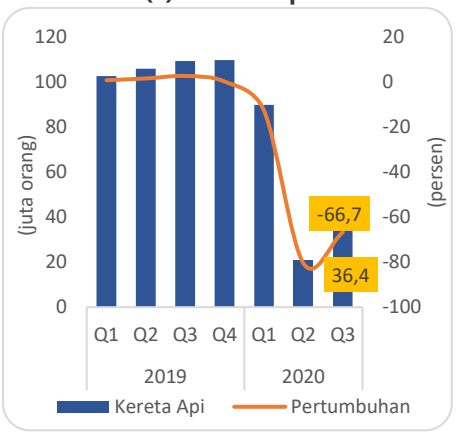


**(b) Pesawat Domestik**

**(c) Angkutan Laut**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Reaktivasi wisatawan nusantara menjadi strategi kebijakan jangka pendek untuk menyelamatkan industri pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan seperti penyelenggaraan rapat-rapat di luar daerah (khususnya di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas), pemberlakuan cuti bersama pada bulan Agustus sebagai pengganti libur Hari Raya Idul Fitri, serta memberikan potongan harga tiket pesawat dan kereta menjadi Langkah yang dapat menggerakkan kembali aktivitas wisatawan nusantara.

Kebijakan tersebut cukup efektif yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah penumpang pesawat, kereta, dan kapal laut pada triwulan III tahun 2020. Secara keseluruhan, jumlah penumpang transportasi nasional pada triwulan III tahun 2020 sebesar 44,7 juta orang, meningkat 21 juta orang dibandingkan triwulan sebelumnya.

Peningkatan aktivitas bepergian dalam negeri juga mendorong pemulihan industri pariwisata khususnya perhotelan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel berbintang di Indonesia pada triwulan III tahun 2020 sebesar 31 persen (YoY) atau meningkat 15,4 poin dari triwulan sebelumnya (QtQ), meskipun masih lebih rendah 23,8 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya (YoY). Peningkatan TPK pada hotel berbintang ini (QtQ) tidak disertai dengan peningkatan *length of stay* (LOS) atau lama tinggal dari

wisatawan. Lama tinggal wisatawan menurun, dari 1,8 hari pada triwulan II 2020, menjadi 1,7 hari pada triwulan III 2020. Kondisi ini menunjukkan pola berwisata yang terbatas, baik dikaitkan dengan pekerjaan atau urusan keluarga.

Peningkatan TPK Hotel Berbintang juga terlihat pada 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni pada Danau Toba (Sumut), Lombok (NTB), Labuan Bajo (NTT), Manado-Likupang (Sulut), Borobudur-Yogyakarta (DIY), serta pada dua daerah dengan penyediaan sektor akomodasi terbesar yakni pada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali. Secara rata-rata, terjadi peningkatan TPK Hotel berbintang di tujuh daerah tersebut yakni meningkat sebesar 14,9 poin pada triwulan III tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

**Gambar 20. Tingkat Penghunian Kamar di Beberapa Provinsi**

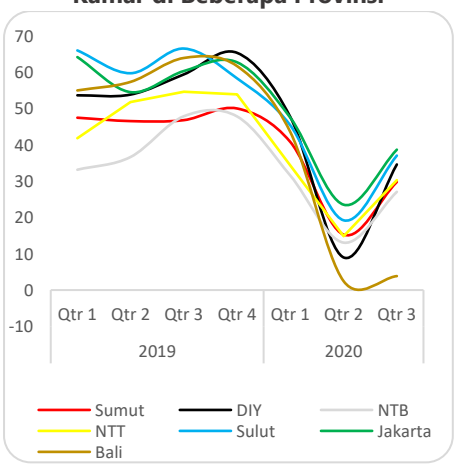


Sumber: Badan Pusat Statistik

Sebagai catatan, peningkatan TPK di Provinsi Bali pada triwulan III tahun 2020 tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan destinasi lainnya. Provinsi Bali pada triwulan III tahun 2020 hanya memiliki TPK sebesar 3,8 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Kunjungan wisman yang masuk melalui Bali (Ngurah Rai) pada triwulan III tahun 2020 hanya sebesar 36 orang. Kontribusi dari kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Bali juga belum berpengaruh signifikan pada TPK Hotel berbintang, dimana hanya meningkat 1,39 poin dari triwulan sebelumnya. Pemulihan pariwisata Bali perlu dipercepat mengingat perekonomian di Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, dan pemulihan Bali akan meningkatkan citra pemulihan pariwisata Indonesia di pasar mancanegara.

**Gambar 21. PDB Sektor Akomodasi dan Makan Minum**

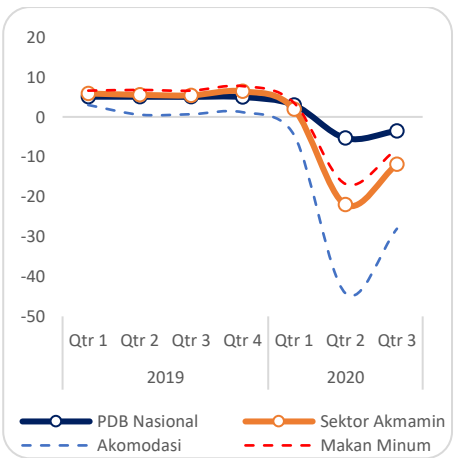


Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai tambah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada triwulan III tahun 2020 sebesar Rp 97 triliun dan berkontribusi sebesar 2,49 persen dari PDB, dengan rincian subsektor akomodasi sebesar Rp17,66 triliun, dan subsektor makan minum sebesar Rp79,39 triliun.

Pada triwulan III tahun 2020, PDB penyediaan akomodasi dan makan minum turun sebesar 11,46 persen (YoY), namun meningkat 14,79 persen jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 (QtQ). Namun, pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih lebih rendah dari nilai pertumbuhan PDB nasional (YoY) sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

## 2.2 Produk Domestik Regional Bruto

**Gambar 22. Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Pada Triwulan III Secara Spasial**

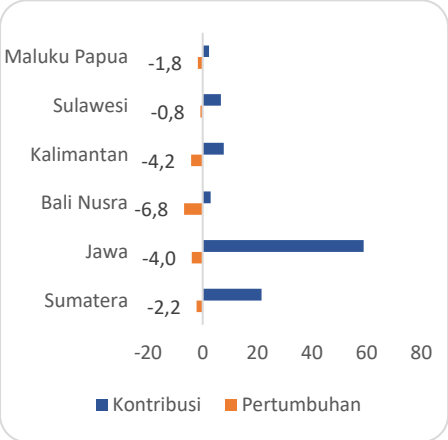


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah Indonesia pada triwulan III tahun 2020 mengalami kontraksi. Namun terdapat dua provinsi dengan pertumbuhan ekonomi positif yaitu Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Kontraksi yang dialami oleh wilayah Sumatera, Sulawesi, serta Maluku dan Papua lebih rendah dari kontraksi yang dialami oleh nasional, sementara kontraksi yang dialami oleh wilayah Jawa, Kalimantan, serta Bali dan Nusa Tenggara lebih tinggi dari kontraksi pertumbuhan nasional. Secara umum, sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan restoran di seluruh wilayah masih mengalami kontraksi seiring dengan kebijakan PSBB.

***Maluku Utara tumbuh tinggi di tengah kontraksi wilayah Maluku dan Papua.***

Secara agregat, wilayah Maluku dan Papua tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan II tahun 2020 dimana Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami kontraksi. Provinsi Papua pada triwulan III tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,6 persen (YoY). Kontraksi pertumbuhan ini disumbang oleh sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman yang masing-masing terkontraksi sebesar 43,3 persen (YoY) dan 22,4 persen (YoY). Sementara pertambangan, pertanian, dan perdagangan yang berkontribusi hingga 52,2 persen terhadap

perekonomian Papua, secara tahunan hanya tumbuh sebesar 0,4 persen, -0,7 persen dan -2,2 persen. Kondisi ini sejalan dengan rilis Freeport Indonesia yang menyatakan bahwa ada peningkatan produksi tembaga dan penurunan produksi emas selama triwulan III tahun 2020 (YoY) serta penurunan produksi padi dan palawija. Di tengah kontraksi Papua Barat sebesar 3,4 persen (YoY), terdapat sektor yang masih tumbuh tinggi yaitu jasa keuangan (10,6 persen, YoY), pengadaan listrik (6,3 persen, YoY), dan infokom (9,9 persen, YoY) sejalan dengan pengaruh positif dari aktivitas *Work From Home* (WFH) dan *School From Home* (SFH). Di sisi lain, dari 3 sektor utama yang berkontribusi sebesar 54,4 persen terhadap perekonomian Papua Barat, hanya sektor Industri pengolahan yang tumbuh positif yaitu sebesar 3,0 persen (YoY), sedangkan pertanian dan pertambangan terkontraksi sebesar 7,5 persen (YoY) dan 6,5 persen (YoY).

Maluku mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (YoY) sementara Maluku Utara mengalami pertumbuhan tinggi yaitu sebesar 6,7 persen (YoY). Kontraksi di Maluku disumbang oleh sektor transportasi dan penyediaan akomodasi makanan dan minuman yang terkontraksi cukup dalam, yaitu sebesar 18,7 persen (YoY) dan 13,2 persen (Yo). Pertanian sebagai sektor utama di Maluku juga mengalami kontraksi 1,2 persen (YoY). Tingginya pertumbuhan provinsi Maluku Utara didorong oleh industri pengolahan yang tumbuh hingga 107,0 persen (YoY) sejalan dengan selesainya pembangunan smelter pirometalurgi di Halmahera Tengah yang mendorong peningkatan produksi di industri pengolahan.

***Kontraksi tertinggi di Sulawesi terjadi di Sulawesi Barat, sementara Sulawesi Tengah masih tumbuh positif.***

Secara agregat, pada triwulan III tahun 2020 wilayah Sulawesi terkontraksi sebesar 0,8 persen (YoY) lebih baik dari triwulan II tahun 2020. Kontraksi terdalam terjadi di Sulawesi Barat sebesar 5,3 persen (YoY). Kontraksi tertinggi ada pada sektor konstruksi yaitu sebesar 16,7 persen (YoY) diikuti oleh administrasi pemerintahan sebesar 12,2 persen (YoY) dan penyediaan akomodasi makanan dan minuman sebesar 10,9 persen (YoY). Pertanian yang merupakan sektor utama terkontraksi sebesar 2,6 persen (YoY). Dalamnya kontraksi sektor konstruksi akibat proyek *multiyears* pembangunan jalan poros Mamuju-Mamasa yang mangkrak sejalan dengan Realisasi Belanja Modal APBN dan APBD yang menurun.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu-satunya provinsi di wilayah Sulawesi yang tumbuh positif pada triwulan III tahun 2020 yaitu sebesar 2,8 persen (YoY). Tiga sektor utama yaitu pertanian, pertambangan, dan

industri pengolahan tumbuh positif masing-masing sebesar 1,1 persen (YoY), 6,6 persen (YoY), dan 27,8 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan data produksi beras yang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, serta data ekspor besi baja yang meningkat. Sementara, pertumbuhan Sulawesi Tengah tertahan akibat tingginya kontraksi di sektor transportasi (37,5 persen (YoY)), konstruksi (11,1 persen (YoY)), dan penyediaan akomodasi makanan dan minuman (10,1 persen (YoY)).

Walaupun hampir semua provinsi di Sulawesi terkontraksi, ekonomi Gorontalo dan Sulawesi Selatan tumbuh lebih baik diantara provinsi lain yaitu sebesar 0,1 persen (YoY) dan 1,1 persen (YoY). Rendahnya kontraksi di Gorontalo terkompensasi oleh tingginya pertumbuhan di beberapa sektor jasa, yaitu jasa keuangan (14,2 persen, YoY), infokom (9,1 persen, YoY), dan jasa pendidikan (5,1 persen, YoY). Sementara tiga sektor utama di Gorontalo yaitu pertanian, perdagangan, dan konstruksi mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,8 persen (YoY), 2,2 persen (YoY), dan 0,1 persen (YoY). Di Sulawesi Selatan, tiga sektor utama yaitu pertanian, industri, dan perdagangan mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,5 persen (YoY), 1,7 persen (YoY), dan 2,2 persen (YoY). Kontraksi yang dialami industri dan perdagangan lebih baik dari triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan produksi industri manufaktur selama triwulan III tahun 2020 serta listrik yang terjual pada pelanggan industri naik hingga 19,9 persen (QtQ). Di sisi lain, pertumbuhan sektor jasa (infokom (12,2 persen (YoY), jasa kesehatan (7,6 persen (YoY), dan real estate (4,2 persen (YoY))) menjadi pendorong pertumbuhan di Sulawesi Selatan.

***Semua Provinsi di Kalimantan terkontraksi.***

Wilayah Kalimantan secara agregat terkontraksi sebesar 4,2 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang mengalami kontraksi paling dalam yaitu sebesar 4,7 persen (YoY). Kontraksi ini disebabkan oleh kontraksi pada tiga sektor utama yaitu sektor pertambangan (kontraksi 9,1 persen (YoY)), industri pengolahan (kontraksi 8,1 persen (YoY)) dan pertanian (kontraksi 3,0 persen (YoY)). Penurunan sektor tambang tercermin dari penurunan nilai ekspor batubara, sementara pertanian yang terkontraksi tercermin pada produksi padi, dan industri tercermin dari nilai ekspor CPO yang juga mengalami penurunan.

Sementara itu, kontraksi terendah di Kalimantan dialami oleh Kalimantan Utara. Kalimantan Utara terkontraksi sebesar 1,5 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020. Pertambangan dan industri tercatat terkontraksi sebesar 7,6 persen (YoY). Walaupun mengalami kontraksi, terdapat

beberapa sektor yang tumbuh tinggi diantaranya adalah pengadaan listrik (19,7 persen, YoY), jasa lainnya (12,5 persen, YoY), jasa kesehatan (11,5 persen, YoY), dan konstruksi (8,3 persen, YoY). Hal ini sejalan dengan adanya pendistribusian listrik baru pada enam desa di Malinau Selatan yang sebelumnya tidak teraliri listrik. PLTU Gunung Seriang di Tanjung Selor mulai beroperasi, peningkatan jasa kesehatan terutama untuk *screening* kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebarluasan Covid-19 serta pekerjaan konstruksi PLBN Sei Pancang di Kaltara mulai dikerjakan.

***Kontraksi Bali semakin dalam, sementara Nusa Tenggara membaik.***

Secara agregat, wilayah Bali dan Nusa Tenggara terkontraksi sebesar 6,8 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020. Kontraksi terbesar terjadi di Provinsi Bali yaitu sebesar 12,3 persen (YoY). Aktivitas pariwisata yang merupakan kontributor utama ekonomi Bali belum pulih. Lebih lanjut, kategori lapangan usaha yang memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata mengalami penurunan, seperti penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 34,7 persen (YoY), serta transportasi sebesar 40,3 persen (YoY). Di sisi lain sektor infokom masih tumbuh positif sebesar 6,3 persen (YoY).

Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang pertumbuhannya lebih baik dibandingkan provinsi lainnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 1,1 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2020. Sektor yang mengalami kontraksi tinggi, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi dan pergudangan yang mengalami kontraksi sebesar 38,5 persen (YoY) dan 38,4 persen (YoY). Pertanian yang merupakan sektor utama mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen (YoY), sementara pertambangan tumbuh tinggi yaitu sebesar 40,3 persen (YoY). Penyebab tingginya pertumbuhan di sektor pertambangan disebabkan karena terjadi kenaikan produksi bijih tembaga AMNT pada triwulan III tahun 2020 dibandingkan triwulan III tahun 2019 seiring dengan kenaikan ekspor luar negeri serta pengalian juga mengalami peningkatan sebagai dampak kenaikan permintaan konstruksi pada triwulan ini.

Provinsi Nusa Tenggara Timur terkontraksi 1,7 persen (YoY). Sektor-sektor jasa masih mengalami kontraksi dalam seperti jasa perusahaan (terkontraksi 53,3 persen, YoY), penyediaan akomodasi dan makanan minuman (terkontraksi 35,8 persen, YoY), dan jasa lainnya (terkontraksi 21,6 persen, YoY). Dari tiga sektor utama di Nusa Tenggara Timur yaitu pertanian, administrasi pemerintahan, dan perdagangan, hanya perdagangan yang mengalami kontraksi dalam, yaitu sebesar 10,0

persen (YoY). Pertanian dan administrasi pemerintahan masih tumbuh positif masing-masing sebesar 0,1 persen (YoY) dan 5,9 persen (YoY), sejalan dengan peningkatan produksi beberapa komoditas peternakan seperti ayam yang meningkat didorong oleh peningkatan permintaan akibat mulai kembali ramainya perayaan pesta dan perayaan serta realisasi belanja pegawai dan belanja barang modal baik APBN maupun APBD di NTT yang mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya.

***Kontraksi terdalam wilayah Jawa terjadi di Provinsi Banten.***

Secara agregat, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa terkontraksi sebesar 4,0 persen cukup membaik dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi hingga 6,7 persen (YoY). Pada triwulan III tahun 2020, semua provinsi di Pulau Jawa mengalami kontraksi. Provinsi Banten menjadi provinsi yang terkontraksi paling dalam, yakni terkontraksi sebesar 5,8 persen (YoY), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat yang terkontraksi sebesar 4,1 persen (YoY). Secara keseluruhan semua provinsi di Pulau Jawa mengalami perbaikan ditandai dengan kontraksi yang tidak sedalam triwulan sebelumnya.

Provinsi Banten terkontraksi sebesar 5,8 persen (YoY), cukup membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi hingga 7,3 persen (YoY). Menurunnya ekonomi Banten disebabkan oleh terkontraksinya sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Industri pengolahan terkontraksi sebesar 6,6 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 31,0 persen. Perdagangan terkontraksi sebesar 5,9 persen (YoY) dengan kontribusi terhadap perekonomian Banten sebesar 13,5 persen. Sektor yang terkontraksi paling dalam pada triwulan ini adalah sektor transportasi dan pergudangan yang terkontraksi hingga 35,8 persen dan menjadi sumber pertumbuhan negatif terdalam yakni sebesar 2,3 persen. Beberapa sektor beberapa sektor yang tetap tumbuh positif yaitu pertanian yang tumbuh sebesar 3,8 persen (YoY), informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 9,1 persen (YoY), jasa kesehatan tumbuh sebesar 4.4 persen (YoY), jasa keuangan tumbuh sebesar 3,0 persen (YoY), dan jasa pendidikan tumbuh sebesar 1,3 persen (YoY).

Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi yang kontraksinya tidak terlalu dalam dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya di pulau Jawa. DIY terkontraksi sebesar 2,8 persen (YoY) cukup membaik dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi hingga 6,7 persen (YoY). Sektor pertanian tumbuh sebesar 7,5 persen (YoY) dengan kontribusi sektor sebesar 10,9 persen pertumbuhan ini seiring dengan pergeseran musim tanam padi serta terjadi panen raya ubi kayu dan peningkatan produksi

tembakau dan tebu, informasi dan komunikasi tumbuh hingga 17,8 persen (YoY) dengan kontribusi sektor sebesar 9,6 persen, jasa kesehatan tumbuh hingga 21,9 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 3,2 persen. Sementara itu, sektor yang memiliki kontribusi paling besar yaitu industri pengolahan (12,6 persen) masih terkontraksi sebesar 5,4 persen (YoY) karena permintaan ekspor yang masih menurun dan aktivitas pariwisata yang belum normal. Sektor lain yang tumbuh negatif yaitu konstruksi yang terkontraksi hingga 12,2 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 9,7 persen masih disebabkan oleh tingginya pembangunan bandara pada tahun 2019. Sementara itu, akomodasi terkontraksi hingga 18,8 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 8,7 persen, dan jasa lainnya menjadi sektor yang terkontraksi paling dalam yaitu 23,4 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 2,1 persen.

Provinsi Jawa Barat terkontraksi sebesar 4,1 persen (YoY) membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi hingga 6,0 persen (YoY). Beberapa sektor yang tumbuh positif yaitu informasi dan komunikasi tumbuh hingga 39,6 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 4,2 persen, pengadaan air tumbuh hingga 15,2 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 0,1 persen, jasa pendidikan tumbuh hingga 7,8 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 3,8 persen. Pertanian tumbuh sebesar 3,7 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 9,7 persen, dan sektor jasa keuangan yang tumbuh sebesar 1,7 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 2,8 persen. Sementara industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar (40,7 persen) terkontraksi hingga 6,9 persen (YoY) disebabkan oleh penurunan industri alas kaki, industri tekstil dan menurunnya produksi akibat ditutupnya beberapa pabrik karena menjadi *cluster* Covid-19 selama beberapa waktu. Jasa perusahaan menjadi sektor yang terkontraksi paling dalam yakni terkontraksi sebesar 18,9 persen (YoY) disusul oleh jasa kesehatan yang terkontraksi sebesar 14,9 persen (YoY).

Pertumbuhan wilayah Sumatera terkontraksi secara menyeluruh.

Perekonomian wilayah Sumatera pada triwulan III tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,2 persen (YoY), cukup membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,0 persen (YoY). Kontraksi di wilayah Sumatera terjadi menyeluruh di semua provinsi dengan kontraksi yang paling dalam terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,8 persen (YoY), sementara Provinsi Aceh dan Bengkulu mengalami kontraksi yang tidak terlalu dalam yakni sama-sama terkontraksi 0,1 persen (YoY).

Provinsi Sumatera Utara yang merupakan provinsi dengan kontribusi terbesar di wilayah Sumatera terkontraksi sebesar 2,6 persen (YoY).

Sektor transportasi dan akomodasi menjadi sektor yang terkontraksi paling dalam masing-masing sebesar 17,9 persen (YoY) dan 14,5 persen (YoY). Sektor pertanian tumbuh sebesar 1,1 persen (YoY) dengan kontribusi paling besar yaitu 21,5 persen. Sementara sektor utama lainnya terkontraksi seperti industri pengolahan yang terkontraksi 1,5 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 19,1 persen, perdagangan terkontraksi 3,8 persen dengan kontribusi sebesar 19,1 persen, serta sektor konstruksi terkontraksi 5,2 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 13,5 persen. Beberapa sektor yang masih tumbuh positif selain pertanian adalah sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 4,9 persen (YoY), pengadaan listrik 4,4 persen (YoY), real estate tumbuh 0,5 persen (YoY), dan jasa keuangan tumbuh sebesar 0,3 persen (YoY).

Lebih lanjut, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang terkontraksi paling dalam di Wilayah Sumatera yakni terkontraksi hingga 5,8 persen (YoY) disebabkan oleh menurunnya hampir semua sektor kecuali industri pengolahan, infokom, dan jasa kesehatan. Industri pengolahan tumbuh sebesar 0,9 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 42,8 persen. Informasi dan komunikasi tumbuh positif hingga 19,6 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 2,7 persen, dan jasa kesehatan tumbuh sebesar 4,1 persen (YoY) dengan kontribusi sebesar 1,0 persen. Sementara itu, kontraksi terdalam masih terjadi di sektor-sektor jasa. Jasa lainnya terkontraksi hingga 79,2 persen (YoY), jasa perusahaan terkontraksi hingga 51,6 persen (YoY), transportasi dan pergudangan terkontraksi hingga 45,9 persen (YoY), dan akomodasi terkontraksi hingga 43,8 persen (YoY).

**Tabel 14. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Tahun 2015 – Triwulan III/2020 (persen, YoY)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020:1 | 2020:2 | 2020:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sumatera** | **3,5** | **4,3** | **4,3** | **4,5** | **4,6** | **3,2** | **-3,1** | **-2,2** |
| Aceh | -0,7 | 3,3 | 4,2 | 4,6 | 4,1 | 3,2 | -1,8 | -0,1 |
| Sumut | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 4,6 | -2,7 | -2,6 |
| Sumbar | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 3,9 | -4,9 | -2,9 |
| Riau | 0,2 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | -3,2 | -1,7 |
| Jambi | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 1,8 | -1,7 | -0,8 |
| Sumsel | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,7 | 4,9 | -1,5 | -1,4 |
| Bengkulu | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,8 | -0,5 | -0,1 |
| Lampung | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 1,7 | -3,6 | -2,4 |
| Kep. Babel | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 1,3 | -5,0 | -4,4 |
| Kep. Riau | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 4,6 | 4,9 | 2,1 | -6,7 | -5,8 |
| **Jawa** | **5,5** | **5,6** | **5,6** | **5,7** | **5,5** | **3,4** | **-6,7** | **-4,0** |
| DKI Jakarta | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,1 | -8,2 | -3,8 |
| Jabar | 5,0 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,1 | 2,7 | -6,0 | -4,1 |
| Jateng | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 2,6 | -5,9 | -3,9 |
| DI Yogyakarta | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 6,2 | 6,6 | -0,2 | -6,7 | -2,8 |
| Jatim | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,0 | -5,9 | -3,7 |
| Banten | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 3,2 | -7,3 | -5,8 |
| **Bali Nusra** | **10,4** | **5,9** | **3,7** | **2,7** | **5,1** | **0,9** | **-6,3** | **-6,8** |
| Bali | 6,0 | 6,3 | 5,6 | 6,4 | 5,6 | -1,2 | -11,0 | -12,3 |
| NTB | 21,8 | 5,8 | 0,1 | -4,6 | 4,0 | 3,1 | -1,4 | -1,1 |
| NTT | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 3,0 | -2,0 | -1,7 |
| **Kalimantan** | **1,4** | **2,0** | **4,3** | **3,9** | **5,0** | **2,3** | **-4,3** | **-4,2** |
| Kalbar | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 2,7 | -3,4 | -4,5 |
| Kalteng | 7,0 | 6,3 | 6,7 | 5,6 | 6,2 | 2,9 | -3,2 | -3,1 |
| Kalsel | 3,8 | 4,4 | 5,3 | 5,1 | 4,1 | 4,2 | -2,6 | -4,7 |
| Kaltim | -1,2 | -0,4 | 3,1 | 2,7 | 4,8 | 1,3 | -5,5 | -4,6 |
| Kaltara | 3,4 | 3,6 | 6,8 | 6,0 | 6,9 | 4,8 | -3,1 | -1,5 |
| **Sulawesi** | **8,2** | **7,4** | **7,0** | **6,7** | **6,7** | **3,9** | **-2,8** | **-0,8** |
| Sulut | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 4,3 | -3,9 | -1,8 |
| Sulteng | 15,5 | 9,9 | 7,1 | 6,3 | 7,2 | 4,9 | -0,1 | 2,8 |
| Sulsel | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 3,1 | -3,9 | -1,1 |
| Sultra | 6,9 | 6,5 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 4,5 | -2,5 | -1,8 |
| Gorontalo | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 4,0 | -0,3 | -0,1 |
| Sulbar | 7,3 | 6,0 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 4,9 | -0,8 | -5,3 |
| **Maluku Papua** | **6,3** | **7,4** | **4,9** | **7,0** | **-7,4** | **2,7** | **2,1** | **-1,8** |
| Maluku | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,6 | 3,7 | -1,3 | -2,4 |
| Maluku Utara | 6,1 | 5,8 | 7,7 | 7,9 | 6,1 | 3,1 | -0,2 | 6,7 |
| Papua Barat | 4,2 | 4,5 | 4,0 | 6,2 | 2,7 | 5,1 | 0,5 | -3,4 |
| Papua | 7,3 | 9,14 | 4,64 | 7,33 | -15,7 | 1,3 | 4,1 | -2,6 |
| **NASIONAL** | **4,88** | **5,03** | **5,07** | **5,17** | **5,02** | **2,97** | **-5,32** | **-3,49** |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

## 2.3 Fiskal

***Pendapatan negara masih mengalami penurunan, sementara belanja negara meningkat sehingga terdapat risiko potensi pelebaran defisit kedepannya.***

**Tabel 15. Realisasi Komponen Pendapatan Negara dan Hibah**

| Pendapatan Negara dan Hibah | Realisasi (triliun Rp) | | *Growth* (2019-2020) |
|---|---|---|---|
| | September 2019 | September 2020 | |
| Pendapatan Dalam Negeri | 1.341,3 | 1.153,4 | -14,0 |
| Penerimaan Perpajakan | 1.039,5 | 892,4 | -14,1 |
| PNBP | 301,8 | 260,9 | -13,6 |
| Hibah | 1,0 | 5,7 | 483,9 |
| Total | 1.342,3 | 1.159,0 | -13,7 |

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir September 2020 mencapai Rp1.159,0 triliun atau 68,2 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020, dimana capaian Pendapatan Negara tersebut turun sebesar 13,6 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara umum, kinerja penerimaan pajak tahun 2020 dipengaruhi oleh turunnya kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Masih tingginya tingkat penyebaran Covid-19 dan masih diterapkannya langkah antisipasi penyebaran seperti PSBB serta instruksi untuk bekerja dan sekolah dari rumah (*work from home*, WFH/*school from home*, SFH) menimbulkan gangguan (*shock*) terhadap ekonomi, sehingga besaran output ekonomi menjauh dari output potensialnya. Selain itu, kebijakan fiskal *countercyclical* serta program pemulihan ekonomi nasional turut mempengaruhi penerimaan pajak pada tahun 2020. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberikan insentif perpajakan guna menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas dunia usaha.

Sampai dengan 30 September 2020, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp750,6 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 62,6 persen target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun. Realisasi penerimaan pajak periode Januari–September 2020 turun sebesar 16,9 persen (YoY) dibanding realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan pajak utamanya bersumber dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/ Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), yang berkontribusi lebih dari 94 persen terhadap penerimaan Pajak. Secara nominal capaian penerimaan PPh Nonmigas ditopang dari penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Ditinjau dari pertumbuhannya, PPh Nonmigas turun 16,9 persen (YoY), dimana hanya PPh 25/29 OP yang masih tumbuh positif 2,0 persen (YoY) ditengah pertumbuhan seluruh komponen PPh Nonmigas yang masih mengalami kontraksi. Lebih lanjut, realisasi penerimaan Pajak dari PPN/PPnBM

secara nominal utamanya berasal dari penerimaan PPN. Namun, secara kumulatif pertumbuhan PPN/PPnBM juga masih mengalami penurunan 13,6 persen (YoY). Penerimaan PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor secara nominal menopang lebih dari 97 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM, meskipun masih tumbuh negatif. Masih terus terkontraksinya pertumbuhan penerimaan Pajak menunjukkan pandemi Covid-19 masih terus menekan kinerja perekonomian Indonesia yang mengakibatkan melambatnya aktivitas dunia usaha, sosial-ekonomi masyarakat, dan aktivitas ekonomi secara global.

**Tabel 16. Realisasi Komponen Penerimaan Perpajakan**

| Penerimaan Perpajakan | Realisasi (triliun Rp) | | *Growth* (2019-2020) |
|---|---|---|---|
| | Juni 2019 | Juni 2020 | |
| Pajak Penghasilan | 546,2 | 441,8 | -19,2 |
| PPh Nonmigas | 503,0 | 418,2 | -16,9 |
| PPh Migas | 43,2 | 23,6 | -45,3 |
| PPn dan PPnBM | 336,0 | 290,3 | -13,61 |
| PBB | 48,0 | 18,5 | -8,9 |
| Bea Masuk | 26,8 | 24,3 | -9,6 |
| Cukai | 107,5 | 115,3 | 7,2 |
| Bea keluar | 2,3 | 2,2 | -2,1 |
| Total | 1.066,9 | 892,5 | |

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya juga mengalami perlambatan sebesar 8,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi positif tampak pada kinerja penerimaan cukai pada akhir September 2020 yang mencapai Rp115,3 triliun atau tumbuh 7,2 persen. Sementara itu Bea masuk dan Bea keluar mengalami penurunan masing-masing sebesar 9,6 persen dan 2,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sampai dengan akhir triwulan III tahun 2020, kinerja perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih dan masih memberikan tekanan yang cukup berat bagi kinerja PNBP. Realisasi PNBP sampai dengan 30 September 2020 mencapai Rp260,9 triliun atau mengalami penurunan sebesar 13,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp301,8 triliun. Belum normalnya aktivitas ekonomi global dan domestik baik dari sisi *supply* maupun *demand* sampai dengan periode September 2020, mengakibatkan kontraksi pada PNBP khususnya penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Realisasi sampai dengan akhir bulan September 2020 mencapai Rp72,9 triliun atau mengalami penurunan sebesar 33,5 persen dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019.

Sementara itu, realisasi penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp64,64 triliun. Nilai tersebut telah menunjukkan peningkatan dari triwulan sebelumnya yang masih

sebesar Rp46,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa ditengah pandemi yang terjadi, BUMN masih mampu memberikan setoran dividen kepada pemerintah. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2019, realisasi bulan September 2020 masih menunjukkan penurunan 11,3 persen yang salah satunya karena adanya penurunan pendapatan dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020.

**Tabel 17. Realisasi Komponen PNBP**

| Komponen PNBP | TA 2020 (triliun Rp) | | *Growth* YoY (%) |
|---|---|---|---|
| | APBN Perpres 72/2020 | Realisasi s.d. 30 September | |
| PNBP | 294,1 | 260,9 | -13,6 |
| Penerimaan SDA | 79,1 | 72,9 | -33,5 |
| Pendapatan KND | 65,0 | 64,6 | -11,4 |
| PNBP Lainnya | 100,1 | 75,6 | -9,8 |
| Pendapatan BLU | 50,0 | 47,8 | 34,2 |

Sumber: Kementerian Keuangan

Hingga triwulan III tahun 2020, Belanja Negara menunjukkan peningkatan. Sampai akhir September 2020, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.841,1 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp1.211,4 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai Rp629,7 triliun. Dari sisi BPP, terjadi pertumbuhan sebesar 21,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Peningkatan penyerapan BPP dipengaruhi oleh pertumbuhan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang tumbuh 13,7 persen (YoY) dan belanja non-K/L yang tumbuh 30,7 persen (YoY).

**Gambar 23. Perkembangan Komponen Belanja Negara**

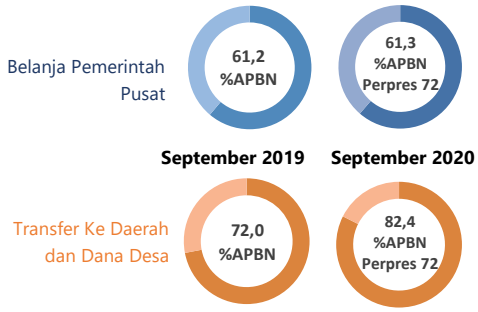


Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Belanja K/L hingga September 2020 mencapai Rp632,1 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,7 persen (YoY) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019. Pertumbuhan belanja K/L ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi pada belanja barang dan bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Realisasi Bantuan Sosial tumbuh sebesar 79,8 persen (YoY), mencapai Rp156,3 triliun. Peningkatan realisasi bantuan sosial terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, melalui: (a) penyaluran bantuan PKH; (b) penyaluran bantuan program Kartu Sembako; (c) penyaluran bantuan paket sembako Jabodetabek; (d) penyaluran bantuan sosial tunai nonJabodetabek; (e)

penyaluran bansos beras bagi KPM PKH (f) penyaluran bantuan sosial tunai (BST) bagi penerima bantuan Sembako non-PKH. Selain itu, program bansos regular juga meningkat dari tahun sebelumnya, seperti PBI JKN meningkat 36,8 persen, KIP Kuliah meningkat 22,6 persen dan PIP siswa sekolah yang meningkat 14,6 persen.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan September 2020 mencapai Rp180,0 triliun atau turun sebesar 2,6 persen (YoY). Penurunan ini utamanya disebabkan perubahan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 pada tahun 2020 yang berdampak pada penurunan realisasi komponen Tunjangan Kinerja. Namun di sisi lain pada komponen Gaji dan Tunjangan, terdapat kenaikan realisasi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang terutama didukung oleh kenaikan Tunjangan Tenaga Pendidik NonPNS.

Sementara itu, realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 September 2020 mencapai Rp222,7 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 9,1 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan akselerasi penyaluran pada beberapa program dalam mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19 seperti pembayaran bantuan UMKM, bantuan upah gaji, insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan, serta pengadaan alat/sarpras kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19. Faktor lain yang mendukung percepatan realisasi belanja barang yaitu realisasi yang cukup signifikan pada pembayaran selisih harga biodiesel BLU Kelapa Sawit.

Realisasi Belanja Non-K/L hingga September 2020 mencapai Rp579,2 triliun, tumbuh 30,7 persen (YoY) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019, yang digunakan untuk pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja lain-lain. Realisasi Pembayaran Bunga Utang sampai dengan September 2020 sebesar Rp234,8 triliun, naik 12,3 persen (YoY), sejalan dengan tambahan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan September 2020 turun sebesar 8,3 persen (YoY), mencapai Rp114,3 triliun. Realisasi subsidi tersebut digunakan untuk: (a) subsidi energi sebesar Rp74,6 triliun, mencakup subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik termasuk diskon listrik; dan (b) subsidi non energi sebesar Rp39,7 triliun, antara lain untuk subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Realisasi Subsidi tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh realisasi ICP, CP Aramco, nilai tukar, dan volume konsumsi/penyaluran barang bersubsidi. Faktor lain yang berpengaruh adalah kebijakan subsidi

tetap solar Rp1.000/liter dari sebelumnya Rp2.000/liter pada tahun 2019.

**Tabel 18. Realisasi Komponen Belanja Pemerintah Pusat**

| Belanja Pemerintah Pusat | APBN Perpres 72/2020* | Realisasi 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | September 2020* | *Growth* YoY (%) |
| Belanja K/L | 836,4 | 632,1 | 13,7 |
| Belanja Pegawai | 256,6 | 180,0 | -2,6 |
| Belanja Barang | 271,7 | 222,7 | 9,1 |
| Belanja Modal | 137,4 | 73,2 | -9,0 |
| Bantuan Sosial | 170,7 | 156,3 | 79,8 |
| Belanja Non K/L | 1.138,9 | 579,2 | 30,7 |
| a.l. Pembayaran Bunga Utang | 192,0 | 114,3 | -8,3 |
| Subsidi | 450,6 | 112,4 | 5.405,8 |
| Total (neto) | 1.975,2 | 1.211,4 | 21,2 |

Sumber: Kementerian Keuangan
*dalam triliun Rp

Capaian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan September 2020 lebih tinggi sekitar Rp34,4 triliun atau 5,8 persen (YoY) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Realisasi TKDD mencapai Rp629,7 triliun atau 82,4 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp572,0 triliun (82,6 persen) dan Dana Desa Rp57,7 triliun (81,0 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp540,3 triliun (82,7 persen), Dana Insentif Daerah Rp16,0 triliun (86,6 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp15,7 triliun (75,3 persen)

Pada akhir September 2020, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp321,3 triliun atau 83,6 persen dari pagu alokasi, yang terdiri atas DAU Formula sebesar Rp318,1 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp3,2 triliun. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 7,7 persen (YoY) yang disebabkan oleh penyaluran DAU TA 2020 telah berbasis kinerja, dimana penyaluran DAU dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan laporan Belanja Pegawai dan khusus DAU bulan April ditambah laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan Pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Selain itu, penurunan realisasi DAU juga disebabkan alokasi DAU Formula TA 2020 dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,94 persen dari alokasi DAU Formula TA 2019 akibat turunnya Pendapatan Dalam Negeri Netto dalam APBN TA 2020

Angka realisasi DAU Formula per 30 September 2020 turut dipengaruhi oleh: (i) penundaan penyaluran DAU

bulan Oktober terhadap satu daerah yang masih mendapat sanksi sampai dengan akhir bulan September karena tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dengan benar dan lengkap sesuai PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan (ii) relaksasi penyaluran DAU bulan Oktober terhadap daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran sesuai dengan amanat PMK Nomor 101/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sementara itu, realisasi DAU Tambahan terdiri atas DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.773,0 miliar yang telah disalurkan tahap I kepada 399 daerah dan tahap II kepada 370 daerah serta DAU Tambahan Bantuan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp448,2 miliar yang telah disalurkan tahap I kepada 46 daerah dan tahap II kepada 3 daerah penerima alokasi.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 30 September 2020 sebesar Rp70,0 triliun atau 81,0 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut terdiri atas penyaluran DBH TA 2020 sebesar Rp54,0 triliun dan penyaluran KB DBH sebesar Rp16,0 triliun, mengalami penurunan sebesar 0,4 persen (YoY). Penurunan ini karena adanya relaksasi percepatan penyaluran triwulan III DBH TA 2020 secara sekaligus pada bulan Agustus, yang dilakukan dalam rangka membantu arus kas pemerintah daerah dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Selanjutnya terkait Dana Transfer Khusus, sampai dengan akhir September 2020, realisasi DTK mencapai Rp149,0 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per 30 September 2020 adalah sebesar Rp49,9 triliun atau 92,8 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan signifikan sebesar 110,3 persen (YoY). Peningkatan kinerja realisasi DAK Fisik yang signifikan tersebut dikarenakan adanya relaksasi penyaluran DAK Fisik berdasarkan PMK No. 101/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan PEN.

Sementara itu, penyaluran Pagu DAK Fisik (non Cadangan DAK Fisik) paling lambat disalurkan pada 7 hari kerja setelah batas akhir penyampaian data kontrak tanggal 31 Agustus. Sampai dengan batas akhir penyaluran (9 September 2020), dari pagu sebesar Rp45,1 triliun dan telah tersalurkan sebesar Rp42,9 triliun (95,1 persen). Sedangkan untuk Cadangan DAK Fisik, seluruh syarat salur DAK Fisik harus telah disampaikan paling lambat 30 September 2020 dan telah tersalur sebesar 80,0 persen (Rp7,0 triliun) dari

pagu cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 triliun di akhir bulan September. Selanjutnya, dalam rangka pelaporan kegiatan Cadangan DAK FiSik, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan paling lambat 15 Desember 2020.

**Tabel 19. Komposisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

| Keterangan | September 2019 | | September 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | Nominal (triliun Rupiah) | % APBN | Nominal (triliun Rupiah) | % APBN Perpres 72/2020 |
| Transfer Ke Daerah | 551,3 | 72,9 | 572,0 | 82,6 |
| Dana Perimbangan | 534,8 | 73,8 | 540,3 | 82,7 |
| Dana Bagi Hasil | 70,3 | 66,1 | 70,0 | 81,0 |
| Dana Alokasi Umum | 347,9 | 83,3 | 321,3 | 83,6 |
| Dana Transfer Khusus | 116,6 | 58,2 | 149,0 | 81,6 |
| Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang | 7,3 | 32,7 | 15,7 | 75,3 |
| Dana Insentif Daerah | 9,3 | 92,6 | 16,0 | 86,6 |
| Dana Desa | 44,0 | 62,9 | 57,7 | 81,0 |
| Total | 595,3 | 72,0 | 629,7 | 82,4 |

Sumber: Kementerian Keuangan

Hingga 30 September 2020, DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp99,1 triliun atau 77,0 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan sebesar 6,7 persen (YoY). Hal ini utamanya karena adanya perubahan penyaluran Dana BOS dari 4 tahap menjadi 3 tahap dimana penyaluran tahap ke-3 dilakukan paling cepat bulan September sehingga penyaluran Dana BOS bagi sebagian besar sekolah telah mencapai 100 persen. Selain itu peningkatan realisasi yang cukup signifikan terlihat pada hampir seluruh jenis DAK Nonfisik, yang merupakan dampak atas implementasi PMK Nomor 101/PMK.07/2020 yang mengamanatkan bahwa pelaporan DAK Nonfisik Tahap I tidak mensyaratkan batas minimal penyerapan. Adapun penurunan realisasi pada jenis Dana Tamsil Guru PNSD, Dana TKG PNSD, dan Dana Pelayanan Adminduk disebabkan oleh adanya penurunan jumlah guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Dana Tamsil Guru PNSD dan Dana TKG PNSD, serta adanya perubahan pola penyaluran Dana Adminduk yang semula dilakukan sekaligus menjadi dua tahap. Untuk meningkatkan capaian penyaluran ketiga jenis dana ini akan dilakukan koordinasi intensif dengan K/L teknis untuk percepatan pelaporan daerah.

Penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir September 2020 telah terealisasi sebesar Rp57,7 triliun atau 81,0 persen dari pagu alokasi. Angka ini menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) pada periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 57,9 persen dari pagu alokasi. Capaian tersebut tak lepas dari upaya perubahan kebijakan dalam penyaluran Dana Desa dengan adanya penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan transfer dari RKUD ke (Rekening Kas Desa) RKD pada waktu yang bersamaan sehingga Dana Desa dapat lebih cepat sampai ke desa. Selain itu, diterbitkannya PMK Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada tanggal 19 Mei 2020 memberikan relaksasi dalam persyaratan penyaluran Dana Desa.

Berdasarkan capaian Pendapatan dan Belanja Negara, hingga akhir September 2020, defisit anggaran mencapai Rp682,1 triliun atau sekitar 4,2 persen terhadap PDB. Besaran defisit ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai sebesar 1,6 persen PDB. Sementara itu posisi keseimbangan primer pada September 2020 berada pada posisi negatif Rp447,3 triliun dari yang sebelumnya negatif Rp43,3 triliun pada September 2019. Sementara itu, dari sisi pembiayaan anggaran, realisasi hingga September 2020 mencapai sebesar Rp784,7 triliun.

**Gambar 24. Perkembangan Realisasi Defisit APBN**

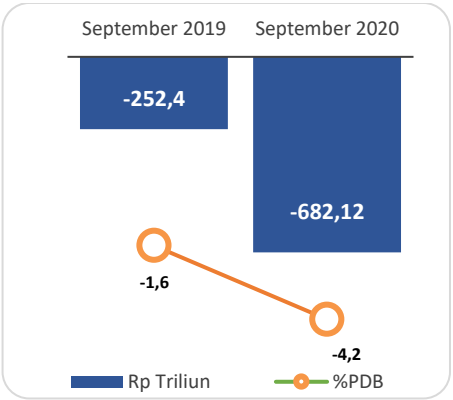


Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan kondisi defisit anggaran tersebut, posisi utang Pemerintah per akhir September 2020 sebesar Rp5.756,9 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 36,4 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya terkait dengan pembiayaan anggaran, secara neto telah mencapai Rp784,7 triliun atau 75,5 persen dari pagu Perpres 72/2020 yang artinya tumbuh sebesar 154,9 persen dibandingkan periode yang

sama pada tahun sebelumnya. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp810,8 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp790,6 triliun dan Pinjaman (neto) sebesar Rp20,1 triliun. Di dalam realisasi pembiayaan utang tersebut diperoleh dari bank Indonesia sebesar Rp382,4 triliun sebagai sinergi dengan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

**Gambar 25. Perkembangan Utang Pemerintah Pusat**

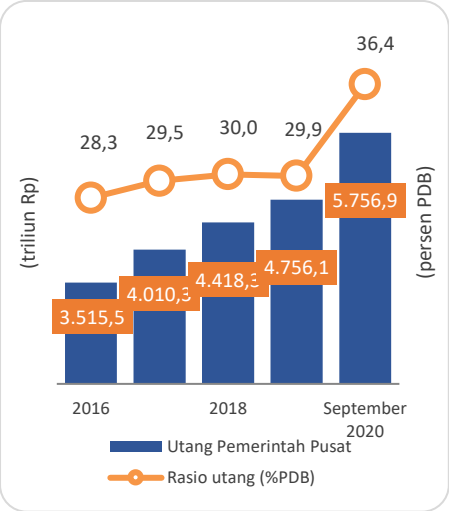


Sumber: Kementerian Keuangan

Di sisi lain, Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp27,3 triliun kepada BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah senantiasa memperhatikan aspek kehatihatian (*prudent*) dan akuntabel serta menjaga risiko tetap terkendali.

**Tabel 20. Perkembangan Komponen Pembiayaan**

| Jenis Pembiayaan | September 2019 | | September 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | Nominal (triliun Rp) | % APBN | Nominal (triliun Rp) | % APBN |
| Utang (neto) | 317,7 | 88,4 | 810,8 | 66,4 |
| Investasi | -11,1 | 14,6 | -27,2 | 10,6 |
| Pinjaman | 1,1 | -44,9 | 1,4 | 24,1 |
| Penjaminan | - | 0,0 | -0,4 | 71,3 |
| Lainnya | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp695,2 triliun yang terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral K/L dan Pemda. Sampai dengan 30 September 2020, realisasi program penanganan Covid-19 dan PEN menunjukkan tren positif yaitu mencapai Rp315,5 triliun atau 45,4 persen dari pagu, dan telah meningkat sebesar 253,2 persen dibandingkan realisasi pada triwulan II (Juni 2020) yang sebesar Rp124,6 triliun atau 17,9 persen dari pagu. Rincian realisasi tersebut mencakup anggaran kesehatan sebesar Rp21,9 triliun, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp157,0 triliun, anggaran sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp26,6 triliun, anggaran insentif usaha sebesar

Rp28,1 triliun, anggaran dukungan UMKM Rp81,9 triliun, serta anggaran pembiayaan korporasi yang akan direalisasikan menunggu waktu yang tepat. Secara umum, tren positif realisasi program PEN didukung oleh berbagai upaya akselerasi, diantaranya percepatan belanja penanganan Covid-19, percepatan program PEN lain diantaranya Insentif Usaha, DAK Fisik, DID Pemulihan, dan Pra Kerja, serta mengoptimalkan program-program baru yang dapat langsung direalisasikan, diantaranya Bantuan Produktif UMKM (BPUM) dan Subsidi Gaji/Upah.

**Gambar 26. Perkembangan Realisasi Anggaran PEN**

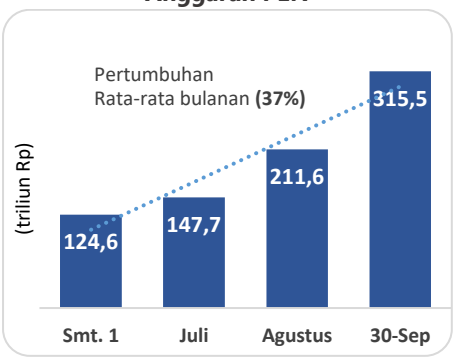


Sumber: Kementerian Keuangan

**Tabel 21. Rincian Realisasi Anggaran Program PEN**

| Klaster | September 2020 | |
|---|---|---|
| | triliun Rp | % pagu |
| Kesehatan | 21,9 | 25,0 |
| Perlindungan Sosial | 157,0 | 77,0 |
| Sektoral K/L dan Pemda | 26,6 | 25,1 |
| Insentif Usaha | 28,1 | 23,3 |
| Dukungan UMKM | 81,9 | 66,3 |
| Pembiayaan Korporasi menunggu waktu yang tepat | | |

Sumber: Kementerian Keuangan

**Tabel 22. Realisasi APBN s.d 30 September 2019 dan 2020**

(triliun rupiah)

| Uraian | | 2019 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APBN | Realisasi s.d. 30 September | %APBN | APBN (Perpres 72/2020) | Realisasi s.d. 30 September | % APBN Perpres 72/2020 |
| A. | Pendapatan Negara | 2165,1 | 1.342,3 | 61,99 | 1699,9 | 1.158,9 | 68,2 |
| | I. Pendapatan Dalam Negeri | 2164,7 | 1.341,3 | 61,96 | 1698,6 | 1.153,3 | 67,9 |
| | 1. Penerimaan Perpajakan | 1786,4 | 1.039,5 | 58,19 | 1404,5 | 892,4 | 63,5 |
| | 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 378,3 | 301,8 | 79,78 | 294,1 | 260,8 | 88,7 |
| | II. Hibah | 0,4 | 0,9 | 223,45 | 1,3 | 5,7 | 436,8 |
| B. | Belanja Negara | 2461,1 | 1.594,7 | 64,79 | 2739,2 | 1.841,1 | 67,2 |
| | I. Belanja Pemerintah Pusat | 1634,3 | 999,3 | 61,15 | 1975,2 | 1.211,3 | 61,3 |
| | 1. Belanja K/L | 855,4 | 556,1 | 65,01 | 836,4 | 632,1 | 75,6 |
| | 2. Belanja Non K/L | 778,9 | 778,9 | 443,2 | 56,90 | 1138,9 | 579,2 |
| | II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa | 826,8 | 595,3 | 72,01 | 763,9 | 629,7 | 82,4 |
| | 1. Transfer ke Daerah | 756,8 | 551,3 | 72,85 | 692,7 | 572,0 | 82,6 |
| | 2. Dana Desa | 70 | 44,0 | 62,88 | 71,2 | 57,7 | 81,0 |
| C. | Keseimbangan Primer | -20,1 | -43,2 | 215,2 | -700,4 | -447,3 | 63,8 |
| D. | Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B) | -296,0 | -252,4 | 85,27 | -1039,2 | -682,1 | 65,6 |
| | % Surplus/(Defisit) Anggaran thd PDB | -1,84 | -1,59 | | -6,34 | -4,16 | |
| E. | Pembiayaan Anggaran | 296,0 | 307,8 | 103,99 | 1039,2 | 784,6 | 75,5 |
| | al. Pembiayaan Utang | 359,2 | 317,7 | 88,4 | 1220,4 | 810,8 | 66,4 |

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

## 2.4 Moneter dan Jasa Keuangan

### Moneter

***Suku bunga acuan dipertahankan sebesar 4,00 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mendorong pemulihan ekonomi.***

Pada triwulan III 2020, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan *BI 7-day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) pada level 4,00 persen sepanjang Juli-September 2020. Pengambilan langkah ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta mendorong pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi Covid-19.

**Tabel 23. Perkembangan Reverse Repo Surat Berharga Negara**

| Tenor | persen (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Jul | Agu | Sep |
| 7 hari | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2 minggu | 3,93 | 3,78 | 3,80 |
| 1 bulan | 3,93 | 3,81 | 3,83 |

Sumber: Bank Indonesia

***Kebijakan Quantitative Easing (QE) dan Makroprudensial dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perekonomian.***

Selain menurunkan suku bunga acuan, Bank Indonesia menempuh kebijakan QE dan makroprudensial yang menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga perbankan terus menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian.

Hingga akhir triwulan III, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (QE) di perbankan sekitar Rp667,6 triliun, terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp496,8 triliun.

***Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah terus diperkuat.***

Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk membantu pendanaan APBN tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana baik melalui mekanisme pasar maupun secara langsung, sebagaimana amanat UU No. 2 Tahun 2020.

Sampai akhir triwulan III, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sebesar Rp60,18 triliun, termasuk dengan skema lelang utama, *Greenshoe Option* (GSO) dan *Private Placement*.

Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan *Public Goods* dalam APBN oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung berjumlah Rp229,7 triliun. Bank Indonesia juga telah merealisasikan pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan *Non-Public Goods*-UMKM sebesar Rp90,9 triliun. Melalui sinergi ini, Pemerintah dapat lebih fokus pada upaya akselerasi realisasi APBN dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

***Sepanjang triwulan III tahun 2020, rupiah relatif terkendali.***

Pada triwulan III tahun 2020, di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan baik karena faktor global maupun sejumlah risiko domestik, secara rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp14.718 per USD, cenderung menguat 1,8 persen terhadap rata-rata nilai tukar rupiah triwulan II tahun 2020. Pada 30 September 2020, nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp14.880 per USD.

Dari sisi eksternal, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi ketidakpastian di pasar keuangan global akibat meningkatnya kembali kasus baru Covid-19 di Kawasan Eropa dan AS, isu geopolitik yang meliputi ketegangan hubungan dagang AS dan Tiongkok, isu BREXIT, dan spekulasi terhadap pemilu AS. Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut sempat menahan aliran modal asing yang masuk dan menekan nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Aliran portofolio asing pada akhir triwulan III tahun 2020 mengalami *net outflow* sebesar 0,8 miliar dolar AS.

Namun demikian dari sisi internal, kondisi fundamental perekonomian domestik yang baik dapat menahan pelemahan nilai tukar Rupiah, diantaranya: (i) Daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, (ii) Inflasi yang terjaga pada tingkat yang rendah; serta (iii) Rendahnya defisit transaksi berjalan.

**Gambar 27. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD, 2019-2020**

Sumber: Bloomberg, diolah
catatan: *Update* per September 2020

***Diantara antara negara-negara di kawasan ASEAN nilai tukar riil rupiah (REER) menempati posisi yang relatif rendah sepanjang triwulan III tahun 2020.***

Sepanjang triwulan III tahun 2020 Indeks nilai tukar riil rupiah (*Real Effective Exchange Rate*/REER) mengalami penurunan. Pada Juli-September 2020, indeks nilai tukar Rupiah sebesar 91,4; 89,0; dan 87,7 persen. Secara fundamental REER Indonesia masih berada dibawah nilai wajar (*undervalued*).

**Gambar 28. Real Effective Exchange Rate ASEAN-5, (2010=100)**

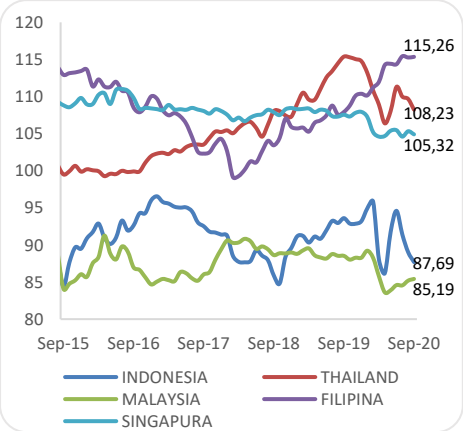


Sumber: Bloomberg, diolah
catatan: *Update* per September 2020

Diantara negara-negara sekawasan di ASEAN, posisi Indonesia berada dibawah Filipina, Thailand, Singapura, namun demikian masih lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Rendahnya REER Indonesia mendorong daya saing perdagangan Indonesia di antara negara-negara di kawasan ASEAN. Nilai REER tertinggi pada akhir triwulan III tahun 2020 dimiliki oleh Filipina sebesar 115,4 perse, disusul Thailand sebesar 108,2, Singapura sebesar 104,9, dan Malaysia sebesar 85,4.

***Kondisi likuiditas yang memadai sepanjang triwulan III tahun 2020 mendorong penurunan suku bunga.***

Sepanjang periode Juli-September 2020, M2 tumbuh sebesar 10,50; 13,3; dan 12,3 persen. Realisasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2019 yang secara berturut-turut sebesar 7,9; 7,1; dan 7,1 persen. Peningkatan M2 didorong kenaikan aktiva luar negeri bersih, dan ekspansi keuangan pemerintah yang tercermin dari pertumbuhan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

Secara berturut-turut pertumbuhan M1 pada triwulan III tahun 2020 sebesar 13,1; 19,3; dan 17,6 persen. Peningkatan pertumbuhan M1 pada awal triwulan III tahun 2020 dipengaruhi peningkatan uang kartal dan giro Rupiah. Selanjutnya, pada Agustus 2020 naiknya simpanan giro Rupiah mendorong kenaikan pertumbuhan M1 secara signifikan. Pada September 2020 uang beredar dalam arti sempit (M1) menurun seiring dengan melambatnya simpanan giro Rupiah.

Pada awal triwulan III tahun 2020 pertumbuhan uang kuasi mengalami kenaikan dan 9,7 persen. Pada Agustus 2020, pertumbuhan uang kuasi

kembali mengalami peningkatan menjadi 11,5 persen. Pertumbuhan uang kuasi menurun pada September 2020 menjadi 10,6 persen. Fluktuasi uang kuasi pada triwulan III tahun 2020 dipengaruhi oleh pergerakan seluruh komponennya, yang terdiri atas simpanan berjangka, tabungan, serta giro valas mempengaruhi.

Longgarnya kondisi likuiditas tersebut mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni 31,2 persen pada September 2020 dan rendahnya rata-rata suku bunga PUAB *overnight*, sekitar 3,3 persen pada September 2020. Kebijakan pelonggaran likuiditas dan penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit pada September 2020 dari 5,5 persen dan 9,9 persen pada Agustus 2020 menjadi 5,2 persen dan 9,9 persen. Imbal hasil SBN 10 tahun tercatat 6,9 persen pada akhir September 2020.

**Gambar 29. Perkembangan Uang Beredar**

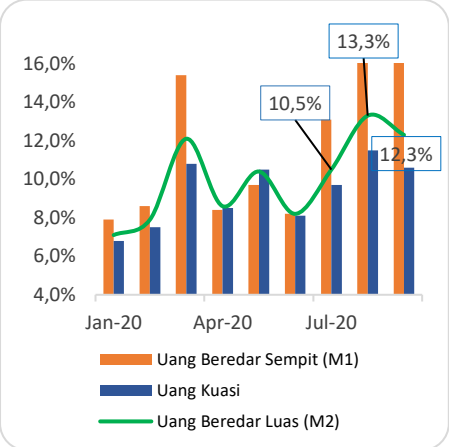


Sumber: Bank Indonesia, diolah

***Sepanjang triwulan III tahun 2020, inflasi mengalami penurunan dan berada dibawah 2 persen.***

Tingkat inflasi tahunan (YoY) pada triwulan III tahun 2020 lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019, dan berada di bawah batas minimal sasaran inflasi 2020 yaitu 2,0 persen (YoY). Secara berturut-turut inflasi pada Juli-September 2020 sebesar 1,5 persen; 1,3 persen; dan 1,4 persen. Selanjutnya, jika dilihat secara bulanan (MtM) pada periode Juli-September 2020 mengalami deflasi, masing-masing mencapai -0,1; -0,1; dan -0,1 persen. Rendahnya inflasi pada triwulan III tahun 2020 utamanya dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah.

**Tabel 24. Tingkat Inflasi Domestik**

| | Q3 2019 | | | Q3 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jul | Agu | Sep | Jul | Agu | Sep |
| YoY | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| MtM | 0,3 | 0,1 | -0,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| YtD | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Penurunan komponen inflasi inti (*core*) pada triwulan III tahun 2020 sejalan dengan perlambatan permintaan global dan domestik akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut memperkuat sinyal terjadinya perlambatan daya beli masyarakat, sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada pada level pesimis (<100). Selama Juli-September 2020

IKK pada masing-masing bulan secara berturut-turut sebesar 86,2; 86,9; dan 84,3.

**Gambar 30. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IKK) dan Inflasi Inti, 2019-2020**

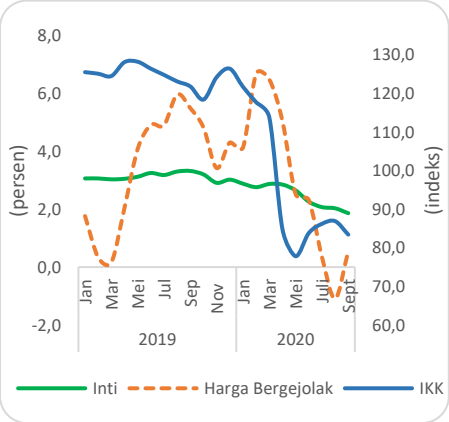


Sumber: BI dan BPS, diolah

Inflasi komponen harga bergejolak (*volatile foods*) sempat mengalami deflasi pada bulan Agustus 2020, dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan yang mulai memasuki masa panen seiring permintaan domestik yang masih lemah. Penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan serta memastikan kelancaran distribusi komoditas strategis agar tetap memadai. Pada Juli-September 2020 secara berturut-turut inflasi *volatile foods* mencapai 0,4 persen; -1,1 persen; dan 0,6 persen.

Inflasi komponen harga diatur pemerintah (*administered prices*) tetap rendah terkendali terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara sejalan dengan penerapan strategi penurunan harga tiket oleh maskapai. Peningkatan jumlah kasus Covid-19 pada bulan September berdampak pada masih rendahnya permintaan akibat tertahannya mobilitas masyarakat.

**Tabel 25. Tingkat Inflasi Domestik Berdasarkan Komponen (YoY)**

| Komponen | Persentase (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Jul | Agu | Sep |
| Inti | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
| Harga Bergejolak | 0,4 | -1,1 | 0,6 |
| Harga diatur pemerintah | 0,7 | 1,0 | 0,6 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**Gambar 31. Perkembangan Indeks Harga Pangan Strategis Nasional, (2018=100)**

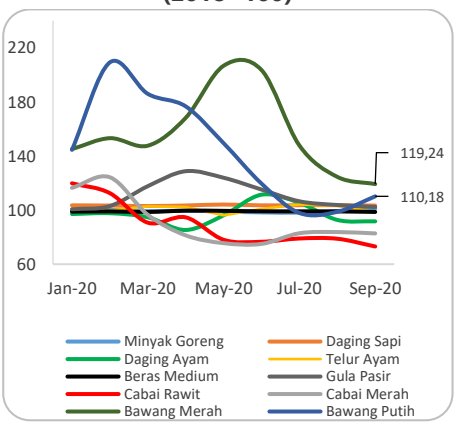


Sumber: PIHPS, diolah

Selanjutnya, perkembangan indeks harga pangan menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas mengalami penurunan. Dua komoditas dengan indeks harga tertinggi adalah bawang merah dan bawang putih, diduga akibat berkurangnya pasokan dalam negeri dan masih tertahannya izin

impor bawang putih pada triwulan III tahun 2020.

**Tabel 26. Inflasi Kelompok Pengeluaran (MtM)**

| Kelompok Pengeluaran | Persentase (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Jul | Agu | Sep |
| UMUM (*headline*) | -0,10 | -0,05 | -0,05 |
| Bahan Makanan | -0,73 | -0,86 | -0,37 |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau | 0,09 | 0,07 | -0,01 |
| Pakaian dan Alas Kaki | -0,01 | 0,02 | 0,07 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan bakar Lainnya | 0,10 | 0,08 | 0,15 |
| Perlengkapan, Peralatan, dam Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 0,29 | 0,06 | 0,16 |
| Kesehatan | -0,17 | -0,14 | -0,33 |
| Transportasi | 0,02 | 0,03 | -0,01 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 0,15 | 0,05 | 0,00 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 0,16 | 0,57 | 0,62 |
| Pendidikan | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran | 0,93 | 2,02 | 0,25 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | -0,10 | -0,05 | -0,05 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sebagian besar kelompok pengeluaran mengalami fluktuasi pada triwulan III tahun 2020. Terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan, yaitu kelompok Pendidikan seiring dengan masa tahun ajaran baru sehingga ada kenaikan biaya sekolah SD hingga SMA maupun akademi/perguruan tinggi.

## Jasa Keuangan

***Sektor jasa keuangan cukup terkendali meskipun masih menghadapi tekanan.***

**Perbankan Konvensional.** Kinerja perbankan secara umum cukup terjaga, meskipun masih menghadapi tantangan besar sebagai dampak dari pelemahan perekonomian akibat Covid-19.

**Gambar 32. Kinerja Perbankan Konvensional**

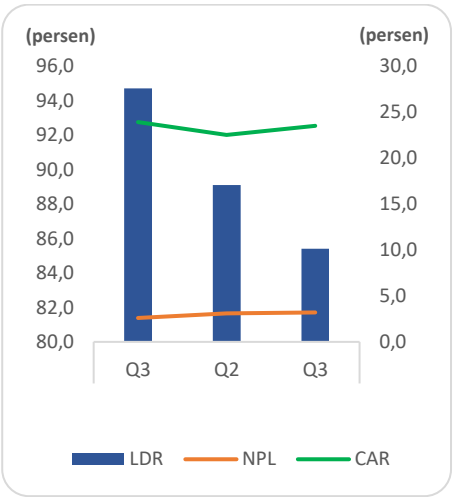


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
Catatan: data Q3 adalah bulan Agustus

Permodalan perbankan masih memadai yang ditunjukan melalui Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) pada bulan Agustus tahun 2020 sebesar 23,5 persen. Meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,9 persen, namun masih berada jauh di atas *threshold* minimum yang ditetapkan yaitu 8 persen. Selanjutnya

dari segi likuiditas, likuiditas perbankan mengalami pelonggaran, yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang menurun. Rasio LDR pada bulan Agustus tahun 2020 sebesar 85,4 persen, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 94,7 persen. Penurunan rasio LDR tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan kredit di tengah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tinggi. Selanjutnya dari segi risiko kredit, meningkatnya rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) juga masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh perbankan. Pada bulan Agustus tahun 2020, rasio NPL sebesar 3,2 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,6 persen. Melemahnya perekonomian masih menjadi faktor utama yang menyebabkan terhambatnya kemampuan debitur untuk membayar kredit.

Sementara itu, total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan justru terus meningkat. Pada bulan Agustus tahun 2020, DPK tumbuh sebesar 11,6 persen (YoY), lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,6 persen (YoY) dan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 7,9 persen (YoY). Peningkatan ini terjadi pada seluruh jenis DPK. Utamanya, pertumbuhan DPK didorong oleh peningkatan pertumbuhan giro dan tabungan yang tinggi yaitu masing-masing tumbuh sebesar 22,4 dan 9,7 persen (YoY). Sementara itu, komponen DPK lainnya yaitu deposito juga mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 7,1 persen (YoY) pada bulan Agustus tahun 2020, meskipun melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,6 persen (YoY), sejalan dengan penurunan suku bunga deposito di seluruh tenor.

**Gambar 33. Perkembangan DPK Perbankan Konvensional**

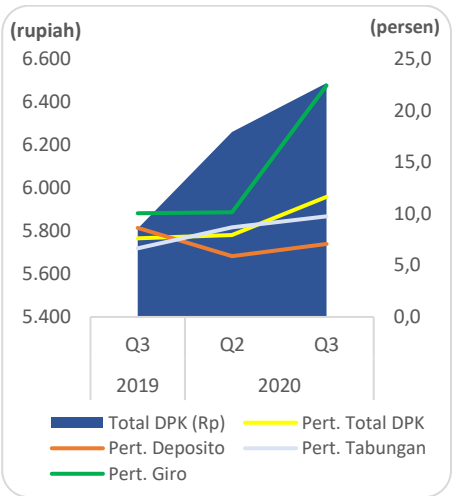


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
Catatan: data Q3 adalah bulan Agustus

Sejalan dengan perlambatan perekonomian, total penyaluran kredit perbankan terus tumbuh melambat. Pada bulan Agustus tahun 2020, total pertumbuhan kredit hanya tumbuh sebesar 1,0 persen (YoY), melambat secara signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 8,6 persen (YoY).

Perlambatan kredit terjadi pada seluruh jenis kredit, dengan pertumbuhan kredit terendah terjadi pada jenis Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu terkontraksi sebesar -1,0 persen pada bulan Agustus tahun 2020. Sementara itu, Kredit Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI) masing-masing masih tumbuh positif meskipun masih sangat rendah, yaitu sebesar 1,0 persen (YoY) dan 4,6 persen (YoY) pada bulan Agustus tahun 2020, lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar 2,3 persen (YoY) dan 5,6 persen (YoY).

**Gambar 34. Perkembangan Kredit Perbankan Konvensional**

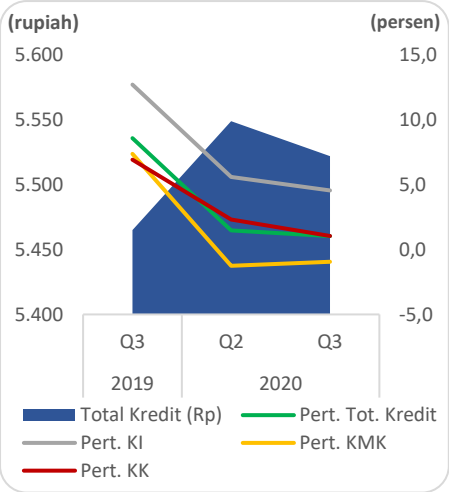


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
Catatan: data Q3 adalah bulan Agustus

Ditinjau dari lapangan usaha penerima kredit, terjadi perlambatan pertumbuhan kredit di sebagian besar sektor ekonomi pada bulan Agustus tahun 2020. Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor yang paling berdampak. Sebesar 25,1 persen total kredit kepada lapangan usaha disalurkan ke sektor tersebut, namun demikian, sektor tersebut justru mengalami kontraksi penyaluran kredit yang cukup besar. Pada bulan Agustus tahun 2020, penyaluran kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran terkontraksi sebesar -5,0 persen (YoY). Selanjutnya, penyaluran kredit kepada lapangan usaha terbesar kedua adalah industri pengolahan. Sekitar 22 persen kredit yang disalurkan perbankan kepada lapangan usaha, disalurkan kepada industri pengolahan. Namun demikian, penyaluran kredit pada sektor tersebut juga hanya tumbuh sebesar 0,1 persen (YoY). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan, antara lain sektor pertambangan dan penggalian serta sektor transportasi dan pergudangan dan komunikasi yang masing-masing tumbuh sebesar 15,0 persen (YoY) dan 13,3 persen (YoY).

**Tabel 27. Perkembangan Kredit Bank Umum Konvensional**

| Penerima Pembiayaan Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| | Q3 | Q2 | Q3* |
| | miliar Rp | | |
| Pertanian, Perburuan dan Kehutanan | 364.925 | 370.141 | 365.080 |
| Perikanan | 13.517 | 13.778 | 13.813 |
| Pertambangan dan Penggalian | 135.661 | 129.722 | 133.521 |
| Industri Pengolahan | 909.124 | 917.459 | 900.067 |
| Listrik, gas dan air | 196.472 | 197.443 | 195.485 |
| Konstruksi | 360.756 | 367.268 | 362.870 |
| Perdagangan Besar dan Eceran | 987.028 | 1.002.342 | 997.224 |
| Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | 105.211 | 106.868 | 107.115 |
| Transportasi, pergudangan dan komunikasi | 226.032 | 232.235 | 236.911 |
| Perantara Keuangan | 240.206 | 243.991 | 242.095 |
| Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 261.064 | 262.477 | 262.892 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 26.393 | 26.617 | 25.778 |
| Jasa Pendidikan | 13.376 | 13.444 | 13.764 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 26.585 | 27.995 | 29.170 |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya | 79.259 | 80.222 | 79.821 |
| Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga | 3.456 | 3.412 | 3.363 |
| Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | 236 | 265 | 272 |
| Kegiatan yang belum jelas batasannya | 1.693 | 1.756 | 1.760 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

*data bulan Agustus

**Kredit Usaha Rakyat (KUR).** Pelemahan perekonomian akibat Covid-19 berdampak kepada seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada tahun 2020, pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp190 triliun, meningkat sebesar Rp50 triliun dari target penyaluran pada tahun 2019. Hingga bulan Agustus tahun 2020, KUR telah disalurkan kepada 3,2 juta debitur, dengan total penyaluran sebesar 110,37 triliun (58,1 persen dari target yang ditetapkan). Meskipun dalam prosesnya, realisasi penyaluran KUR sempat menurun pada bulan Mei tahun 2020 sebagai dampak Covid-19, namun secara bertahap penyaluran KUR mulai kembali meningkat. Peningkatan penyaluran KUR tersebut didorong oleh berbagai kebijakan akomodatif yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, seperti: 1) pemberian subsidi bunga KUR yang diberikan kepada 8,2 juta debitur dengan baki debet Rp198,3 triliun, 2) penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1,46

juta debitur dengan baki debet Rp44,7 triliun, serta 3) relaksasi lain berupa perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,5 juta debitur dengan baki debet Rp43,8 triliun dan penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 15 debitur dengan baki debet Rp2,5 miliar.

Dalam penyalurannya, KUR terbagi menjadi 3 (tiga) skema, yaitu KUR Mikro (pinjaman ≤Rp25 juta), KUR Kecil (pinjaman Rp25 juta – Rp200 juta), dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan skema tersebut, hingga bulan Agustus tahun 2020, KUR Mikro mendominasi total penyaluran KUR yaitu sebesar 64,3 persen, diikuti oleh KUR Kecil yaitu sebesar 35,3 persen, sementara sisanya adalah KUR TKI sebesar 0,4 persen. Jika dilihat penyaluran KUR berdasarkan wilayah, penyaluran masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera, dengan porsi masing-masing sebesar 55,3 persen dan 21,4 persen.

**Pasar Modal.** Setelah sempat membukukan kinerja positif pada triwulan II, pasar modal domestik kembali mengalami pelemahan pada triwulan III tahun 2020. Pelemahan tersebut terjadi seiring dengan gejolak pasar modal yang cukup tajam akibat kembali diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta serta deflasi sebesar 0,1 persen pada bulan September 2020. Akan tetapi, secara umum, stabilitas pasar modal masih terus terjaga di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

**Gambar 35. Perkembangan IHSG dan Nilai Kapitalisasi Pasar Saham**

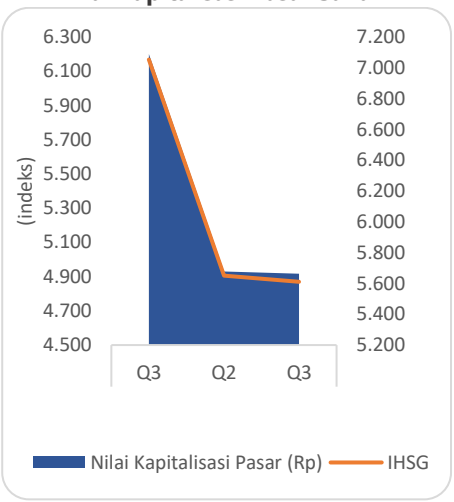


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Pasar saham kembali mengalami tekanan pada triwulan III 2020, yang salah satunya disebabkan oleh aksi jual yang dilakukan oleh investor asing, dengan total *net sell* sebesar Rp27,9 triliun di seluruh pasar. Hal ini tercermin dari melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai kapitalisasi pasar saham. IHSG mengalami kontraksi sebesar 21,1 persen (YoY) ke level Rp4.870,0. Akan tetapi, pelemahan nilai IHSG tersebut relatif masih lebih baik dibandingkan dengan bursa-bursa di Kawasan Asia Tenggara seperti di Filipina dan Singapura. Selanjutnya, sejalan dengan pergerakan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham juga terkontraksi sebesar 20,2 persen (YoY) dan ditutup di level Rp5.662,5 pada akhir triwulan III tahun 2020.

**Gambar 36. Perkembangan Outstanding Obligasi Korporasi**

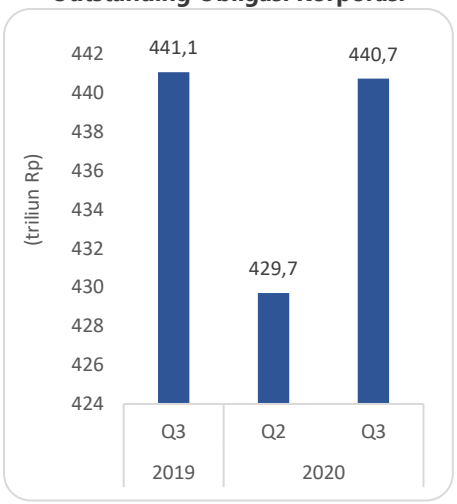


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Pasar obligasi korporasi juga menunjukkan adanya sedikit pelemahan pada triwulan III tahun 2020. Akan tetapi, kinerja pasar obligasi sebenarnya masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III tahun 2020, total nilai obligasi korporasi mencapai Rp440,7 triliun, atau melemah sebesar 0,1 persen (YoY). Secara umum, kondisi ini dipengaruhi oleh faktor likuiditas dan *risk appetite* para investor yang masih cukup fluktuatif di tengah pandemi Covid-19.

**Asuransi.** Kinerja industri asuransi pada triwulan III tahun 2020 kembali mengalami penurunan setelah sempat menunjukkan perbaikan pada triwulan sebelumnya. Penurunan ini utamanya bersumber dari kinerja industri asuransi jiwa yang tertekan cukup tajam akibat sekitar 80 persen asetnya dialokasikan ke dalam instrumen pasar modal. Sentimen negatif yang terjadi pada pasar modal kemudian berimbas pada pelemahan kinerja industri asuransi jiwa. Pada triwulan III tahun 2020, total aset industri asuransi terkontraksi cukup tajam hingga 32,8 persen (YoY). Kontraksi aset tersebut merupakan kontraksi secara *year-on-year* terbesar sepanjang tahun 2020.

**Gambar 37. Perkembangan Aset Industri Asuransi**

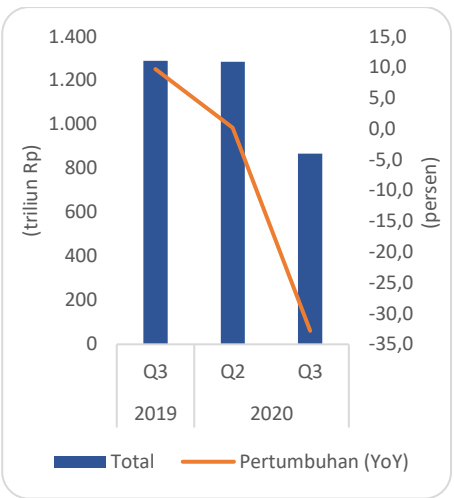


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

**Dana Pensiun.** Berbeda dengan industri asuransi, industri dana pensiun justru kembali menunjukkan perbaikan pada triwulan III tahun 2020. Hal tersebut tercermin dari jumlah investasi dan aset neto dana pensiun yang mengalami pertumbuhan positif. Jumlah investasi pada triwulan III tahun 2020 mencapai Rp284,0 triliun, atau tumbuh sebesar 3,4 persen (YoY). Sementara itu, jumlah aset neto sebesar Rp292,5 triliun atau tumbuh 3,6 persen (YoY).

Peningkatan kinerja Dana Pensiun tersebut salah satunya didukung oleh kebijakan stimulus *life cycle fund* program iuran pasti yang telah diselenggarakan oleh Dana Pensiun.

**Gambar 38. Perkembangan Jumlah Aset Bersih dan Jumlah Investasi Dana Pensiun**

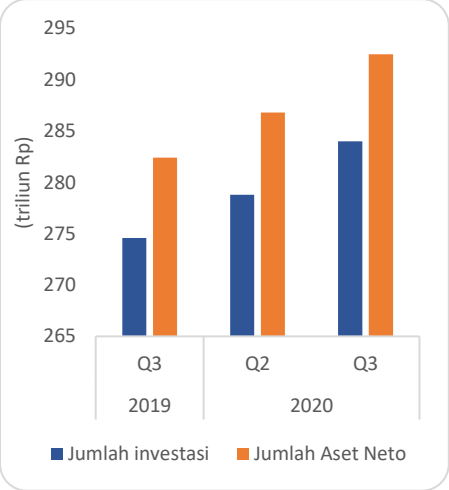


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

**Teknologi Keuangan (*Fintech*).** Pelemahan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19 turut mendorong penurunan kinerja *fintech* di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya tingkat wanprestasi industri fintech atau menurunnya tingkat keberhasilan pinjaman, serta melambatnya pertumbuhan penyaluran pinjaman.

Pada triwulan III tahun 2020, akumulasi jumlah pinjaman tumbuh sebesar 113,1 persen (YoY), atau melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 153,4 persen (YoY). Sejalan dengan peningkatan akumulasi jumlah pinjaman, akumulasi rekening peminjam tumbuh sebesar 104,3 persen (YoY), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 165,6 persen (YoY).

**Gambar 39. Perkembangan Industri Teknologi Keuangan (*peer-to-peer lending*)**

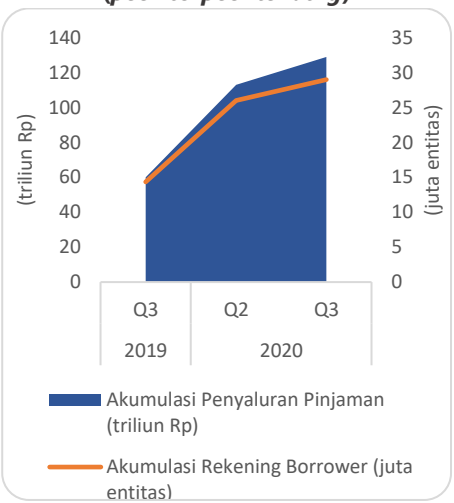


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Perlambatan perekonomian akibat penyebaran Covid-19 mendorong meningkatnya pembiayaan yang bermasalah. Tingkat wanprestasi industri *fintech* terus meningkat, yaitu sebesar 6,1 persen pada triwulan II tahun 2020, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,2 persen. Terhambatnya kemampuan membayar para debitur merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan tingkat pembiayaan bermasalah industri *fintech*.

**Gambar 40. Tingkat Wanprestasi Industri Teknologi Keuangan (*peer-to-peer lending*)**

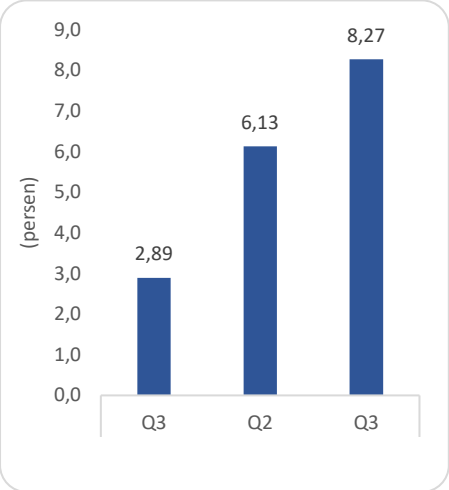


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

**Perbankan Syariah.** Perlambatan ekonomi yang terus berlanjut akibat dari pandemi Covid-19 juga berdampak pada kinerja perbankan Syariah. Meskipun mengalami sedikit perlambatan, kinerja perbankan Syariah masih tetap terjaga.

**Gambar 41. Kinerja Perbankan Syariah**

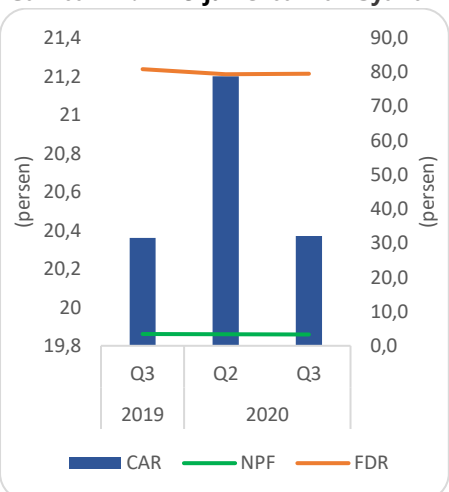


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
*data Q3 adalah bulan Agustus

Pada bulan Agustus tahun 2020, rasio kecukupan modal Bank Umum Syariah (BUS) terjaga pada level yang tinggi yaitu 20,4 persen, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 21,2 persen. Selanjutnya, kinerja positif perbankan Syariah juga tercermin dari meningkatnya kualitas pembiayaan yang disalurkan, atau menurunnya rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/*NPF). Pada bulan Agustus tahun 2020 NPF pada BUS relatif terjaga sebesar 3,3 persen atau turun sebesar 1 basis poin dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara pada Unit Usaha Syariah (UUS), NPF sebesar 3,3 persen pada bulan Agustus tahun 2020, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 sebesar 3,4 persen.

Selanjutnya dari segi likuiditas. Kinerja likuiditas perbankan Syariah pada bulan Agustus tahun 2020 mengalami sedikit pelonggaran baik pada Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana (*Financing to Deposit Ratio*/FDR) pada BUS sebesar 79,6 persen meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 79,4 persen. Sementara FDR UUS tercatat sebesar 100,9 persen, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 104,9 persen.

**Gambar 42. Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, dan Total Aset Perbankan Syariah**

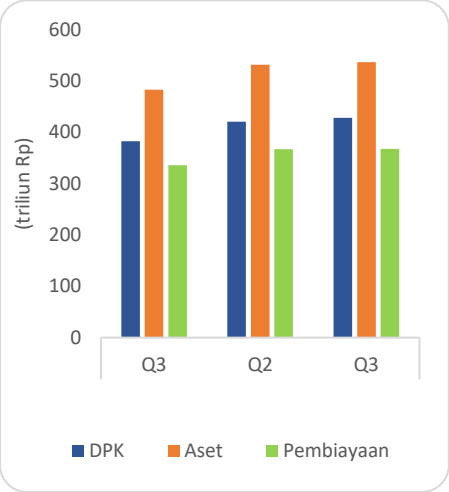


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
*data Q3 adalah bulan Agustus

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Syariah pada bulan Agustus tahun 2020 kembali mengalami peningkatan, hal ini melanjutkan tren positif pada triwulan II 2020. Total DPK yang dihimpun oleh perbankan Syariah (BUS dan UUS) pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp427,8 triliun atau tumbuh sebesar 11,7 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp421,3 triliun. Sementara itu, pembiayaan dan aset perbankan syariah (BUS dan UUS) pada tahun 2020 tetap tumbuh secara konsisten. Total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan Syariah pada bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp368,4 triliun atau tumbuh sebesar 9,5 persen (YoY), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp367 triliun. Total aset perbankan syariah pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp536,8 triliun, meningkat 11,1 persen (YoY).

Berdasarkan jenis penggunaannya, pembiayaan perbankan Syariah masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi, yaitu sebesar Rp.170,3 triliun. Selain mendominasi, pembiayaan konsumsi juga mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,8 persen (YoY). Sementara pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing sebesar Rp113,1 triliun dan Rp85,1 triliun, atau tumbuh masing-masing sebesar 8,0 persen dan 3,7 persen (YoY).

**Tabel 28. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah**

| Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| | Q3 | Q2 | Q3* |
| | triliun Rp | | |
| Pembiayaan Investasi | 84,3 | 86,8 | 85,1 |
| Pembiayaan Modal Kerja | 107,6 | 114,6 | 113,1 |
| Pembiayaan Konsumsi | 152,0 | 165,6 | 170,3 |
| Total Pembiayaan | 343,7 | 367,0 | 368,5 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
*data bulan Agustus

Sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor konstruksi masih mendominasi dari triwulan I hingga triwulan III tahun 2020, dengan nilai penyaluran pembiayaan masing-masing sebesar Rp38,5 triliun dan Rp33,7 triliun, atau berkontribusi masing-masing sebesar 19,4 persen dan 17,0 persen terhadap total pembiayaan. Selain mendominasi,

kedua sektor tersebut juga mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp37,7 triliun dan Rp33,0 triliun. Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan sektor dengan penyaluran pembiayaan yang tergolong rendah menjadi sebesar Rp17,0 miliar pada triwulan III tahun 2020.

Pertumbuhan pembiayaan perbankan Syariah tidak terjadi di seluruh sektor ekonomi, terdapat enam sektor yang mengalami penurunan penyaluran pembiayaan, antara lain: 1) listrik, gas dan air, 2) perantara keuangan, 3) *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, 4) administrasi instansi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, 5) jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya serta 6) sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 20,78 persen; 11,82 persen; 1,98 persen; 15,56 persen; 41,17 persen; dan 39,34 persen (YoY).

**Tabel 29. Penyaluran Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha**

| Penerima Pembiayaan Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| | Q3 | Q2 | Q3* |
| | miliar Rp | | |
| Pertanian, Perburuan dan Kehutanan | 12.940 | 14.477 | 16.009 |
| Perikanan | 1.192 | 1.736 | 1.817 |
| Pertambangan dan Penggalian | 5.819 | 6.042 | 6.107 |
| Industri Pengolahan | 25.657 | 27.064 | 26.989 |
| Listrik, gas dan air | 14.609 | 15.541 | 11.573 |
| Konstruksi | 27.984 | 32.961 | 33.675 |
| Perdagangan Besar dan Eceran | 34.242 | 37.741 | 38.491 |
| Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | 4.509 | 4.938 | 5.059 |
| Transportasi, pergudangan dan komunikasi | 9.034 | 10.846 | 11.713 |
| Perantara Keuangan | 18.035 | 18.075 | 15.903 |
| Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 13.057 | 12.912 | 12.799 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 20 | 15 | 17 |
| Jasa Pendidikan | 6.198 | 6.333 | 6.332 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5.962 | 6.241 | 5.989 |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya | 6.258 | 4.611 | 3.681 |
| Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga | 1.101 | 711 | 668 |
| Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya | 0 | 2 | 0 |
| Kegiatan yang belum jelas batasannya | 235 | 1.195 | 1.267 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
*data bulan Agustus

**Pasar Modal Syariah.** Tren positif pasar modal syariah pada triwulan II tahun 2020 terus berlanjut di triwulan III tahun 2020 setelah sebelumnya mengalami tekanan yang cukup kuat pada triwulan I tahun 2020. Penguatan tersebut didorong oleh membaiknya respon pasar atas kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Index Saham Syariah *bluechip* yaitu *Jakarta Islamic Index* (JII), Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan *Jakarta Islamic Index 70* (JII 70) pada triwulan III tahun 2020 masing-masing mengalami penguatan yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kapitalisasi pasar sebesar Rp1.834 triliun, Rp.2.926 triliun dan Rp2.189 triliun. Namun demikian, angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 13,7 persen, 22,9 persen, dan 21,5 persen (YoY).

**Gambar 43. Kapitalisasi Pasar Saham ISSI, JII dan JII70**

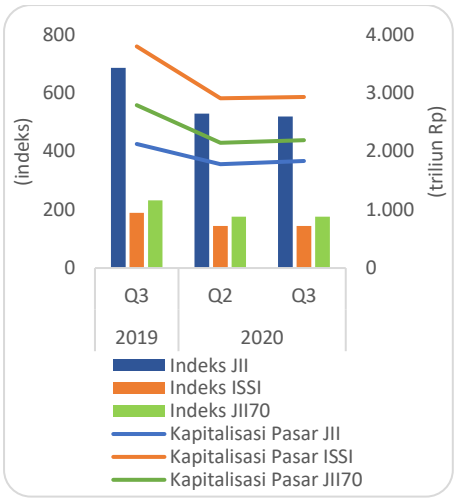


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Selain pasar saham, pasar sukuk juga mengalami tekanan yang cukup besar di tengah pandemi Covid-19 khususnya sukuk korporasi. Namun demikian, setelah mengalami penurunan pada triwulan II tahun 2020 performa sukuk korporasi kembali menguat dengan meyakinkan menjadi sebesar Rp31,1 triliun, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp29,4 triliun. Berbeda dengan sukuk korporasi, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di masa pandemi ini justru terus mengalami perkembangan yang positif secara konsisten. Pada triwulan III tahun 2020, *outstanding* SBSN mencapai sebesar Rp617,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp579,3 triliun.

**Gambar 44. *Outstanding* Sukuk Korporasi**

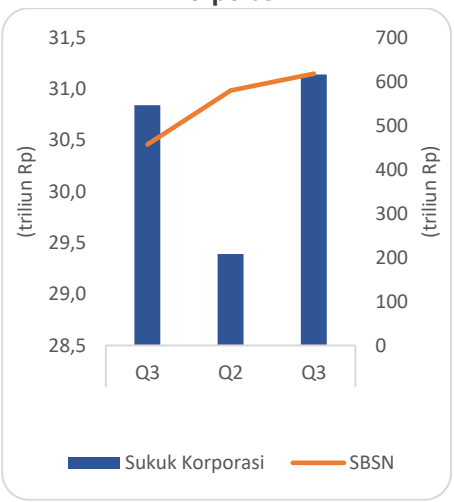


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan DJPR Kemenkeu

**Industri Keuangan Nonbank Syariah (IKNBS)**. Pada triwulan III tahun 2020, Industri Keuangan Nonbank Syariah (IKNBS) secara umum menunjukkan tren positif di tengah perlambatan ekonomi akibat dampak Covid-19. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset IKNBS, yaitu sebesar 5.9 persen (YoY).

**Tabel 30. Aset IKNB Syariah 2019 – 2020**

| Uraian | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| | Q3 | Q2 | Q3* |
| | miliar Rp | | |
| Asuransi Syariah | 44.411 | 40.841 | 41.700 |
| Lembaga Pembiayaan Syariah | 27.010 | 24.771 | 24.528 |
| Dana Pensiun Syariah | 4.127 | 6.728 | 6.026 |
| Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah | 28.155 | 35.395 | 37.503 |
| Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 403 | 474.66 | 474,66 |
| Financial Teknologi Syariah | - | 43,28 | 61,89 |
| Total Aset | 104,107 | 107.216 | 110.294 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan
*data bulan Juli

Jika ditinjau lebih lanjut, Dana Pensiun Syariah mengalami pertumbuhan total aset yang tertinggi, yaitu sebesar 46,0 persen (YoY). Perkembangan positif dana pensiun tersebut disebabkan oleh belum terjadinya penarikan manfaat oleh nasabah secara masif, meskipun telah terjadi PHK massal dalam kondisi Covid 19. Selanjutnya, Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga tumbuh tinggi, yaitu masing masing sebesar 33,2 dan 17,8 persen (YoY). Sementara itu, industri asuransi Syariah dan lembaga pembiayaan Syariah terkontraksi masing masing sebesar 6,1 dan 9,2 persen (YoY).

## 2.5 Neraca Pembayaran

***Neraca Pembayaran Indonesia mengalami surplus.***

Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan III tahun 2020 surplus sebesar USD2,1 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Menurunnya surplus tersebut didorong oleh neraca transaksi modal dan finansial yang menurun signifikan karena investasi portofolio yang berbalik arah menjadi defisit USD1,9 miliar.

**Gambar 45. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia**

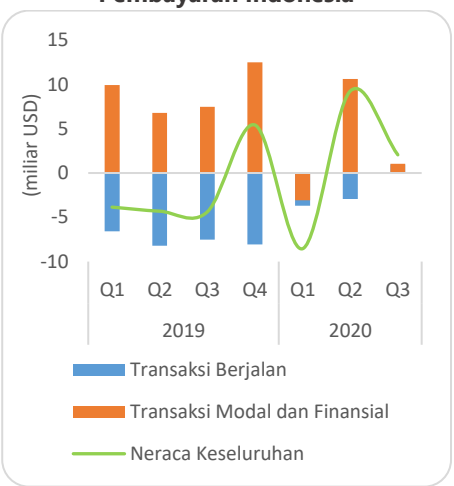


Sumber: Bank Indonesia

Neraca transaksi berjalan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir mengalami surplus sebesar USD1,0 miliar pada triwulan III tahun 2020 atau setara dengan 0,36 persen dari PDB. Pencapaian ini didorong kuat oleh peningkatan ekspor barang yang tinggi sementara itu impor barang terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya.

Surplus neraca barang pada triwulan III tahun 2020 mencapai sebesar USD9,8 miliar, meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar USD4,0 miliar. Peningkatan surplus tersebut disebabkan oleh naiknya surplus neraca barang nonmigas, sementara itu neraca barang migas terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Seiring perbaikan pertumbuhan ekonomi global secara gradual, terutama pada negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan Tiongkok mendorong naiknya volume perdagangan dan harga komoditas ekspor.

Sejalan dengan permintaan ekspor dan domestik yang meningkat, impor nonmigas mulai menunjukkan kenaikan terbatas. Perbaikan lebih lanjut juga berasal dari defisit neraca migas yang mengecil, didorong oleh peningkatan ekspor minyak seiring dengan peningkatan harga minyak global dan volume ekspor.

***Surplus neraca jasa perjalanan masih mengalami penurunan signifikan.***

Neraca jasa pada triwulan III tahun 2020 mengalami defisit sebesar USD2,6 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai USD2,2 miliar. Peningkatan defisit ini terutama dipengaruhi oleh defisit neraca jasa perjalanan yang masih menurun signifikan akibat kebijakan pelarangan penerbangan internasional dalam rangka mencegah perluasan penyebaran Covid-19 dan juga masih defisitnya neraca jasa transportasi seiring meningkatnya ekspor barang.

**Gambar 46. Neraca Jasa Perjalanan dan Transportasi**

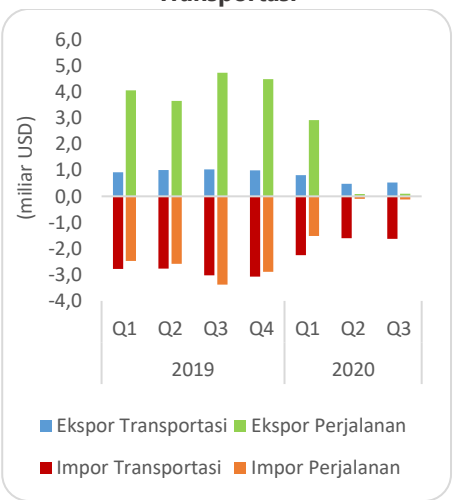


Sumber: Bank Indonesia

Pada kondisi normal, neraca jasa perjalanan selalu mengalami surplus, namun akibat pandemi Covid-19, neraca jasa perjalanan mengalami defisit sebesar USD23 juta. Defisit neraca jasa perjalanan tersebut

dipengaruhi oleh penurunan ekspor perjalanan yang lebih dalam dibandingkan impor perjalanan seiring dengan rendahnya wisatawan mancanegara yang hanya mencapai 476 ribu kunjungan selama triwulan III tahun 2020.

Sementara itu, kinerja neraca jasa transportasi mengalami defisit pada triwulan III tahun 2020, terutama disebabkan oleh pembayaran jasa *freight* menjadi sebesar USD1,4 miliar. Selain itu, defisit jasa transportasi penumpang juga mengalami penurunan menjadi USD14,0 juta, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang defisit sebesar USD10 juta, sejalan dengan turunnya kunjungan wisatawan nasional ke luar negeri.

***Neraca pendapatan primer menurun, neraca pendapatan sekunder stabil***.

Defisit neraca pendapatan primer pada triwulan III tahun 2020 sebesar USD7,6 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai USD6,2 miliar. Peningkatan defisit neraca pendapatan primer didorong oleh peningkatan pembayaran hasil investasi langsung, serta peningkatan penerimaan investasi langsung dan portofolio. Lebih lanjut, peningkatan pembayaran sejalan dengan mulai membaiknya perekonomian domestik sejak meluasnya pandemi Covid-19. Di saat yang bersamaan, penerimaan pendapatan hasil investasi juga sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya.

**Gambar 47. Neraca Pendapatan Primer dan Sekunder**

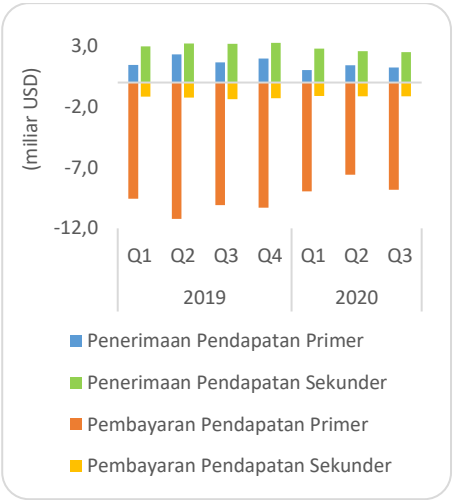


Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, neraca pendapatan sekunder pada triwulan III tahun 2020 mengalami surplus sebesar USD1,4 miliar, capaian ini relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, capaian ini cenderung masih lebih rendah dibandingkan biasanya didorong oleh realisasi penerimaan transfer personal dalam bentuk remitansi yang menurun. Hal ini sejalan dengan turunnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri akibat Covid-19.

***Likuiditas global menurun, investasi menurun.***

Transaksi modal dan finansial pada triwulan III tahun 2020 mencapai surplus yang sebesar USD1.0 miliar,

menurun signifikan dibandingkan triwulannya sebesar USD10.6 miliar. Menurunnya surplus pada transaksi modal dan finansial utamanya ditopang oleh dinamika penyesuaian aliran modal global. Lebih lanjut, menurunnya surplus juga merupakan dampak ketidakpastian di pasar keuangan global yang kemudian memicu aliran keluar modal investasi portofolio dari pasar keuangan domestik, terutama dalam bentuk instrumen saham.

**Gambar 48. Neraca Transaksi Finansial**

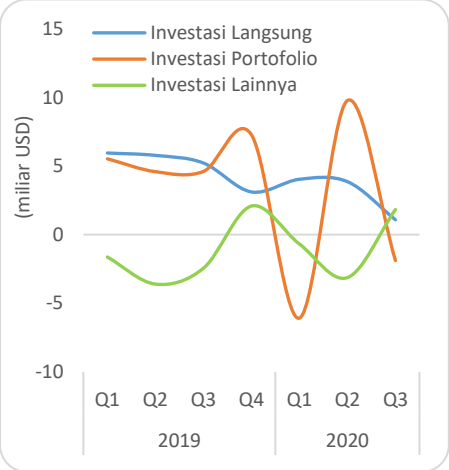


Sumber: Bank Indonesia

Kinerja investasi portofolio neto pada triwulan III tahun 2020 defisit USD1,9 miliar, berbalik arah dari surplus triwulan sebelumnya sebesar USD9,8 miliar. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh arus keluar investasi portofolio di sisi kewajiban sebesar USD1,7 miliar. Hal ini seiring meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan. Sementara itu, di sisi aset, penduduk Indonesia melakukan pembelian neto surat berharga di luar negeri (*outflow*) sebesar USD0,2 miliar, relatif sama dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan III tahun 2020, investasi langsung mampu mencatat arus masuk neto USD1,1 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai USD3,9 miliar. Rendahnya investasi langsung didorong oleh masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global dan lesunya aktivitas ekonomi akibat pembatasan kegiatan untuk mencegah perluasan pandemi Covid-19.

Posisi cadangan devisa mengalami kenaikan pada triwulan III tahun 2020 menjadi sebesar USD135,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan. Dengan demikian, berbagai indikator NPI secara umum masih menunjukkan sustainabilitas eksternal yang terjaga.

**Tabel 31. Neraca Pembayaran**

Tahun 2015 – Triwulan III/2020

(miliar USD)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019:1 | 2019:2 | 2019:3 | 2019:4 | 2020:1 | 2020:2 | 2020:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSAKSI BERJALAN | -17,5 | -17,0 | -16,2 | -30,6 | -6,6 | -8,2 | -7,5 | -8,1 | -3,7 | -2,9 | 1,0 |
| BARANG | 14,0 | 15,3 | 18,8 | -0,2 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | 0,3 | 4,4 | 4,0 | 9,8 |
| Ekspor | 149,1 | 144,5 | 168,9 | 180,7 | 41,2 | 40,2 | 43,7 | 43,4 | 41,7 | 34,6 | 40,8 |
| Impor | -135,1 | -129,2 | -150,1 | -181,0 | -39,9 | -39,6 | -42,3 | -43,1 | -37,3 | -30,7 | -31,0 |
| Barang Dagangan Umum | 13,3 | 14,7 | 17,9 | -0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 3,1 | 2,5 | 8,7 |
| Ekspor | 147,7 | 143,1 | 167,0 | 178,7 | 40,4 | 39,4 | 42,5 | 42,7 | 40,0 | 33,0 | 39,2 |
| Impor | -134,4 | -128,4 | -149,1 | -178,9 | -39,6 | -39,2 | -41,8 | -42,7 | -36,9 | -30,5 | -30,5 |
| a. Nonmigas | 19,0 | 19,5 | 25,3 | 11,2 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 5,8 | 3,3 | 9,4 |
| Ekspor | 130,5 | 130,2 | 151,4 | 161,1 | 37,4 | 36,4 | 39,5 | 39,7 | 37,7 | 31,2 | 37,2 |
| Impor | -111,5 | -110,7 | -126,2 | -149,9 | -34,5 | -33,3 | -36,7 | -36,5 | -31,9 | -27,9 | -27,8 |
| b. Migas | -5,7 | -4,8 | -7,3 | -11,4 | -2,1 | -2,9 | -2,1 | -3,2 | -2,7 | -0,8 | -0,7 |
| Ekspor | 17,2 | 12,9 | 15,6 | 17,6 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | 2,0 |
| Impor | -22,9 | -17,7 | -22,9 | -29,0 | -5,2 | -5,8 | -5,1 | -6,2 | -5,0 | -2,6 | -2,7 |
| Barang Lainnya | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 1,1 |
| Ekspor | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Impor | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -2,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | -0,5 |
| JASA-JASA | -8,7 | -7,1 | -7,4 | -6,5 | -1,5 | -1,9 | -2,3 | -2,0 | -1,9 | -2,2 | -2,6 |
| Ekspor | 22,2 | 23,3 | 25,3 | 31,2 | 7,5 | 7,4 | 8,4 | 8,3 | 6,1 | 2,6 | 2,8 |
| Impor | -30,9 | -30,4 | -32,7 | -37,7 | -9,0 | -9,3 | -10,7 | -10,3 | -8,0 | -4,8 | -5,4 |
| PENDAPATAN PRIMER | -28,4 | -29,6 | -32,1 | -30,8 | -8,1 | -8,9 | -8,4 | -8,3 | -7,9 | -6,2 | -7,6 |
| PENDAPATAN SEKUNDER | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,9 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
| TRANSAKSI MODAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSAKSI FINANSIAL | 16,8 | 29,3 | 28,7 | 25,1 | 9,9 | 6,8 | 7,4 | 12,5 | -3,1 | 10,6 | 1,0 |
| Aset | -21,5 | 15,9 | -18,4 | -19,2 | -6,8 | -3,8 | -3,8 | -0,5 | -4,9 | -1,3 | -2,3 |
| Kewajiban | 38,3 | 13,4 | 47,1 | 44,3 | 16,8 | 10,6 | 11,2 | 13,0 | 1,9 | 11,9 | 3,3 |
| INVESTASI LANGSUNG | 10,7 | 16,1 | 18,5 | 12,5 | 5,9 | 5,8 | 5,2 | 3,1 | 4,0 | 3,9 | 1,1 |
| Aset | -9,1 | 11,6 | -2,0 | -6,4 | -0,8 | -1,6 | -0,6 | -1,4 | -0,7 | -0,7 | -2,8 |
| Kewajiban | 19,8 | 4,5 | 20,5 | 18,9 | 6,8 | 7,4 | 5,8 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 3,9 |

**Lanjutan Tabel 27 Neraca Pembayaran**

Tahun 2015 – Triwulan III/2020

(miliar USD)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019:1 | 2019:2 | 2019:3 | 2019:4 | 2020:1 | 2020:2 | 2020:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTASI PORTFOLIO | 16,2 | 19,0 | 21,1 | 9,3 | 5,5 | 4,6 | 4,6 | 7,3 | -6,1 | 9,8 | -1,9 |
| Aset | -1,3 | 2,2 | -3,4 | -5,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| Kewajiban | 17,5 | 16,8 | 24,4 | 14,5 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 6,9 | -6,0 | 10,0 | -1,7 |
| DERIVATIF FINANSIAL | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,1 | 0,0 |
| INVESTASI LAINNYA | -10,1 | -5,8 | -10,7 | 3,3 | -1,6 | -3,6 | -2,5 | 2,1 | -0,7 | -3,1 | 1,8 |
| **TOTAL** | **-0,7** | **12,4** | **12,5** | **-5,4** | **3,4** | **-1,4** | **0,0** | **4,4** | **-6,8** | **7,7** | **2,0** |
| **NERACA KESELURUHAN** | **-1,1** | **12,1** | **11,6** | **-7,1** | **-3,9** | **-4,3** | **-4,4** | **5,4** | **-8,5** | **9,2** | **2,1** |
| Posisi Cadangan Devisa | 105,9 | 116,4 | 130,2 | 120,7 | 124,5 | 123,8 | 124,3 | 129,2 | 121,0 | 131,7 | 135,2 |
| Dalam Bulan Impor | 7,4 | 8 | 8 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 7,0 | 8,1 | 9,1 |
| Transaksi Berjalan/PDB (%) | -2,03 | -2 | -2 | -3,7 | -2,5 | -3,0 | -2,6 | -2,8 | -1,3 | -1,2 | 0,4 |

Sumber: Bank Indonesia, diolah

## Neraca Perdagangan

***Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus didorong peningkatan ekspor yang lebih tinggi.***

Pada triwulan III tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD7,9 miliar dengan ekspor total sebesar USD40,7 miliar dan impor total sebesar USD32,7 miliar. Ekspor total dan impor total mengalami penurunan secara tahunan, namun mengalami kenaikan secara triwulanan. Neraca perdagangan ekspor meningkat sebesar 17,7 persen (QtQ) dan menurun 6,5 persen (YoY), sedangkan, neraca perdagangan impor meningkat sebesar 3,3 persen (QtQ) dan menurun 25,4 persen (YoY). Kenaikan ekspor total maupun impor total secara QtQ tersebut disebabkan adanya peningkatan pada ekspor migas dan non migas, disertai kenaikan pada impor migas dan non migas.

**Tabel 32. Neraca Perdagangan**

| Uraian | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| | Q3 | Q2 | Q3 |
| | juta USD | | |
| Neraca Total | -370,8 | 2.892,6 | 7.982,2 |
| Ekspor Total | 43.580,5 | 34.626,8 | 40.759,0 |
| Impor Total | 43.951,3 | 31.734,2 | 32.776,8 |
| Neraca Nonmigas | 1.553,3 | 3.383,7 | 9.117,0 |
| Ekspor Nonmigas | 40.534,1 | 32.932,9 | 38.812,8 |
| Impor Nonmigas | 38.980,8 | 29.549,2 | 29.695,8 |
| Neraca Migas | -1.924,1 | -495,2 | -1.134,8 |
| Ekspor Migas | 3.046,4 | 1.693,8 | 1.946,2 |
| Impor Migas | 4.970,5 | 2.188,9 | 3.081,0 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

### Neraca perdagangan migas

Pada triwulan III tahun 2020, defisit neraca perdagangan migas mengalami peningkatan menjadi USD1,1 miliar dimana ekspor migas Indonesia mengalami kontraksi sebesar 36,1 persen (QtQ) dan sebesar 30,3 persen (YoY). Seiring dengan tertekannya perekonomian domestik akibat pandemi Covid-19, impor migas Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 38,0 persen (QtQ) dan 30,8 persen (YoY).

**Tabel 33. Nilai Ekspor dan Impor Migas**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (juta USD) | *Growth* (%) | | *Share* thd Total* (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Ekspor Migas | 1.946,2 | -36,1 | -30,3 | 4,8 |
| Minyak Mentah | 393,3 | -4,4 | -68,1 | 1,0 |
| Hasil Minyak | 411,8 | -35,8 | 15,2 | 1,0 |
| Gas | 1.141,1 | -42,8 | -29,6 | 2,8 |
| Impor Migas | 3.081,0 | -38,0 | -30,8 | 9,4 |
| Minyak Mentah | 738,3 | -43,4 | -26,0 | 2,3 |
| Hasil Minyak | 1.823,6 | -41,6 | -39,3 | 5,6 |
| Gas | 519,1 | -4,0 | 3,4 | 1,6 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**share* terhadap total ekpor/impor

### Neraca perdagangan Nonmigas

Pada triwulan III tahun 2020, ekspor Nonmigas mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II tahun 2020, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2019. Impor nonmigas mengalami penurunan dibandingkan triwulan II tahun 2020 maupun

triwulan III tahun 2019. Pada triwulan III tahun 2020, neraca perdagangan Nonmigas mengalami surplus sebesar USD9,1 miliar dengan ekspor Nonmigas sebesar USD38,8 miliar, dan impor Nonmigas sebesar USD29,7 miliar.

**Neraca perdagangan ekspor nonmigas**

Nilai ekspor nonmigas didorong oleh nilai ekspor pada industri pengolahan, pertambangan dan lainnya, serta pertanian dengan nilai ekspor masing-masing sebesar USD33,6 miliar, USD4,1 miliar, dan USD1,1 miliar. Berdasarkan golongan barang HS 2 digit, nilai ekspor Nonmigas terutama didukung oleh nilai ekspor pada golongan lemak dan minyak hewan/nabati.

**Tabel 34. Nilai Ekspor Nonmigas berdasarkan Sektor**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (juta USD) | *Growth* (%) | | *Share* thd Total* (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Ekspor Nonmigas | 38.812,8 | 17,9 | -4,2 | 95,2 |
| Pertanian | 1107,3 | 38,9 | 9,8 | 2,7 |
| Industri Pengolahan | 33.600,3 | 21,0 | 0.0 | 82,4 |
| Pertambangan dan lainnya | 4.105,2 | -6,2 | -30,9 | 10,1 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

**share* terhadap total ekpor

Apabila dilihat perkembangannya, berdasarkan sektornya, ekspor nonmigas meningkat sebesar 17,9 persen (QtQ) dan menurun sebesar 4,2 persen (YoY). Peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan pada ekspor pertanian dan industri pengolahan. Sedangkan penurunan secara YoY terutama disebabkan adanya penurunan yang dalam pada ekspor pertambangan dan lainnya. Ekspor pertambangan dan lainnya mengalami kontraksi sebesar 6,2 persen (QtQ) dan 30,9 persen (YoY).

Berdasarkan 10 golongan barang dengan HS 2 digit, secara triwulanan, hampir seluruh golongan barang baik pada sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, dan sektor pertanian mengalami peningkatan. Hanya golongan bahan bakar mineral dan alas kaki yang mengalami penurunan pada triwulan III tahun 2020 dibandingkan triwulan II tahun 2020.

**Tabel 35. Nilai Ekspor Nonmigas 10 Golongan Barang HS 2 Digit Terbesar**

| Kode HS: Uraian | Nilai Q2 2020 (juta USD) | *Growth* (%) | | *Share* thd Ekspor Nonmigas (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| 15 Lemak & minyak hewan/nabati | 4.909,1 | 18,3 | 13,7 | 12,6 |
| 27 Bahan bakar mineral | 3.424,6 | -39,0 | -36,9 | 8,8 |
| 72 Besi dan Baja | 2.747,9 | 20,4 | 38,3 | 7,1 |
| 71 Perhiasan / Permata | 2.607,9 | 26,9 | 26,2 | 6,7 |
| 85 Mesin/peralatan listrik | 2.429,4 | 35,6 | 3,0 | 6,3 |
| 87 Kendaraan dan Bagiannya | 1.600,6 | 97,7 | -32,8 | 4,1 |
| 64 Alas Kaki | 1.006,7 | -13,1 | -4,7 | 2,6 |
| 62 Pakaian jadi bukan rajutan | 988,4 | 39,3 | -18,9 | 2,5 |
| 61 Barang – barang rajutan | 971,1 | 49,7 | -5,9 | 2,5 |
| 26 Bijih, Kerak, dan Abu Logam | 810,3 | 35,8 | 15,3 | 2,1 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Secara tahunan, pada triwulan III tahun 2020, ekspor nonmigas berdasarkan golongan barang HS 2 digit mengalami peningkatan pada golongan lemak dan minyak hewan/nabati; besi dan baja; perhiasan/permata; mesin/peralatan listrik; dan bijih, kerak, dan abu logam yang tumbuh masing-masing sebesar 13,7; 38,3; 26,2; 3,0; dan 15,3 persen (YoY).

***Negara tujuan ekspor nonmigas terbesar adalah ASEAN, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.***

Pada triwulan III tahun 2020, Asean, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa merupakan negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dengan nilai masing-masing sebesar USD7,9 miliar, USD7,6 miliar, USD4,9 miliar, USD3,0 miliar, dan USD3,0 miliar. Secara triwulanan, nilai ekspor nonmigas kepada negara-negara tersebut mengalami peningkatan. Namun secara tahunan, ekspor nonmigas ke negara Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa mengalami penurunan, masing-masing sebesar 12,5 persen, 17,3 persen, dan 10,8 persen.

Ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok mengalami pertumbuhan sebesar 11,1 persen (QtQ) dan 9,5 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan ekspor besi dan baja sebesar 125,0 (YoY), kertas/karton sebesar 263,3 persen (YoY), dan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 5,5 persen (YoY)[2].

**Tabel 36. Nilai Ekspor Nonmigas di Beberapa Negara Mitra Dagang Utama**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (juta USD) | Growth (%) | | Share thd Ekspor Nonmigas (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Tiongkok | 7.616,8 | 11,1 | 9,5 | 20,8 |
| Jepang | 3.095,6 | 8,2 | -12,5 | 8,7 |
| Amerika Serikat | 4.916,5 | 30,7 | 5,4 | 11,4 |
| India | 2.407,9 | 35,4 | -13,8 | 5,4 |
| Australia | 657,2 | 5,4 | 10,9 | 1,9 |
| Korea Selatan | 1.282,7 | -4,4 | -12,1 | 4,1 |
| Taiwan | 979,2 | 11,3 | -9,8 | 2,7 |
| ASEAN | 7.945,7 | 23,7 | -17,3 | 19,5 |
| Singapura | 2.114,7 | 12,6 | -19,8 | 5,7 |
| Malaysia | 1.649,8 | 27,7 | -14,5 | 3,9 |
| Thailand | 1.035,8 | 16,7 | -28,3 | 2,7 |
| Uni Eropa | 3.076,3 | 4,2 | -10,8 | 8,9 |
| Jerman | 592,0 | 13,2 | -3,5 | 1,6 |
| Belanda | 730,6 | -1,3 | 5,9 | 2,2 |
| Italia | 385,7 | -2,9 | 1,1 | 1,2 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, ekspor nonmigas ke Amerika Serikat juga meningkat sebesar 30,7 persen (QtQ) dan 5,4 persen (YoY). Namun demikian, terdapat beberapa golongan barang nonmigas yang mengalami peningkatan ekspor ke Amerika Serikat, antara lain ekspor mesin/peralatan listrik dan ekspor perhiasan/permata yang meningkat

[2] Dihitung melalui proksi data impor Tiongkok dan Amerika Serikat, sumber: Trademap (2020).

masing-masing sebesar 77,9 persen (YoY) dan 110,3 persen (YoY)[2].

**Neraca Perdagangan Impor Nonmigas**

***Total impor Indonesia turun 16,5 persen (YoY) menjadi USD29,6 miliar.***

Berdasarkan penggunaan barang, pada triwulan III tahun 2020 terjadi kenaikan pada bahan baku/penolong sebesar 1,7 persen (QtQ) dan barang modal sebesar 14,9 (QtQ). Sedangkan secara tahunan, penurunan impor terjadi pada semua jenis barang. Penurunan impor tertinggi terjadi pada impor bahan baku/penolong yang menurun sebesar 26,4 persen (YoY); diikuti oleh penurunan impor barang modal sebesar 24,9 persen (YoY); serta penurunan impor barang konsumsi sebesar 19,1 persen (YoY). Penurunan yang tinggi pada impor ketiga jenis barang tersebut menunjukkan tertekannya perekonomian domestik pada masa pandemi.

**Tabel 37. Nilai Impor berdasarkan Golongan Penggunaan Barang**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (juta USD) | *Growth* (%) | | *Share* thd Total(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Impor Total | 32.776,8 | 3,3 | -25.4 | 100,0 |
| Barang Konsumsi | 3.426,8 | -3,7 | -19.1 | 10,5 |
| Bahan Baku / Penolong | 23.455,3 | 1,7 | -26.4 | 71,6 |
| Barang Modal | 5.894,7 | 14,9 | -24,9 | 18,0 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

***Impor nonmigas didorong golongan Mesin /Pesawat Mekanik serta Mesin/Peralatan Listrik.***

Pada triwulan III tahun 2020, impor nonmigas golongan mesin-mesin/pesawat mekanik serta mesin/peralatan listrik merupakan impor nonmigas tertinggi dengan masing-masing mencapai USD5,1 miliar dan USD4,9 miliar. Kedua golongan nonmigas tersebut memiliki peran 33,8 persen terhadap total impor nonmigas. Secara triwulanan, kedua golongan barang tersebut meningkat, namun secara tahunan menurun.

**Tabel 38. Nilai Impor Nonmigas 10 Golongan Barang HS 2 Digit Terbesar**

| Kode HS: Uraian | Nilai Q3 2020 (juta USD) | *Growth* (%) | | *Share* thd Impor Nonmigas (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| 84 : Mesin-mesin/Pesawat Mekanik | 5.111,2 | 6,3 | -30,6 | 17,2 |
| 85 : Mesin/Peralatan Listrik | 4.917,9 | 16,8 | -5,4 | 16,6 |
| 39: Plastik dan Barang dari Plastik | 1.630,0 | -1,7 | -29,7 | 5,5 |
| 72 : Besi dan Baja | 1,410,6 | -1,4 | -48,6 | 4,8 |
| 29 : Bahan Kimia Organik | 1.148,7 | -3,5 | -21,9 | 3,9 |
| 87 : Kendaraan dan Bagiannya | 705,8 | -29,9 | -62,1 | 2,4 |
| 90 : Perangkat Optik | 607,0 | -44,9 | -13,9 | 2,3 |
| 73 : Benda-benda dari Besi dan Baja | 661,4 | 0,1 | -34,1 | 2,2 |
| 23 : Ampas/Sisa Industri Makanan | 640,8 | 7,1 | -2,1 | 2,2 |
| 10 : Serealia | 636,5 | -15,1 | -8,4 | 2,1 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari pertumbuhannya, secara triwulanan beberapa golongan barang HS 2 digit pada 10 barang impor nonmigas utama mengalami peningkatan. Namun secara tahunan, seluruh golongan barang tersebut mengalami penurunan terutama pada besi dan baja; benda-benda dari besi dan baja; dan mesin-mesin pesawat/mekanik.

***Impor nonmigas terbesar berasal dari Tiongkok dan Jepang.***

Impor nonmigas asal Tiongkok mengalami kenaikan sebesar 9,2 persen (QtQ) dan mengalami kontraksi sebesar 1,6 persen (YoY). Tiongkok masih menjadi negara asal impor nonmigas utama Indonesia (*share* 34 persen). Kontraksi impor RRT utamanya berasal dari penurunan impor golongan barang mesin-mesin/pesawat mekanik serta golongan plastik dan barang dari plastik, yang masing-masing turun sebesar 18,4 dan 17,7 persen (YoY)[3].

Impor nonmigas asal Jepang mengalami penurunan pada triwulan III tahun 2020, sebesar 20,5 persen (QtQ) dan 49,9 persen (YoY) penurunan tersebut terutama berasal dari golongan barang mesin-mesin/pesawat mekanik serta mesin/peralatan listrik yang masing-masing turun sebesar 55,3 persen dan 51,8 persen (YoY)[3].

**Tabel 39. Nilai Impor Nonmigas di Beberapa Negara Mitra Dagang Utama**

| Uraian | Nilai Q3 2020 (juta USD) | Growth (%) | | *Share* thd Impor Nonmigas (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | QtQ | YoY | |
| Tiongkok | 10.085,5 | 9,2 | -1,6 | 34 |
| Jepang | 1.984,7 | -20,5 | -49,9 | 6,7 |
| Amerika Serikat | 1.753,2 | -12,2 | -41,9 | 5,9 |
| India | 953,5 | 24,8 | -35,8 | 3,2 |
| Australia | 934,1 | 0,0 | -4,7 | 3,1 |
| Korea Selatan | 1.513,4 | 13,7 | -13,1 | 5,1 |
| Taiwan | 901,8 | 21,6 | -0,9 | 3,0 |
| ASEAN | 5.064,7 | -0,8 | -41,4 | 17,1 |
| Singapura | 1.819,8 | -7,8 | -32,7 | 6,1 |
| Malaysia | 1.172,7 | 30,7 | -31,2 | 3,9 |
| Thailand | 1.184.3 | -20,0 | -43,7 | 4,0 |
| Uni Eropa | 2.367,3 | -1,0 | -32,5 | 8,0 |
| Jerman | 713,0 | -5,0 | -20,3 | 2,4 |
| Belanda | 163,4 | -24,3 | -50,2 | 0,6 |
| Italia | 411,3 | 42,3 | -25,0 | 1,4 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

## Kerjasama Ekonomi Internasional

***Trade Policy Review Indonesia ke-7 di World Trade Organization.***

*Trade Policy Review (TPR)* adalah kegiatan *review* setiap tujuh tahun yang dilaksanakan oleh *World Trade Organization* (WTO) terhadap negara-negara anggota WTO untuk mengkaji kesesuaian kebijakan terkait perdagangan dan investasi yang diterapkan di negara-negara tersebut dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan perdagangan internasional.

[3] Dihitung melalui proksi data ekspor Tiongkok dan Jepang, sumber: trademap (2020).

Pada tahun 2020, Indonesia akan menjalani TPR yang ketujuh. Dalam proses *review* tersebut, akan disusun 2 laporan yaitu: 1) *Government Report* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia dengan Direktorat Multilateral Kementerian Perdagangan sebagai koordinator dan 2) *Secretariat Report* yang disusun oleh Tim *Trade Policy Review Design (TPRD)* WTO. Saat ini kedua laporan tersebut telah disampaikan kepada WTO dan telah diedarkan kepada negara-negara anggota.

### ***Regional Comprehensive Economic Partnership*** **Telah Ditandatangani Oleh 15 Negara**

Pada tanggal 15 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* di sela-sela KTT ASEAN. Setelah proses negosiasi selama delapan tahun, akhirnya RCEP ditandatangani oleh 15 negara yang terdiri dari 10 negara ASEAN dan 5 mitra dagang terbesarnya yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Pada awal negosiasi AS dan India terlibat dalam RCEP, namun AS keluar dari perundingan karena perubahan arah kebijakan disusul oleh India pada akhir tahun 2019 lalu dengan pertimbangan tarif yang dikenakan rendah terhadap barang impor akan menghancurkan produsen lokal.

RCEP merupakan salah satu perjanjian dagang terbesar yang pernah disepakati karena melibatkan 15 negara yang total populasinya mencakup hampir 30 persen populasi dunia[4]. Hal ini berarti RCEP memiliki jangkauan pasar sebesar 30 persen populasi dunia. Selain itu, negara anggota RCEP menyumbang 29 persen dari total PDB dunia. Cakupan dari perjanjian dagang ini bahkan melampaui Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada dan Uni Eropa.

Bergabungnya negara-negara Asia dan Pasifik dalam formasi RCEP dapat dilihat sebagai salah satu pencapaian langkah dalam keseimbangan kekuatan global. Tiongkok sebelumnya telah kalah langkah dari AS karena *Trans-Pacific Partnership (TPP)* yang melibatkan banyak negara Asia dengan Amerika Serikat namun tanpa Tiongkok. Absennya AS dalam formasi RCEP serta keluarnya AS dari TPP menempatkan Tiongkok pada langkah yang lebih maju dalam perdagangan dan politik global.

Lebih lanjut, RCEP bahkan berhasil mempertemukan negara-negara dengan sejarah hubungan yang cukup pelik dalam satu perjanjian dagang, misalnya Tiongkok dan Jepang.

[4]McDonald, "What is the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)?", BBC News Singapore, 16 November 2020, https://www.bbc.com/news/business-54899254 (diakses pada 26 November 2020)

Australia dan Tiongkok juga turut dalam kerjasama ini meskipun Tiongkok diketahui memboikot beberapa produk Australia seperti wine, lobster, dan kapas. Secara umum, RCEP menjadi percontohan dan membawa harapan besar untuk memarakkan tren multilateralisme serta mengikis tren proteksionisme.

**Tabel 40. Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggota RCEP**

| Negara Anggota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Indonesia | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
| Malaysia | 5,0 | 4,5 | 5,8 | 4,8 | 4,3 |
| Brunei Darussalam | - 0,4 | -2,5 | 1,3 | 0,1 | 3,9 |
| Singapura | 3,0 | 3,2 | 4,3 | 3,4 | 0,7 |
| Filipina | 6,4 | 7,2 | 6,9 | 6,3 | 6,0 |
| Thailand | 3,1 | 3,4 | 4,1 | 4,2 | 2,4 |
| Vietnam | 7,0 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,0 |
| Kamboja | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,5 | 7,1 |
| Laos | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | 5,2 |
| Myanmar | 7,5 | 6,4 | 5,8 | 6,4 | 6,5 |
| Tiongkok | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,1 |
| Jepang | 1,2 | 0,5 | 2,2 | 0,3 | 0,7 |
| Korea Selatan | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,0 |
| Australia | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 1,8 |
| Selandia Baru | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 2,2 |

Sumber: World Economic Outlook (2020)

Selain itu, RCEP diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara anggota baik melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama dalam berbagai sektor. Berdasarkan data dari *World Economic Outlook* dan *Oxford Economic*, mayoritas negara anggota RCEP mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif terkecuali Tiongkok, Myanmar, dan Vietnam yang pertumbuhannya masih di atas 1 persen. Dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang memberi dampak secara global, RCEP diprediksi akan berkontribusi pada pemulihan ekonomi di negara-negara anggota. Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Indonesia dan Filipina diproyeksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen pada tahun 2021.

**Tabel 41. Lokasi Perkembangan Perjanjian Internasional Indonesia**

| Negara Anggota | 2020 Q1-Q3 (%, YoY) | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Indonesia | -1,95 | -1,5 | 6,1 |
| Malaysia | -6,34 | -6,0 | 7,8 |
| Brunei Darussalam | - | 0,1 | 3,3 |
| Singapura | -6,53 | -6,0 | 5,0 |
| Filipina | -9,71 | -8,3 | 7,4 |
| Thailand | -7,05 | -7,2 | 4,0 |
| Vietnam | - | 1,6 | 6,7 |
| Kamboja | - | -2,8 | 6,8 |
| Laos | - | 0,2 | 4,8 |
| Myanmar | - | 2,0 | 5,7 |
| Tiongkok | 0,41 | 1,9 | 8,2 |
| Jepang | -6,04 | -5,3 | 2,3 |
| Korea Selatan | -0,88 | -1,9 | 2,9 |
| Australia | -2,89* | -4,2 | 2,9 |
| Selandia Baru | -4,31* | -6,1 | 4,4 |

Sumber: Oxford Economic dan World Economic Outlook (2020)

*data Q3 adalah proyeksi

### Perkembangan *Economic Cooperation Program of Indonesia-Australia Comprehensive Partnership Agreement* (ECP IA-CEPA)

Menyusul berlakunya IA-CEPA secara efektif mulai Juli 2020, salah satu komitmen dalam IA-CEPA adalah kerja sama ekonomi. Australia belum pernah memiliki perjanjian dagang dengan komitmen kerja sama

ekonomi yang komprehensif seperti IA-CEPA ini.

Telah disepakati bahwa komitmen kerja sama ekonomi ini akan dilaksanakan melalui *Economic Cooperation Program* (ECP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional untuk pihak Indonesia dan *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) untuk pihak Australia.

ECP akan berfokus pada kegiatan-kegiatan untuk pengembangan kapasitas bagi berbagai pihak di Indonesia untuk mendukung peningkatan performa Indonesia di perdagangan global dan investasi. Ruang lingkup ECP akan mencakup: i) implementasi IA-CEPA; ii) kerjasama di Bidang Pertanian dan Pengolahan Makanan; 3) *advanced manufacturing*; serta iv) pengembangan keterampilan dan pelatihan. Untuk dapat diimplementasikan pada tahun 2021, saat ini Bappenas tengah dalam proses untuk melakukan finalisasi *Subsidiary Arrangement* serta melengkapi berkas-berkas administrasi pendaftaran ECP sebagai hibah luar negeri.

Proses finalisasi *Subsidiary Arrangement* mencakup pertemuan koordinasi internal Indonesia antara Bappenas dengan K/L terkait, pertemuan koordinasi internal Bappenas antara Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional dengan unit kerja terkait lainnya, serta pertemuan koordinasi dengan DFAT.

**Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Focal Point Indonesia* untuk *the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of Organization of Islamic Cooperation* (COMCEC)**

COMCEC adalah komite khusus di bawah Organisasi Kerjasama Islam yang berfokus pada isu ekonomi dan kerja sama perdagangan. Indonesia telah berpartisipasi pada 2 dari 3 pertemuan tahunan COMCEC pada tahun 2020, yaitu *the 36th Follow-Up Committee Meeting* pada tanggal 20-21 Oktober 2020 serta *the 36th Ministerial Session of COMCEC* pada tanggal 18-19 November dan 25-26 November 2020. Kedua pertemuan diselenggarakan secara virtual menyusul perkembangan pandemi Covid-19 di dunia. Sedangkan *Annual Focal Points Meeting* pada tahun 2020 ditiadakan karena pandemi.

Dalam sesi *Senior Officials Meeting of 36th COMCEC Ministerial Session*, Indonesia menyampaikan beberapa poin intervensi di beberapa agenda pembahasan mengenai kondisi ekonomi di Indonesia dalam kaitannya dengan pandemi, pariwisata di Indonesia di tengah pandemi, kontribusi dalam *COMCEC Trade Working Group*, kontribusi dalam *Agriculture Working Group*, serta informasi terkait tema pertemuan

"*Promoting Entrepreneurship for Tourism Industry Competitiveness*".

Melalui program *COMCEC's Call for Project Proposals*, negara-negara anggota dapat mengusukan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam isu dalam *COMCEC Working Groups* untuk mendapat pendanaan dari COMCEC. Pada *COMCEC 8th Call for Project Proposals*, Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mendaftarkan satu proyek berjudul "*Capacity Building for Metrology among selected OIC Countries*". Proyek tersebut telah lolos tahap seleksi awal dan sedang dalam tahap penilaian akhir.

Menyusul perkembangan pandemi Covid-19 di seluruh dunia, COMCEC mengeluarkan inisiatif pendanaan kegiatan-kegiatan di negara anggota untuk mengatasi dampak pandemi melalui program *COMCEC Covid Response* (CCR). Pada program CCR, Indonesia mendaftarkan 4 kegiatan yang berasal dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Sebanyak 3 proyek bertema perdagangan yang didaftarkan oleh Kementerian Perdagangan yaitu: i) *Direct Grant Project*: *MSMEs Go Digital;* ii) *Direct Grant Project: Maintaining product quality of MSMEs in the midst of pandemic*; dan iii) *Need Assessment Project: Digital technologies: The new way of doing business for MSMEs*. Kementerian Pertanian mendaftarkan sebuah proyek berjudul "*Facilitating Poor, Vulnerable and Marginalized Groups' Access to Food in West Java Province, Indonesia*" untuk diajukan dalam CCR di bawah tema pertanian.

## Perkembangan Perjanjian Internasional Indonesia

**Tabel 42. Perkembangan Perjanjian Internasional Indonesia**

| No | Perjanjian / Kerjasama | Status | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | ASEAN Free Trade Area | Signed and In Effect | 1993 |
| 2 | ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement | Signed and In Effect | 2010 |
| 3 | ASEAN-Canada FTA | Proposed/Under consultation and study | 2017 |
| 4 | ASEAN-EU Free Trade Agreement | Proposed/Under consultation and study | 2015 |
| 5 | ASEAN-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement | Proposed/Under consultation and study | 2016 |
| 6 | ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement | Signed but not yet In Effect | 2017 |
| 7 | ASEAN-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement | Signed and In Effect | 2010 |
| 8 | ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership | Signed and In Effect | 2008 |
| 9 | ASEAN-Pakistan Free Trade Agreement | Proposed/Under consultation and study | 2009 |
| 10 | ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement | Signed and In Effect | 2005 |
| 11 | ASEAN-[Republic of] Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement | Signed and In Effect | 2007 |
| 12 | Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement | Signed and in Effect | 2012 |
| 13 | Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA/ASEAN+6) | Proposed/Under consultation and study | 2005 |
| 14 | East Asia Free Trade Area (ASEAN+3) | Proposed/Under consultation and study | 2004 |
| 15 | Eurasian Economic Union-Indonesia | Proposed/Under consultation and study | 2016 |
| 16 | Free Trade Area of the Asia Pacific | Proposed/Under consultation and study | 2014 |
| 17 | India-Indonesia Comprehensive Economic Cooperation Arrangement | Negotiations launched | 2011 |
| 18 | Indonesia-Chile Free Trade Agreement | Signed but not yet In Effect | 2017 |
| 19 | Indonesia-Colombia Free Trade Agreement | Proposed/Under consultation and study | 2019 |
| 20 | Indonesia-European Free Trade Association Free Trade Agreement | Signed but not yet In Effect | 2018 |
| 21 | Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement | Negotiations launched | 2016 |
| 22 | Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement | Proposed/Under consultation and study | 2018 |
| 23 | Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement | Signed and In Effect | 2008 |
| 24 | Indonesia-Kenya Free Trade Agreement | Proposed/Under consultation and study | 2018 |
| 25 | Indonesia-Morocco Preferential Trade Agreement | Negotiations launched | 2019 |

| No | Perjanjian / Kerjasama | Status | Tahun |
|---|---|---|---|
| 26 | Indonesia-Mozambique Free Trade Agreement | Negotiations launched | 2018 |
| 27 | Indonesia-Nigeria Preferential Trade Agreement | Proposed/Under Consultation and study | 2017 |
| 28 | Indonesia-Pakistan Free Trade Agreement | Signed and In Effect | 2013 |
| 29 | Indonesia-Peru FTA | Proposed/Under consultation and study | 2014 |
| 30 | Indonesia-Republic of Korea Free Trade Agreement | Negotiations launched | 2012 |
| 31 | Indonesia-South Africa Free Trade Agreement | Proposed/Under consultation and study | 2018 |
| 32 | Indonesia-Sri Lanka Free Trade Agreement | Proposed/Under consultation and study | 2018 |
| 33 | Indonesia-Taipei,China FTA | Proposed/Under consultation and study | 2011 |
| 34 | Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement | Negotiations launched | 2018 |
| 35 | Indonesia-Turkey FTA | Negotiations launched | 2017 |
| 36 | Indonesia-Ukraine Free Trade Agreement | Proposed/Under consultation and study | 2016 |
| 37 | Indonesia-United States Free Trade Agreement | Proposed/Under consultation and study | 1997 |
| 38 | Preferential Tariff Arrangement-Group of Eight Developing Countries | Signed and In Effect | 2011 |
| 39 | Regional Comprehensive Economic Partnership | Signed but not yet in Effect | 2020 |
| 40 | Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conference | Signed but not yet In Effect | 2014 |

Sumber: Asia Regional Integration Center (ADB)

Secara umum, kinerja perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA hingga triwulan III tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekspor maupun impor ke banyak negara mitra menurun dipengaruhi oleh dampak Covid-19. Namun, jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020, kinerja perdagangan Indonesia dengan negara mitra mulai membaik. Hal ini dapat dilihat dari neraca perdagangan dengan beberapa negara yang sebelumnya mengalami defisit mulai positif. Ekspor yang meningkat meskipun di tengah kondisi pandemi dibandingkan triwulan III tahun 2020 terjadi ke beberapa negara, antara lain Tiongkok, Myanmar, Brunei Darussalam, Pakistan, Mesir, Australia, Selandia Baru, dan Iran. Peningkatan ekspor terbesar adalah ekspor ke Tiongkok yang mengalami kenaikan sebesar USD1,9 miliar dibandingkan pada tahun 2019.

Kontribusi ekspor Indonesia ke negara mitra FTA di kawasan Asia Timur yang terdiri dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok termasuk Hongkong mencapai 31,7 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia. Pada saat yang sama, Indonesia juga mengimpor 42,1 persen produk dari negara-negara tersebut. Sedangkan negara-negara

mitra FTA di kawasan Asia Tenggara berkontribusi terhadap 24,9 persen dari total ekspor Indonesia, dan 23,2 persen dari impor Indonesia.

Sementara itu, negara-negara mitra FTA di kawasan Asia Selatan yang terdiri dari India, Bangladesh, dan Pakistan menjadi tujuan ekspor dari 8,6 persen produk Indonesia, dan sumber 2,7 persen dari total impor Indonesia.

**Tabel 43. Kinerja Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA**

| Kawasan / Negara | Q3 2019 | | Q3 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | Ekspor | Impor | Ekspor | Impor |
| | (juta USD) | | | |
| **Indonesia terhadap Dunia** | **124.428,2** | **126.669,4** | **117.146,6** | **103.680,0** |
| **KAWASAN ASIA TIMUR** | | | | |
| Jepang | 12.052,9 | 11.889,5 | 9.989,3 | 8.113,4 |
| Korea Selatan | 5.528,8 | 6.268,7 | 4.722,2 | 4.928,2 |
| R. R. Tiongkok | 19.866,8 | 32.604,5 | 21.809,1 | 28.461,0 |
| Hongkong, Tiongkok | 1.992,0 | 2.534,5 | 1.672,6 | 1.968,2 |
| *Kontribusi terhadap total* | *31,70%* | *42,08%* | *32,60%* | *41,93%* |
| **KAWASAN ASIA TENGGARA** | | | | |
| Thailand | 4.785,2 | 7.107,6 | 3.677,2 | 4.947,4 |
| Singapura | 9.835,5 | 12.982,1 | 8.289,4 | 9.138,9 |
| Filipina | 5.152,8 | 625,3 | 4.141,4 | 397,3 |
| Malaysia | 6.408,2 | 5.576,5 | 5.515,4 | 4.798,7 |
| Myanmar | 628,9 | 130,8 | 769,3 | 158,5 |
| Kamboja | 431,2 | 33,7 | 406,8 | 36,2 |
| Brunei Darussalam | 65,8 | 22,1 | 89,9 | 69,7 |
| Laos | 4,5 | 24,5 | 3,7 | 32,6 |
| Vietnam | 3.691,7 | 2.824,2 | 3.369,5 | 2.242,8 |
| *Kontribusi terhadap total* | *24,92%* | *23,15%* | *22,42%* | *21,05%* |
| **KAWASAN ASIA SELATAN** | | | | |
| India | 8.612,4 | 3.253,6 | 7.195,5 | 2.722,3 |
| Pakistan | 1.330,8 | 300,5 | 1.514,6 | 149,4 |
| Bangladesh | 1.366,2 | 70,0 | 1.150,0 | 53,1 |
| *Kontribusi terhadap total* | *9,09%* | *2,86%* | *8,42%* | *2,82%* |
| **KAWASAN AMERIKA SELATAN** | | | | |
| Chili | 102,8 | 119,8 | 97,0 | 84,0 |
| *Kontribusi terhadap total* | *0,08%* | *0,09%* | *0,08%* | *0,08%* |
| **KAWASAN EROPA** | | | | |
| Turki | 881,3 | 256,0 | 758,3 | 200,1 |
| *Kontribusi terhadap total* | *0,71%* | *0,20%* | *0,65%* | *0,19%* |
| **KAWASAN AFRIKA** | | | | |
| Mesir | 721,9 | 112,1 | 753,7 | 101,6 |
| Nigeria | 312,8 | 1.468,1 | 279,0 | 782,0 |
| *Kontribusi terhadap total* | *0,83%* | *1,25%* | *0,88%* | *0,85%* |

| Kawasan / Negara | Q3 2019 | | Q3 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | Ekspor | Impor | Ekspor | Impor |
| | (juta USD) | | | |
| **KAWASAN OCEANIA** | | | | |
| Australia | 1.754,2 | 4.055,2 | 1.810,8 | 3.361,7 |
| Selandia Baru | 341,0 | 566,1 | 350,9 | 556,8 |
| *Kontribusi terhadap total* | *1,68%* | *3,65%* | *1,85%* | *3,78%* |
| **KAWASAN TIMUR TENGAH** | | | | |
| Iran | 341,0 | 566,1 | 350,9 | 556,8 |
| *Kontribusi terhadap total* | *0,27%* | *0,45%* | *0,30%* | *0,54%* |

Sumber: Kementerian Perdagangan

Perkembangan perdagangan berdasarkan FTA menunjukkan bahwa FTA yang melibatkan negara ASEAN berkontribusi lebih dari 20 persen total ekspor dan impor Indonesia. FTA dengan kontribusi terbesar adalah *ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement*.

**Tabel 44. Kontribusi Nilai Perdagangan Indonesia berdasarkan FTA terhadap Total Perdagangan Indonesia dengan Dunia**

| FTA | Q3 2019 | | Q3 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| | Ekspor | Impor | Ekspor | Impor |
| | (persen) | | | |
| ASEAN FTA | 38,35 | 35,45 | 34,38 | 28,57 |
| ASEAN-Australia and New Zealand FTA | 40,94 | 41,04 | 37,21 | 33,70 |
| ASEAN-Hong Kong, China FTA | 40,81 | 38,52 | 36,57 | 31,14 |
| ASEAN-India CECA | 49,00 | 39,39 | 43,80 | 32,13 |
| ASEAN-Japan CEP | 53,26 | 49,83 | 47,46 | 39,19 |
| ASEAN-People's Republic of China CECA | 62,92 | 74,87 | 62,93 | 65,83 |
| ASEAN-Republic of Korea CECA | 45,19 | 43,03 | 40,56 | 35,02 |
| Indonesia-Australia CEPA | 1,41 | 3,20 | 1,55 | 3,24 |
| Indonesia-Chile FTA | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
| Indonesia-Japan EPA | 14,91 | 14,37 | 13,08 | 10,62 |
| Indonesia-Pakistan FTA | 1,65 | 0,36 | 1,98 | 0,20 |
| Preferential Tariff Arrangement-Group of Eight Developing Countries | 13,74 | 9,43 | 13,27 | 7,99 |

Sumber: Kementerian Perdagangan

BAB III

# PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI

## 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

***Turunnya kasus Covid-19 diharapkan memacu pemulihan ekonomi global.***

International Monetary Foundation (IMF) bulan Oktober memproyeksi perekonomian global terkontraksi 4,4 persen (YoY) pada tahun 2020, lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya (-4,9 persen, YoY). Proyeksi yang lebih baik didorong oleh pemulihan ekonomi yang lebih baik dari perkiraan pada triwulan II, terutama di negara maju. Namun, proyeksi pada tahun 2021 lebih rendah dibanding sebelumnya sebesar 5,2 persen (YoY). Terkendalinya kasus Covid-19 ke level terendah hingga ketersediaan vaksin menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi global.

Pertumbuhan negara maju diproyeksikan terkontraksi 5,8 persen (YoY) pada tahun 2020, lebih baik dibanding proyeksi sebelumnya yang sebesar -8,0 persen (YoY). Sementara itu, proyeksi negara berkembang direvisi lebih dalam dibandingkan proyeksi sebelumnya (-3,0 persen, YoY) menjadi -3,3 persen (YoY).

**Tabel 45. Proyeksi Pertumbuhan Beberapa Negara**

| Kawasan | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| **Negara Maju** | | |
| Amerika Serikat | -4,3 | 3,9 |
| Kawasan Eropa | -8,3 | 5,2 |
| Jerman | -6,0 | 4,2 |
| Inggris | -9,8 | 5,9 |
| Jepang | -5,3 | 2,3 |
| **Negara Berkembang** | | |
| Tiongkok | 1,9 | 8,2 |
| India | -10,3 | 8,8 |
| ASEAN-5 | -3,4 | 6,2 |
| **Amerika Latin dan Karibia** | | |
| Brazil | -5,8 | 2,8 |
| Sub Sahara Afrika | -3,0 | 3,1 |
| Afrika Selatan | -8,0 | 3,0 |
| Global | -4,4 | 5,2 |

Sumber: IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2020

Perekonomian Amerika Serikat diproyeksi terkontraksi 4,3 persen sepanjang tahun 2020, lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya (-8,0 persen, YoY). Sementara pada tahun 2021 tumbuh 3,9 persen (YoY).

Ekonomi Brazil pada tahun 2020 diproyeksi terkontraksi sebesar 5,8 persen (YoY), lebih baik dari proyeksi sebelumnya (-9,1 persen, YoY). Namun, pertumbuhan tahun 2021 direvisi lebih rendah menjadi 2,8 persen (YoY).

Ekonomi Tiongkok diproyeksi tumbuh melambat pada tahun 2020 sebesar 1,9 persen (YoY) didorong oleh perkembangan kasus Covid-19 yang rendah dan terkendali sejak triwulan II tahun 2020. Industri dan aktivitas ekonomi lain di Tiongkok juga mulai pulih di tengah permintaan global yang masih rendah. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan meningkat hingga sebesar 8,2 persen (YoY) karena *baseline effect* dengan asumsi kondisi ekonomi global lebih baik dibandingkan tahun 2020.

Prospek ekonomi bagi negara berkembang lainnya masih tidak pasti, disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat penyebaran Covid-19, perkembangan industri pariwisata, dan kondisi keuangan. Seluruh negara berkembang diperkirakan terkontraksi pada tahun 2020. Perekonomian India diproyeksi terkontraksi semakin dalam dari -4,5 persen (WEO April) menjadi -10,3 persen (YoY) sepanjang tahun fiskal (berakhir Maret 2021). Hal tersebut disebabkan oleh kontraksi aktual yang terjadi pada triwulan II tahun 2020 lebih dalam dari perkiraan. Namun, pada tahun 2021 diproyeksi *rebound* hingga tumbuh 8,8 persen (YoY).

ASEAN-5 juga diproyeksi terkontraksi semakin dalam dari 2,0 persen (YoY) menjadi -3,4 persen (YoY) pada tahun 2020. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan tahun 2021 tetap sebesar 6,2 persen (YoY). Pengangguran di masing-masing negara diproyeksikan meningkat pada tahun 2020, kecuali Thailand yang tetap 1,0 persen. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran diperkirakan turun meskipun masih lebih tinggi dari tahun 2019.

IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang sepanjang tahun 2020 terkontraksi 5,3 persen (YoY).

Sementara Bank of Japan (BoJ) memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun fiskal (berakhir Maret 2021) terkontraksi 5,5 persen (YoY) yang disebabkan oleh belanja jasa yang masih rendah. Harga konsumen inti juga diproyeksi turun 0,6 persen (YoY). Namun, tahun fiskal selanjutnya diproyeksi kembali tumbuh hingga 3,6 persen (YoY), didorong oleh pemulihan kinerja ekspor dan produktivitas.

Berdasarkan proyeksi bank sentral Korea Selatan, pertumbuhan ekonomi Korea pada tahun 2020 secara keseluruhan diprediksi turun 1,3 persen (YoY), dan kembali tumbuh 2,8 persen (YoY) pada tahun 2021. Kebijakan fiskal yang ekspansif diyakini akan memperbaiki kinerja ekspor. Namun, pemulihan konsumsi masyarakat terbatas akibat peningkatan kasus Covid-19 di Korea Selatan yang terjadi belakangan ini.

Inflasi tahun 2020 diproyeksikan sebesar 0,4 persen (YoY), sama dengan tingkat inflasi pada tahun 2019. Inflasi inti tahun 2020 diprediksi sebesar 4,0 persen (YoY) dan meningkat menjadi 0,8 persen pada 2021, yang didorong oleh kenaikan harga pada produk pertanian, peternakan, dan perikanan akibat cuaca yang memburuk dan perbaikan kondisi ekonomi. Di sisi lain, perlambatan ekonomi yang berlanjut akibat pandemi dan turunnya harga minyak mentah dapat menahan inflasi.

***Harga komoditas energi turun pada tahun 2020.***

**Tabel 46. Proyeksi Harga Komoditas Global**

| Komoditas | Unit | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| **Energi** | | | |
| Batubara | USD/mt | 57,2 | 57,8 |
| Minyak Mentah | USD/bbl | 41,0 | 44,0 |
| Gas Alam, Eropa | USD/mmbtu | 2,8 | 4,0 |
| **Non Energi** | | | |
| Minyak Kelapa Sawit | USD/mt | 710 | 723 |
| Karet | USD/kg | 1,62 | 1,68 |
| Tembaga | USD/mt | 5.050 | 6.300 |
| Emas | USD/toz | 1.775 | 1.740 |

Sumber: World Bank, *Commodity Markets Outlook,* Oktober 2020

Seluruh harga komoditas energi sepanjang tahun 2020 diproyeksi turun dibanding tahun sebelumnya. Proyeksi Bank Dunia pada bulan Oktober merevisi harga komoditas yang turun semakin dalam pada tahun 2020 dan 2021, kecuali minyak mentah. Proyeksi minyak mentah tahun 2021 direvisi menjadi lebih tinggi.

Harga minyak mentah rata-rata diprediksi turun hingga 33,2 persen pada 2020 menjadi USD41,0 per barel. Permintaan minyak mentah masih lemah dan diprediksi tetap di bawah level pra-pandemi hingga tahun 2023. Pandemi yang lebih lama dan menyebabkan *lockdown* dapat menyeret harga minyak jatuh lebih dalam. Harga rata-rata minyak mentah diperkirakan pulih pada tahun 2021 menjadi USD44 per barel, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi.

Harga batu bara acuan pada tahun 2020 diprediksi sebesar USD57,0 per metrik ton, turun 26,6 persen dibandingkan harga tahun 2019. Sementara pada tahun 2021, harga batu bara diproyeksi sedikit lebih tinggi menjadi USD57,8 per metrik ton. Perkembangan harga batu bara masih terdampak isu pengalihan pada energi terbarukan.

Harga gas alam diproyeksi turun 41,7 persen menjadi USD2,8 per mmbtu pada tahun 2020. Harga gas alam telah turun dalam sepanjang semester satu tahun 2020 yang kemudian meningkat pada triwulan III. Namun, permintaan dunia pada tahun 2020 secara keseluruhan diperkirakan masih lebih rendah tiga persen dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 diproyeksi meningkat didorong oleh pemulihan konsumsi seiring perbaikan ekonomi global.

***Harga komoditas pertanian semakin meningkat.***

Komoditas pertanian secara umum diproyeksi tetap kuat pada tahun 2020. Harga minyak kelapa sawit pada tahun 2020 meningkat 16,6 persen (YoY) menjadi USD710 per metrik ton. Penguatan harga tersebut didorong oleh turunnya produksi pada musim panen sebelumnya.

Harga gandum meningkat 5,0 persen dibandingkan triwulan III tahun 2019. Sementara harga beras meningkat 17,0 persen (YoY), didorong oleh faktor cuaca yang kurang mendukung di negara penghasil beras utama. Selain itu juga dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan ekspor.

Harga karet pada tahun 2020 sebesar USD1,62 per kilogram, turun 1,2 persen dibandingkan harga pada tahun 2019. Melemahnya harga karet disebabkan oleh turunnya permintaan global sebesar 10 persen (YoY) sementara produksi hanya turun 5 persen. Sejalan dengan meningkatnya permintaan ban, harga karet diprediksi meningkat lebih dari 3 persen pada tahun 2021.

***Komoditas logam industri secara umum diproyeksi turun.***

Harga nikel diproyeksi turun 3,0 persen (YoY) menjadi USD13.500 per metrik ton. Turunnya harga nikel merupakan dampak dari anjloknya permintaan global yang terjadi pada triwulan II tahun 2020. Meskipun permintaan meningkat perlahan pada triwulan III, namun masih di bawah level normal. Sementara harga timah diproyeksi turun 9,4 persen dibandingkan tahun 2019 menjadi USD18.661 per metrik ton.

Komoditas logam industri yang diproyeksi mengalami perbaikan harga pada tahun 2020 adalah bijih besi dan tembaga. Harga bijih besi pada tahun 2020 diproyeksi meningkat 14,1 persen (YoY) menjadi USD107,0 per dmt didorong oleh tingginya permintaan dari TIongkok

untuk produksi baja. Di sisi lain, pasokan global turun karena produksi di Brazil terganggu akibat pandemi. Namun, pada tahun 2021 harga bijih besi diproyeksikan turun 2 persen sejalan dengan pasokan dari Brazil yang membaik.

Peningkatan juga terjadi pada tembaga yang menguat dari USD6.010 menjadi USD6.050 per metrik ton. Pada bulan September 2020, harga tembaga naik hingga melampaui harga sebelum pandemi. Kondisi tersebut didorong oleh tingginya permintaan dari Tiongkok dan disaat bersamaan terjadi gangguan pasokan global. Kasus Covid-19 yang melonjak di negara pemasok terbesar, Chile, menyebabkan penghentian produksi sementara. Hal serupa terjadi di Panama dan Peru yang dibarengi dengan isu cuaca. Pasokan akan diperkirakan kembali pulih dalam beberapa tahun kedepan dan permintaan diperkirakan meningkat dari luar Tiongkok. Harga tembaga diproyeksi meningkat 4 persen pada tahun 2021.

Sementara itu, harga emas diprediksi meningkat hingga 27,5 persen dibandingkan tahun 2019 menjadi USD1.775 per troy ons. Hal tersebut didorong oleh peningkatan permintaan dan harga emas yang kuat hingga triwulan III tahun 2020. Pada tahun 2021, harga emas diproyeksi stabil sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia.

## 3.2 Proyeksi Perekonomian Indonesia

***Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mengalami perlambatan, dampak pandemi Covid-19.***

Membaiknya pertumbuhan pada triwulan III tahun 2020 diharapkan berlanjut pada triwulan IV tahun 2020. Namun pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2020 diperkirakan masih akan terkontraksi sebesar 1,8 persen, sehingga secara keseluruhan tahun pertumbuhan ekonomi akan mencapai -2,0 persen.

**Tabel 47. Konsensus Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

| Lembaga | 2020 |
|---|---|
| IMF[1)] | -1,5 |
| World Bank[2)] | -1,6 |
| OECD[3)] | -3,3 |
| ADB[4)] | -1,0 |
| Bloomberg[5)] | -2,0 |
| Bappenas[6)] | -2,0 |

Sumber: [1)]World Economic Outlook Oktober 2020 [2)]World Bank East Asia and Pacific Economic Update Oktober 2020 [3)]OECD Economic Outlook September 2020 [4)]Asian Development Outlook September 2020 [5)]Indonesia Economic Forecast November 2020 [6)]Outlook November 2020

Dari sisi pengeluaran, mulai melandainya penyebaran kasus Covid-19 akan mampu mendorong perbaikan konsumsi dan investasi. Peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama untuk konsumsi restoran dan hotel serta transportasi dan infokom, juga akan didorong oleh banyaknya

hari libur akibat pemindahan cuti bersama. Risiko untuk investasi akan berasal dari investasi pemerintah, seiring dengan kontraksi yang lebih besar dari belanja modal pada triwulan IV tahun 2020.

Dorongan belanja konsumsi pemerintah diperkirakan akan melambat. Dengan sisa alokasi anggaran yang ada, pertumbuhan belanja konsumsi pemerintah pusat pada triwulan IV tahun 2020 diperkirakan akan melambat dibandingkan triwulan III tahun 2020. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk melihat potensi dorongan dari belanja pemerintah daerah.

Kinerja ekspor diperkirakan akan mengalami tekanan seiring dengan terjadinya *second wave* yang diikuti penerapan kembali *lockdown* di banyak negara dunia. Kondisi ini menyebabkan aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia kembali melambat.

**Tabel 48. PDB Berdasarkan Pengeluaran**

| Komponen Pengeluaran | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi RT | 2,8 | -5,5 | -4,0 | -2,6 | -2,4 |
| Konsumsi LNPRT | -5,1 | -7,8 | -2,1 | -1,4 | -4,1 |
| Konsumsi Pemerintah | 3,7 | -6,9 | 9,8 | 1,2 | 1,8 |
| PMTB/Investasi | 1,7 | -8,6 | -6,5 | -5,5 | -4,8 |
| Ekspor | 0,2 | -11,7 | -10,8 | -7,3 | -7,5 |
| Impor | -2,2 | -17,0 | -21,9 | -16,9 | -14,7 |
| PDB | 3,0 | -5,3 | -3,5 | -1,8 | -2,0 |

Sumber: Outlook Bappenas, Agustus 2020

Dari sisi lapangan usaha, perbaikan signifikan diperkirakan akan terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan. Perbaikan sejalan dengan peningkatan permintaan terhadap ketiga sektor seiring dengan mulai melandainya penyebaran Covid-19 dan banyaknya hari libur pada triwulan IV tahun 2020.

Sementara itu, sektor pertanian akan dihadapkan pada risiko fenomena La Nina yang dapat berdampak pada hasil produksi pertanian. Selain itu, secara QtQ pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan IV selalu negatif lebih dari 20 persen karena bukan masa panen.

Industri pengolahan diperkirakan mengalami perbaikan secara bertahap. PMI manufaktur bulan November masih mengindikasikan terjadinya kontraksi di sektor ini. Jika berkurangnya hari kerja karena libur dapat berdampak positif pada sektor lain, dampak pada sektor industri pengolahan cenderung berkebalikan. Berkurangnya hari kerja berarti berkurangnya hari produksi. Selain itu, pola *historical* menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif secara QtQ pada triwulan IV. Seiring dengan tutup buku

akhir tahun, perusahaan di sektor ini lebih memilih untuk menghabiskan *inventory* yang ada.

Sektor informasi dan komunikasi dan jasa kesehatan masih akan menjadi sektor dengan pertumbuhan tinggi pada triwulan IV, mampu kembali tumbuh *double digit*.

**Tabel 49. PDB Berdasarkan Lapangan Usaha**

| Komponen Pengeluaran | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 0,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,6 |
| Pertambangan | 0,4 | -2,7 | -4,3 | -1,6 | -2,1 |
| Industri Pengolahan | 2,1 | -6,2 | -4,3 | -2,1 | -2,7 |
| Pengadaan Listrik | 3,9 | -5,5 | -2,4 | -1,7 | -1,5 |
| Pengadaan Air | 4,6 | 4,6 | 6,0 | 4,0 | 4,8 |
| Konstruksi | 2,9 | -5,4 | -4,5 | -3,3 | -2,6 |
| Perdagangan | 1,6 | -7,6 | -5,0 | -2,8 | -3,5 |
| Transportasi | 1,3 | -30,8 | -16,7 | -8,5 | -13,8 |
| Penyediaan Akomodasi | 1,9 | -22,0 | -11,9 | -6,7 | -9,7 |
| Informasi dan Komunikasi | 9,8 | 10,9 | 10,6 | 11,8 | 10,8 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 10,6 | 1,0 | -0,9 | -0,7 | 2,5 |
| Real Estat | 3,8 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,6 |
| Jasa Perusahaan | 5,4 | -12,1 | -7,6 | -4,8 | -4,9 |
| Administrasi Pemerintah | 3,2 | -3,2 | 1,9 | 1,1 | 0,7 |
| Jasa Pendidikan | 5,9 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 3,3 |
| Jasa Kesehatan | 10,4 | 3,7 | 15,3 | 16,6 | 11,6 |
| Jasa Lainnya | 7,1 | -12,6 | -5,5 | -2,2 | -3,4 |
| PDB | 3,0 | -5,3 | -3,5 | -1,8 | -2,0 |

Sumber: Outlook Bappenas, November 2020

# POLICY BRIEF

**Statistik Kebencanaan dalam Penguatan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana**

(Cut Sawalina, Rahma Hanii M, Sasmita Kartika S)

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko bencana tinggi dan perubahan iklim yang berdampak pada capaian pembangunan. Oleh sebab itu, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 hal ini termasuk dalam salah satu dari 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Peristiwa bencana yang menyebabkan kerusakan dan kerugian baik secara sosial maupun ekonomi, dapat diukur melalui data yang berkaitan dengan peristiwa bencana yang terjadi. Ketersediaan data yang akurat terkait dengan penanggulangan bencana menjadi perhatian pemerintah. Permasalahan yang muncul dalam menanggulangi hal tersebut yaitu terlalu banyak varian data yang menyebabkan kesenjangan kredibilitas seperti kesalahan, perbedaan, ketidaksesuaian dan konflik data. Pentingnya ketersediaan data yang akurat, andal, dan tepat waktu sangat penting dalam penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) guna perencanaan pembangunan khususnya bidang statistik sosial dan ekonomi.

SDBI juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam partisipasi *Sendai Framework* yang merupakan sebuah *roadmap* global tentang konsep dan target untuk mengurangi risiko bencana. Selain itu, pengurangan risiko bencana juga menjadi salah satu target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berkaitan dengan 10 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengingat pentingnya statistik kebencanaan ini, dipandang perlu melakukan pembenahan tata kelola statistik bencana untuk menghasilkan data dan statistik yang tepat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## IDENTIFIKASI

Peristiwa bencana dapat ditimbulkan oleh faktor alami, teknologi, maupun biologis. Pemanfaatan data dalam hal ini berfokus pada bencana alam yang kerugiannya dapat

terukur. Informasi yang tepat dan akurat bergantung pada ketersediaan data pendukung yang komprehensif. Dalam proses membangun SDBI, dibutuhkan koordinasi dengan dua lembaga kunci dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pusat Statistik (BPS). BNPB berperan dalam merumuskan kebijakan terkait bencana dan data yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. Sementara BPS memegang peran sebagai pembina statistik yang memberi arahan dan masukan dalam pengembangan dan penerapan standar teknik dan metodologi statistik, serta penyediaan bimbingan teknis statistik, sehingga data yang dihasilkan memiliki standar dan dapat dibandingkan secara internasional.

Data bencana yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sejauh ini terbatas pada data bencana yang telah terjadi serta analisis dampaknya yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, data dasar yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kondisi bencana belum tersusun dengan baik dan masih ada perbedaan data antar instansi. Dalam proses pengumpulan data, BNPB telah menghimpun data dari berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat nasional untuk menyediakan informasi kajian risiko bencana secara online berbasis *Geographic Information System* (GIS) dalam portal inaRISK bagi masyarakat. Namun, masih banyak data yang belum dapat disediakan untuk membangun statistik bencana yang lengkap. Kendala tersebut disebabkan oleh berbagai macam kondisi seperti data yang memang belum ada, standar data yang berbeda, atau keengganan dalam berbagi data.

Bappenas dalam hal ini berperan untuk menjembatani koordinasi antara BNPB, BPS, maupun K/L lainnya agar kebutuhan data dapat terpenuhi. Melihat kondisi atau kendala yang dihadapi di setiap instansi dalam proses pengumpulan data. Selain itu, juga ikut memantau perkembangan Satu Data Bencana Indonesia.

**PEMBAHASAN**

Meskipun basis data bencana secara nasional ditetapkan oleh BNPB, namun diperlukan peran Kementerian/Lembaga lainnya untuk mendukung data dasar. Data tersebut bisa disimpan melalui portal yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk melakukan penilaian risiko, mitigasi bencana, rehabilitasi pasca bencana, maupun keperluan statistik lainnya yang terkait penanggulangan bencana. BNPB dengan masukan teknis metodologis dari BPS dan BIG menetapkan struktur format baku sebagai acuan dalam pengumpulan data bencana. Dengan demikian, BNPB dapat menghimpun data dari produsen data dan memastikan kesesuaiannya dengan standar dan metodologi yang sama.

Penatakelolaan aplikasi, komunikasi publik, dan pemaduan data bencana dengan data lain dari berbagai sektor untuk disajikan dalam SDBI menjadi wewenang bagi wali data tingkat nasional, dalam hal ini Kemenkominfo. Peran kementerian/lembaga

lainnya dapat menjadi penyedia sekaligus pengguna data bencana sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap kementerian/lembaga menyatakan dengan jelas tugas dan fungsinya terkait penyelenggaraan bencana di semua tahapan. Di tingkat daerah, BPBD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data dan Dinas Kominfo dan Statistik sebagai wali data harus memastikan bahwa data yang dihimpun telah memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

**Alur Pengelolaan Data**

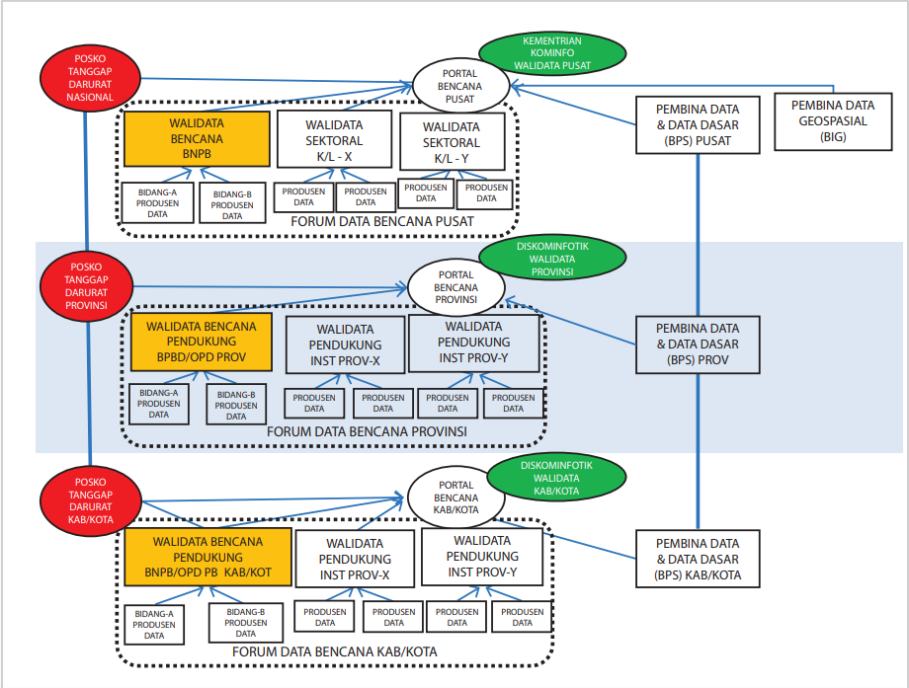


Sumber: Buku Satu Data Bencana Indonesia

Data yang dikumpulkan oleh produsen data akan sangat berperan dalam penguatan mitigasi bencana yang membutuhkan data-data dasar. Terdapat tiga kondisi yang menjadi acuan dalam pengelompokan data yang dibutuhkan pada setiap tahapan penanggulangan bencana, yakni:

1. Pra-bencana, yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Data dibutuhkan untuk mempersiapkan data-data yang dibutuhkan ketika terjadi bencana.
2. Saat terjadi bencana, mencakup status siaga bencana yang menunjukkan perlunya evakuasi dini, tanggap dan transisi darurat. diambil ketika telah terjadi sebuah bencana untuk melakukan *tracking* pada korban, pengungsi, maupun orang yang hilang. Pendataan pada situasi bencana akan menjadi

lebih mudah ketika data pra-bencana sudah kuat yang dibarengi dengan pemanfaatan teknologi dengan baik.

3. Pasca-bencana, yang terdiri dari rekonstruksi dan rehabilitasi. Data terbentuk setelah terjadinya bencana yang diperkuat oleh data pra bencana untuk menghitung estimasi kerugian yang ditimbulkan serta kebutuhan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi jika terjadi kerusakan fisik maupun kondisi sosial.

**REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Pemetaan terhadap statistik kebencanaan dapat dijadikan acuan agar diterapkan pada daerah lainnya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Pembagian peran dan koordinasi yang tepat dapat menghapus tumpang tindih maupun perbedaan data yang selama ini terjadi. *Updating* data yang rutin juga perlu dilakukan agar data menjadi lebih akurat serta lebih siap dalam menangani kondisi bencana serta proses pemulihan akibat bencana. Oleh karena itu, untuk membangun statistik kebencanaan yang baik perlu dilakukan beberapa tahap:

1. Menyusun *framework*
   Menegaskan peran dan tanggungjawab masing-masing instansi pada penyediaan dan pengelolaan data agar tidak ada lagi data ganda. Pelibatan berbagai pihak sejak tahap awal penting untuk menciptakan pemahaman yang sama dan jelas tentang ruang lingkup pengumpulan data.
2. Meninjau struktur data yang dibutuhkan dalam setiap kondisi
   Bersama dengan BNPB dan BPS menentukan data-data dasar yang dibutuhkan dalam setiap tahap menghadapi bencana. BNPB sebagai pihak yang paling paham dengan kondisi di lapangan memegang peran penting untuk menentukan data-data yang dibutuhkan.
3. Menentukan standar data

Penentuan standar data harus dilakukan dari tingkat nasional agar dapat diterapkan di setiap wilayah dan dapat diperbandingkan dengan menggunakan standar baku dan metadata yang sama.

4. Mengembangkan mekanisme dan protokol penghimpunan pertukaran dan pengelolaan data

   Untuk menghapus *silo* antar instansi yang terjadi saat ini, dibutuhkan ketetapan yang mengikat agar sistem dapat berjalan dengan baik. Mekanisme penghimpunan data juga perlu ditetapkan agar produsen data memiliki acuan dalam pengumpulan data dan tetap berjalan pada koridornya.

5. Melaksanakan *pilot-project*

   Sebelum ditetapkan sebagai standar baku yang mengikat di seluruh wilayah perlu dilakukan uji coba di daerah tertentu untuk menilai kualitas rancangan serta kesiapan daerah. Jika *pilot project* berjalan dengan baik, maka bisa dilanjutkan dengan beberapa daerah lainnya. Setelah itu, diterapkan pada seluruh daerah.

Membangun sebuah kerangka statistik bencana yang kuat membutuhkan komitmen dari berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses strukturisasi terlihat sangat panjang. Namun, manfaat dari statistik yang baik akan sangat berguna dalam jangka waktu yang lebih panjang.

**REFERENSI**

BNPB, BPS, dan UNFPA (2014), Guidelines for the Use of Population Data in Disaster Management.

BNPB dan BPS (2020), Satu Data Bencana Indonesia.

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2018), Disaster-related Statistics Framework. 2018.

# SUSUNAN TIM REDAKSI


**Penanggungjawab**
Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D

**Pemimpin Redaksi**
Eka Chandra Buana, SE, MA

**Dewan Redaksi**
Dr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA
Dr. Onny Noyorono, MIA, MA
Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D
P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, MSc, Ph.D
Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM
Dr. Haryanto, SE, MA
Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA
Ir. Imarita Trihanda, MS

**Redaktur Pelaksana**
Cut Sawalina, SE, MSi
Mochammad Firman Hidayat, SE, MA
Toni Priyanto J, S.Kom, ME
Rosy Wediawaty, SE, MSE, MSc
Tari Lestari, S.Si, SE, MS
Muhammad Fahlevy, SE, MA
Octal Pramudito, SE, MA
Dra. Dwi Martini, ME
Yunus Gastanto, SE, PG.Dip
Istasius Angger Anindito, SE, MA
Yogi Harsudiono, SE, MPA
Ibnu Yahya, SE, M.Ec. Pol
Sukhad, S.IP
Drs. Muhammad Arif, Msi
Fajar Hadi Pratama, ST
Rufita Sri Hasanah, SE, MEF

# SUSUNAN TIM REDAKSI

**Penulis**
Filza Amalia, SE
Rakhmi Fadillah, SE
Mario Rosario Wisnu Aji, SE
Achmad Rifa'I, S.Pd, M.Sc
Haqiqi Masnatin, SE
Rahma Hanii Maulida, SE
Rinda Komalasari, SE
Firdaussy Yustiningsih, STP, ME
Sharmila Erizaputri, SE
Hillary Tanida Stephany Sitompul, S.HI
Richard Lorenz Hasiholan Silitonga, SE
Aris Saputra, SE
Aldi Turindra Rachman, SE
Deni Apriyanto, SE
Hilda Roseline, SE
Mutiara Maulidya, SE
Widyastuti Hardaningtyas, SE
Widath Chaerunissa Ayuningtyas, SE
Zakka Farisy, SE
Imroatul Amaliyah, SE
Muhammad Fikri Masteriarsa, S.Stat

**Distributor/Sirkulasi**
Imam Musadad
Tulus Sujadi

**Administrasi**
Dina Fitriani, SPd
Riris Karisma Kholid, SE

**Editor**
Rahma Hanii Maulida, SE

**Grafis dan Layout**
Zaid Fadhlurrahman, S.Kom

*Untuk memberikan hasil laporan terbaik,*

*kami mengharapkan saran dan kritik membangun dari pembaca.*

*Kritik dan saran harap dikirimkan ke alamat surat elektronik berikut*

ditpmas@bappenas.go.id

Kementerian PPN/
Bappenas

KEDEPUTIAN BIDANG EKONOMI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Gedung Wisma Bakrie 2 Lt. 5, Jl. HR Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta Selatan, 12920
Telp. (021) 31934267

9 772580 251004

VISI
INDONESIA
2045